



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA BENGKULU TAHUN 2025-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALI KOTA BENGKULU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 - 2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bengkulu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
8. Pelaku pembangunan adalah Pemerintah (Pusat dan Daerah), masyarakat dan dunia usaha.
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada.
10. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RJPMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja PD atau Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJPD TAHUN 2025-2045

Pasal 2

- (1) RPJPD tahun 2025-2045 adalah rencana 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan:

- a. visi, misi, tujuan daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, strategi; dan
 - b. tahapan pembangunan jangka panjang.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

BAB III

SISTEMATIKA RPJPD TAHUN 2025 - 2045

Pasal 3

Sistematika Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 26 September 2024
Pj. WALI KOTA BENGKULU,



ARIF GUNADI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 26 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,



EKO AGUSRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR ..07....

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2025-2045.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA BENGKULU TAHUN 2025-2045**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. Rencana pembangunan ini memiliki lingkup waktu jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode dua puluh tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, penyusunan RPJPD wajib selaras dengan visi RPJPN tahun 2025-2045 "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" serta mempedomani substansi RPJPN sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam RPJPD Tahun 2025-2045. RPJPD memiliki kedudukan yang strategis sebagai pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak. Terkait hal tersebut, maka perlu disusun dokumen RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2025-2045.

Rancangan Akhir RPJPD disusun dengan menggunakan a) Pendekatan teknokratik, dengan menggunakan metode dan kerangka ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; b) Pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; c) Pendekatan politis dengan memastikan bahwa dokumen ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan pembangunan masyarakat, tetapi juga memperhitungkan dinamika politik lokal; dan d) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Kombinasi dari kedua pendekatan ini dapat menciptakan rencana pembangunan yang lebih holistik dan inklusif. Kebijakan dirancang dari atas ke bawah sekaligus memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang dari bawah ke atas. Pendekatan ini dapat membantu mencapai kesinambungan pembangunan yang ditetapkan secara strategis dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045 ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
35. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
36. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam RPJPD Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
40. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6).

1.3. Hubungan Antardokumen RPJPD dengan Dokumen Lainnya

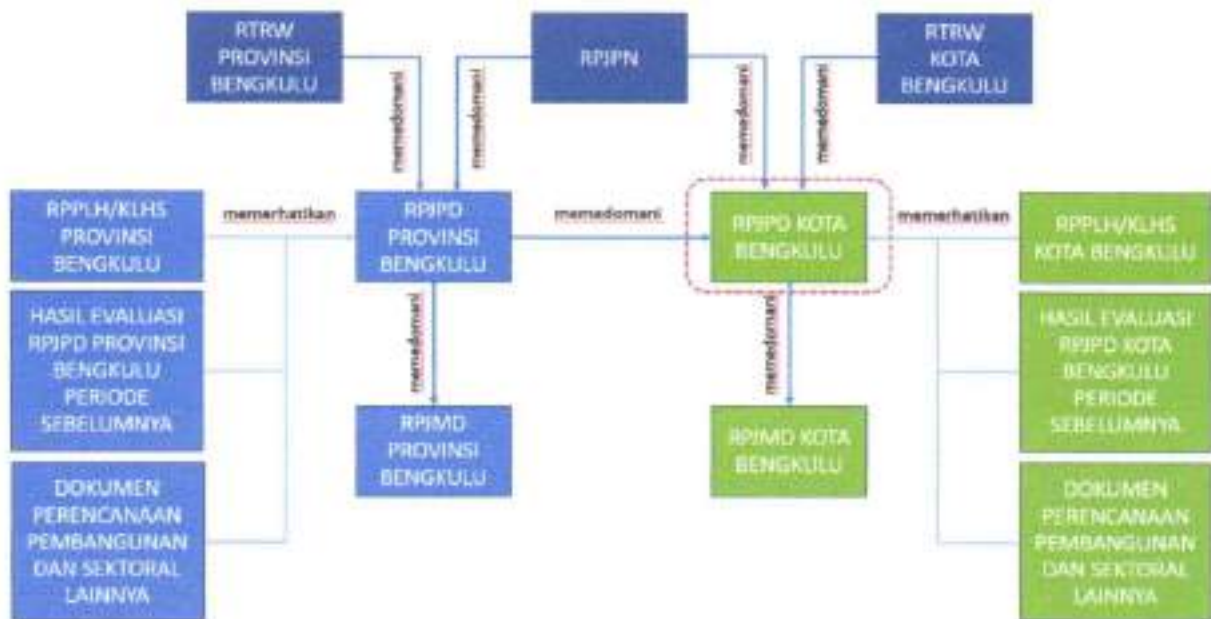
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu 2025-2045 merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional, sebagaimana ditegaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini sebagai upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan di daerah dengan pembangunan nasional.

RPJPD Kota Bengkulu memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dimana keterkaitan tersebut sebagai berikut:

1. RPJPN tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Dokumen-dokumen tersebut berisikan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang untuk seluruh Indonesia. Sementara itu, RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 merupakan dokumen yang berisikan perencanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu;

2. RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di Kota Bengkulu, dalam rangka mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Di samping itu RPJPD disusun untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi guna memudahkan tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan Kota Bengkulu dalam jangka panjang;
3. Penyusunan RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045 mengacu dan mempedomani dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu dan memperhatikan dokumen RPPLH/KLHS Kota Bengkulu, hasil evaluasi RPJPD Kota Bengkulu dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya;
4. Dalam tingkat daerah, perencanaan pembangunan menghasilkan beberapa dokumen, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk jangka menengah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk jangka pendek.

Gambaran secara lebih spesifik perihal hubungan antara RPJPD dengan dokumen lainnya dapat dijabarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. Hubungan RPJPD Kota Bengkulu dengan RPJPD Provinsi Bengkulu RPJPN Tahun 2025- 2045

Surat Edaran Bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor: 600.1/176/SJ, dan dimutakhirkan dengan Nomor 600.2.1/3674/SJ, menekankan pentingnya keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. RPJPD Kota Bengkulu diharapkan untuk melakukan penyesuaian yang teliti terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok, sehingga selaras dengan visi, misi, arah pembangunan dan kebijakan kewilayahan Provinsi Bengkulu dan nasional.

Proses penyusunan, Visi dan Misi Kota Bengkulu diartikulasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang bersifat khas di tingkat lokal. Meskipun begitu, penyusunan Visi dan Misi Kota Bengkulu tetap mengacu pada Visi dan Misi Indonesia Emas 2045 sebagai pedoman utama, dengan tujuan mengintegrasikan aspirasi kabupaten/kota ke dalam Visi Provinsi Bengkulu dan visi nasional yang lebih luas. Penyelarasan ini mengintegrasikan antara tujuan strategis Provinsi Bengkulu dan tujuan nasional, dengan kebutuhan khusus Kota Bengkulu. Penyusunan visi dan misi mempertimbangkan keduanya, sehingga terbentuklah kerangka kerja ideologis yang sejalan. Hal ini memungkinkan RPJPD Kota Bengkulu untuk berperan secara signifikan dalam mencapai tujuan Indonesia Emas Tahun 2045.

Dengan keselarasan kerangka ideologis ini, RPJPD Kota Bengkulu berperan sebagai alat yang efektif untuk memfasilitasi keterpaduan antara pembangunan nasional dan lokal, meningkatkan kolaborasi antar tingkat pemerintahan dan berperan penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas Tahun 2045.

1.3.2. Hubungan RPJPD Kota Bengkulu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2045 menjadi titik fokus utama bagi bakal calon kepala daerah dalam menyusun visi, misi, serta program kerjanya. Proses penyusunan visi dan misi ini, perlu mempertimbangkan perencanaan yang terinci untuk empat periode, yaitu Tahun 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045. RPJMD kemudian digunakan sebagai acuan untuk arah kebijakan dan target sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJPD, mengikuti langkah-langkah pembangunan dokumen yang telah disiapkan dengan cermat.

Selanjutnya, RPJMD berperan penting sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra ini menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan dan mencapai visi serta misi yang telah dirumuskan oleh kepala daerah. Penyusunan Renstra akan mengikuti kewenangan masing-masing perangkat daerah, memastikan adanya sinergi antara prioritas nasional dan kebutuhan lokal.

Dengan demikian, RPJPD Kota Bengkulu menjadi pedoman jangka panjang yang tidak hanya memberikan arahan untuk kepemimpinan saat ini, tetapi juga untuk calon kepala daerah di masa mendatang. Terlebih lagi, keterkaitan yang erat antara RPJPD dan RPJMD menciptakan koordinasi yang efektif antara perencanaan strategis tingkat provinsi dan rencana pembangunan daerah yang lebih terperinci, menjamin kelangsungan visi pembangunan yang terintegrasi secara menyeluruh.

1.3.3. Hubungan RPJPD Kota Bengkulu dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu sebagai pusat pengelolaan ruang dan lahan di tingkat nasional, provinsi, dan kota. Terdapat keterkaitan yang erat antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu dengan RTRWN, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Bengkulu, yang membentuk suatu kerangka kerja saling mendukung untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan penyusunan tata ruang.

Koordinasi Penggunaan Lahan:

RPJPD Kota Bengkulu memverifikasi bahwa kebijakan dan orientasi pembangunan yang diterapkan sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kota. Perencanaan dan penggunaan lahan di Kota Bengkulu, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip tata ruang yang tercantum dalam RTRWN, RTRW Provinsi dan RTRWK. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Pengembangan Wilayah:

RPJPD Kota Bengkulu menyelaraskan rencana strategi pengembangan wilayah dengan arah yang telah ditentukan dalam RTRWN, RTRW Provinsi, dan RTRWK. Prioritas dalam menentukan lokasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Kota Bengkulu sejalan dengan visi tata ruang nasional, provinsi, dan kota, guna memastikan kesinambungan antar tingkat pemerintahan.

Pembangunan Berkelanjutan:

Konsistensi pembangunan yang diperjuangkan dalam RPJPD Kota Bengkulu harus sesuai dengan ide pembangunan berkelanjutan yang telah ditanamkan dalam RTRW. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melibatkan berbagai aspek seperti pelestarian alam, perlindungan lingkungan, dan penggunaan lahan yang cerdas.

Penanganan Konflik Lahan:

Sinkronisasi efektif antara RPJPD dan RTRW berperan penting dalam mengidentifikasi dan menangani potensi konflik terkait pemanfaatan lahan di Kota Bengkulu. Dengan menerapkan pendekatan terintegrasi, penyelesaian konflik terkait tata ruang dapat diarahkan sesuai dengan visi dan tujuan nasional, provinsi dan kota.

Integrasi antara RPJPD Kota Bengkulu dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Bengkulu, dan Kota Bengkulu dapat menjamin bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kerangka tata ruang yang berlaku, mendukung keberlanjutan, dan mempertimbangkan aspek-aspek krusial dalam pengelolaan ruang dan lahan.

1.3.4. Hubungan RPJPD Kota Bengkulu dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bengkulu

Integrasi Pemikiran Lingkungan dalam Perencanaan:

RPJPD Kota Bengkulu diinginkan untuk mencerminkan tekad terhadap pelestarian lingkungan dan mempertimbangkan hasil KLHS Kota Bengkulu.

KLHS memberikan gambaran komprehensif tentang konsekuensi pembangunan terhadap lingkungan dan RPJPD memanfaatkan informasi ini dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkesinambungan dan ramah lingkungan.

Perlindungan Sumber Daya Alam:

RPJPD Kota Bengkulu harus memperhitungkan temuan KLHS untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat dengan melindungi sumber daya alam yang krusial. Pengaturan penggunaan lahan, air, dan hutan kota harus dilakukan secara bijaksana, sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diakui dalam KLHS.

Penilaian Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Mitigasi:

RPJPD Kota Bengkulu dapat menggabungkan evaluasi dampak lingkungan dan strategi mitigasi yang disusun dari KLHS. Tindakan pencegahan dan pengurangan dampak yang tercantum dalam KLHS akan menjadi pedoman bagi RPJPD untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan.

Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat:

Hasil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat digunakan sebagai landasan untuk merancang strategi komunikasi sosial dan mengajak partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Menjamin bahwa keinginan dan kepedulian masyarakat sekitar terhadap konsekuensi lingkungan dipertimbangkan dengan serius dalam perencanaan pembangunan yang terdokumentasikan dalam RPJPD.

Sinergi dengan Program Konservasi dan Pelestarian:

RPJPD Kota Bengkulu bisa bekerja sama dengan inisiatif konservasi dan pelestarian yang telah diidentifikasi dalam KLHS. Menjamin bahwa agenda pembangunan di wilayah tersebut mendukung inisiatif konservasi, menggabungkan koridor ekologis dan menjaga keragaman hayati lokal.

Kesesuaian dengan Standar Lingkungan:

RPJPD perlu memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan standar lingkungan yang telah ditetapkan dalam KLHS. Dengan mengintegrasikan RPJPD Kota Bengkulu dengan KLHS, diharapkan pembangunan dapat berjalan secara harmonis, menciptakan dampak positif pada ekosistem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan upaya memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

1.3.5. Hubungan RPJPD Kota Bengkulu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah Sekitar serta Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu untuk periode 2025-2045 telah disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan dari wilayah sekitarnya, termasuk Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menetapkan dasar kerja sama lintas daerah dalam menangani masalah strategis bersama, tetapi juga membuka jalan bagi pelaksanaan perjanjian kerja sama antardaerah.

RPJPD Kota Bengkulu untuk periode 2025-2045 juga selalu mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan spasial sektoral di tingkat nasional maupun provinsi. Beberapa dokumen tersebut mencakup:

Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs):

Mengkoordinasikan strategi pengembangan daerah sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, memastikan bahwa setiap tindakan pembangunan secara efektif mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK):

Berpusat pada usaha meminimalisir emisi gas rumah kaca dan memberikan dukungan terhadap rencana nasional dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG):

Menjamin ketahanan pangan dan gizi di tingkat lokal, sesuai dengan program nasional.

Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-MAPI):

Merancang strategi konkret untuk mengatasi dampak perubahan iklim, dengan mempertimbangkan ciri-ciri khas setiap wilayah.

Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK):

Mendorong inisiatif daerah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan berpartisipasi dalam usaha nasional, RPJPD Kota Bengkulu merancang kerangka perencanaan terpadu yang mendukung koordinasi antara kepentingan lokal dan nasional. Rencana ini juga memperkuat kapasitas daerah untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan yang kompleks dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045, selanjutnya disebut RPJPD Kota Bengkulu, adalah dokumen ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaksana pembangunan daerah (pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha) yang di dalamnya merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RTRW, dan KLHS RPJPD. Adapun tujuan dari penyusunan RPJPD Kota Bengkulu diantaranya meliputi:

Menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antarpemerintah pusat dan daerah;

1. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
2. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
3. mewujudkan penggunaan sumber data secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
4. menjadi pedoman dalam penyusunan RJPMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, RAPBD, dan APBD;
5. Instrumen bagi pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2025-2045 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Sistematika lampiran Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2025-2045 tersusun dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab Pendahuluan ini memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi hasil RPJPD tahun 2005-2025, dan tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik. Memuat sekurang-kurangnya:

1. Aspek Geografi dan Demografi
 - a) Geografi
Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.
 - b) Demografi
Menjelaskan karakteristik demografi daerah.
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a) Kesejahteraan Ekonomi
Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.
 - b) Kesejahteraan Sosial Budaya
Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.
3. Aspek Daya Saing
 - a) Daya Saing Ekonomi Daerah
Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.
 - b) Daya Saing SDM
Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.
 - c) Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah
Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.
 - d) Daya Saing Iklim Investasi
Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik, serta keamanan dan ketertiban daerah.
4. Aspek Pelayanan Umum
Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 termasuk Kinerja RTRW dan Rencana Sektor dalam Dokrenda.

6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

- a) Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi dan penduduk usia tua.
- b) Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan dan pendidikan (sesuai dengan kondisi daerah).

7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat memengaruhi perkembangan daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan sekurang-kurangnya:

1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi di daerah seperti "*gap expectation*" antara kinerja dengan kondisi ideal berdasarkan hasil analisis pada gambaran umum kondisi daerah di Bab 2 dan merupakan permasalahan yang dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang.

2. Isu Strategis

Bab ini juga menentukan isu strategis berdasarkan kondisi mendesak yang apabila tidak diantisipasi dapat menimbulkan kerugian besar atau bila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang baik dari permasalahan daerah, dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Visi Daerah Tahun 2025-2045

Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

2. Misi Daerah Tahun 2025-2045

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilakukan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan Tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Sekurang-kurangnya memuat:

1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Pentahapan per lima tahun mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029: Perkuatan Fondasi Transformasi
2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034: Akselerasi Transformasi
3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039: Ekspansi Global
4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045: Perwujudan Indonesia Emas

2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya visi RPJPD tahun 2025-2045 dari masing-masing daerah dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran pokok RPJPD Kota Tahun 2025-2045 memuat arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah dan indikator utama pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan otonomi daerah.

BAB VI PENUTUP

Memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan, dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pemerintah Kota Bengkulu telah melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan di seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaannya diutamakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Penataan ruang wilayah juga merupakan faktor utama yang perlu dipertimbangkan dengan melihat perkembangan Kota Bengkulu sebagai ibu kota Provinsi Bengkulu yang mempengaruhi kawasan sekitar. Seluruh kemampuan dan potensi tersebut dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan umum dan peningkatan daya saing daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

2.1.1.1. Wilayah Administrasi serta Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu yang memiliki luas wilayah 151,70 km². Kota Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yaitu: Selebar, Kampung Melayu, Gading Cempaka, Ratu Agung, Ratu Samban, Singaran Pati, Teluk Segara, Sungai Serut, dan Muara Bangkahulu. Masing-masing kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Kecamatan Selebar merupakan kecamatan terluas di Kota Bengkulu. Lebih dari 30% wilayah Kota Bengkulu berada di Kecamatan Selebar. Kecamatan Teluk Segara merupakan kecamatan terkecil dengan persentase wilayah tidak lebih dari 1,8 % terhadap total luas wilayah Kota Bengkulu. Jumlah kelurahan dari sembilan kecamatan di Kota Bengkulu sebanyak 67 Kelurahan seperti disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Bengkulu

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
Selebar	Pagar Dewa	46,36	30,56
Kampung Melayu	Padang Serai	23,14	15,25
Gading Cempaka	Jalan Gedang	14,42	9,51
Ratu Agung	Nusa Indah	11,02	7,26
Ratu Samban	Penurunan	2,84	1,87
Singaran Pati	Dusun Besar	14,44	9,52
Teluk Segara	Jitra	2,76	1,82
Sungai Serut	Surabaya	13,53	8,92
Muara Bangkahulu	Pematang Gubernur	23,18	15,28
Total		151,70	100,00

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

Tabel 2. 2 Pembagian Wilayah Kota Bengkulu berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan
1	Selebar	6	Betungan, Bumi Ayu, Pagar Dewa, Pekan Sabtu, Sukarami, Sumur Dewa
2	KampungMelayu	6	Kandang, Kandang Mas, Muara Dua, Padang Serai, Sumber Jaya, Teluk Sepang
3	Gading Cempaka	5	Cempaka Permai, Jalan Gedang, Lingkar Barat, Padang Harapan, Sido Mulyo
4	Ratu Agung	8	Kebun Beler, Kebun Kenanga, Kebun Tebeng, Lempuing, Nusa Indah, Sawah Lebar, Sawah Lebar Baru, Tanah Patah
5	Ratu Samban	9	Anggut Atas, Anggut Bawah, Anggut Dalam, Belakang Pondok, Kebun Dahri, Kebun Geran, Padang Jati, Pengantungan, Penurunan
6	Singaran Pati	6	Dusun Besar, Jembatan Kecil, Lingkar Timur, Padang Nangka, Panorama, Timur Indah
7	Teluk Segara	13	Bajak, Berkas, Jitra, Kampung Bali, Kebun Keling, Kebun Ros, Malabero, Pasar Baru, Pasar Melintang, Pintu Batu, Pondok Besi, Sumur Meleleh, Tengah Padang
8	Sungai Serut	7	Kampung Kelawi, Pasar Bengkulu, Semarang, Suka Merindu, Surabaya, Tanjung Agung, Tanjung Jaya
9	Muara Bangkahulu	7	Bentiring, Bentiring Permai, Beringin Raya, Kandang Limun, Pematang Gubernur, Rawa Makmur, Rawa Makmur Permai

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2023, BPS 2024

Kecamatan Teluk Segara memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu sejumlah 13 kelurahan (18,84%). Sementara itu, jumlah kelurahan paling sedikit terdapat di Kecamatan Gading Cempaka yaitu sejumlah 5 kelurahan (7,25%).

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Bengkulu terletak antara 30°45'- 30°59' Lintang Selatan dan antara 102°14'-102°22' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kota Bengkulu berbatasan langsung dengan kabupaten lain dan laut, sebagai berikut:

- Utara – Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Selatan - Kabupaten Seluma;
- Barat - Samudera Hindia;
- Timur - Kabupaten Bengkulu Tengah.

Secara klimatologis, Kota Bengkulu termasuk wilayah beriklim panas dan lembab. Sepanjang tahun 2023, suhu udara rata-rata mencapai 28,3 °C, dengan suhu terendah 19,8 °C di bulan September dan tertinggi 35,5 °C di bulan Mei, sedangkan kelembaban udara rata-rata relatif lebih tinggi yaitu berkisar antara 82,10 % (Mei) hingga 88 % (November). Curah hujan turun sepanjang tahun dan beragam jumlahnya menurut bulan. Rata-rata curah hujan selama tahun 2023 berkisar antara 10,10 mm (September) hingga 355,60 mm (April).



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kota Bengkulu

Sumber: Bappeda Kota Bengkulu, RTRW Kota Bengkulu 2021-2041

2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Bengkulu memiliki potensi dalam mengembangkan wilayahnya. Potensi pengembangan wilayah di Kota Bengkulu dapat dikategori berdasarkan pola ruang. Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang pada suatu wilayah. Pola ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 terdiri dari dua macam yaitu: kawasan lindung dan kawasan budidaya. Potensi pengembangan wilayah Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

➤ Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Bengkulu meliputi 6 (enam) kawasan yaitu: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya dan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penjabaran kawasan lindung di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air. Kota Bengkulu tidak memiliki kawasan hutan lindung maupun kawasan gambut. Kawasan resapan air berfungsi untuk meresapkan air hujan dan sumber air. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air, direncanakan di Kecamatan Selebar, Kecamatan Singaran Pati dan Kecamatan Sungai Serut seluas ±87,65Ha.
2. Kawasan perlindungan setempat meliputi, sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau.
3. Kawasan konservasi meliputi: Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kawasan Suaka Alam berupa Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah adalah KSA yang karena keadaannya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Kemudian Kawasan Pelestarian Alam berupa kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang – Pulau Baai, adalah KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
4. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam meliputi, kawasan rawan gempa bumi dan kawasan rawan tsunami.
5. Kawasan Cagar Budaya meliputi, kawasan cagar budaya dan kawasan kota pusaka
6. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur/ dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Adapun persyaratan RTH Kota adalah 30 % dengan 20 % berupa publik dan 10 % berupa RTH privat. Adapun RTH yang direncanakan di Kota Bengkulu berupa taman kota, koridor hijau jalan/ jalur hijau, pemakaman, taman lingkungan, sabuk hijau dan RTH sempadan jalur kereta api.

➤ Kawasan Peruntukan Budi Daya

Kawasan peruntukan budidaya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan peruntukan budidaya di Kota Bengkulu meliputi:

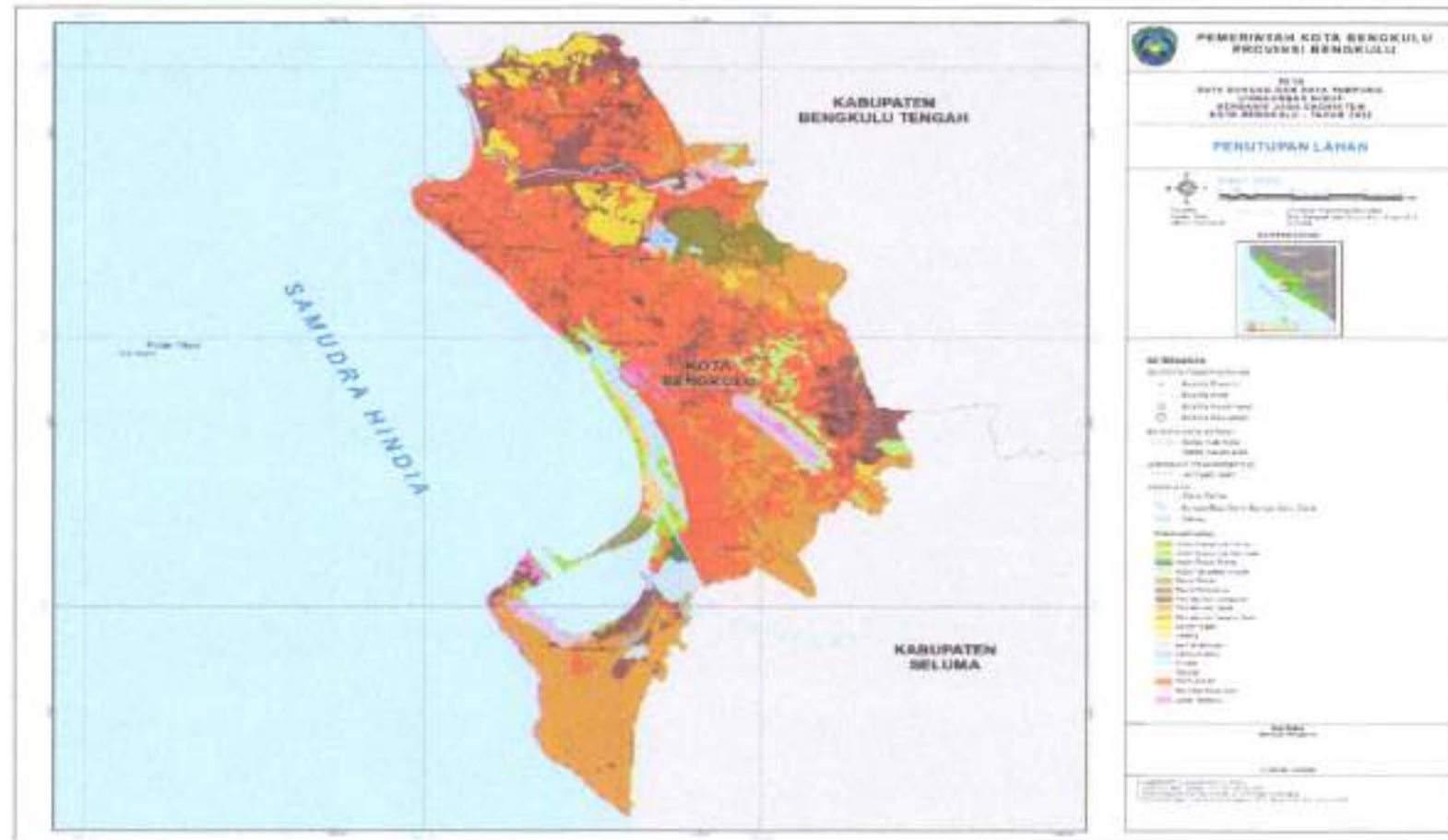
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perkantoran
- Kawasan Peribadatan
- Kawasan Pendidikan
- Kawasan Kesehatan
- Kawasan Olahraga
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Sumber Daya Air
- Kawasan Ruang Terbuka Non-Hijau
- Tempat Evakuasi Bencana
- Kawasan Sektor Informal
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

2.1.1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Indikatif status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Bengkulu terutama pada daya dukung penyediaan air dan daya dukung penyediaan pangan, adalah dari identifikasi jasa lingkungan melalui perhitungan kebutuhan dan ketersediaan pangan dan air yang didasari pada data empiris yang telah diukur maupun dikumpulkan oleh otoritas pemerintah berwenang.

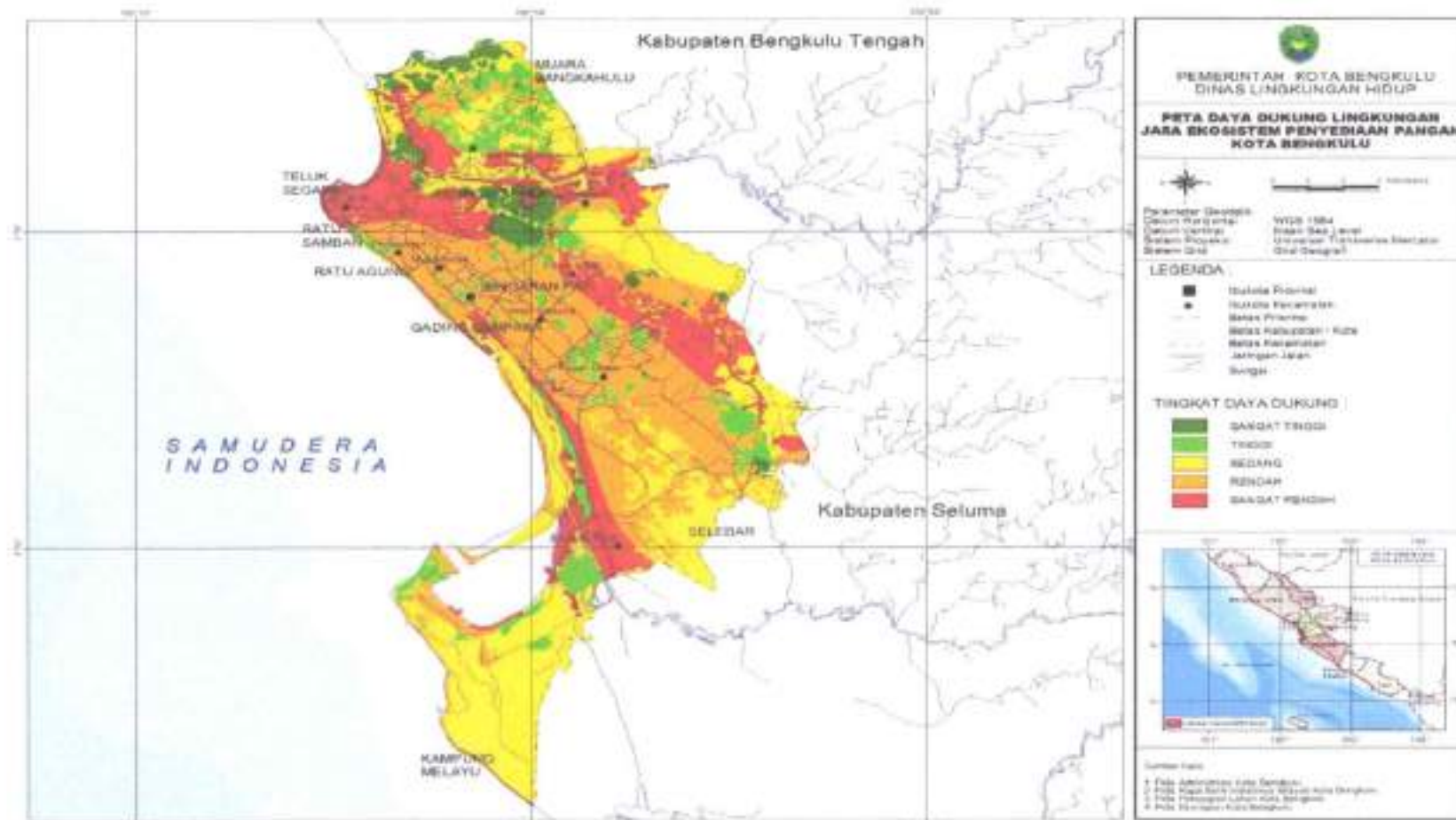
Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem, secara operasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan yaitu menyusun peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem sebanyak jenis jasa ekosistem yang dikaji (20 jasa ekosistem). Peta tersebut dapat menunjukkan luasan, distribusi, dan indeks daya dukung jasa lingkungan. Kajian ini menghasilkan nilai indeks serta sebaran luasan dari indeks daya dukung dan daya tampung berbasis jasa ekosistem di Kota Bengkulu.

Penyusunan Peta Daya Dukung Lingkungan berbasis jasa ekosistem memanfaatkan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang telah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu berdasarkan Indeks Jasa Ekosistem. Daya dukung dan daya tampung dibahas secara mendetail dalam dokumen KLHS RPJPD Kota Bengkulu adalah Jasa Penyediaan Pangan dan Jasa Penyediaan Air Bersih. Kedua jasa ekosistem tersebut merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem, jasa ekosistem penyediaan pangan, dan jasa ekosistem penyediaan pangan berbasis kecamatan di Kota Bengkulu disajikan secara visual pada Gambar 2.2., Gambar 2.3., dan Gambar 2.4.



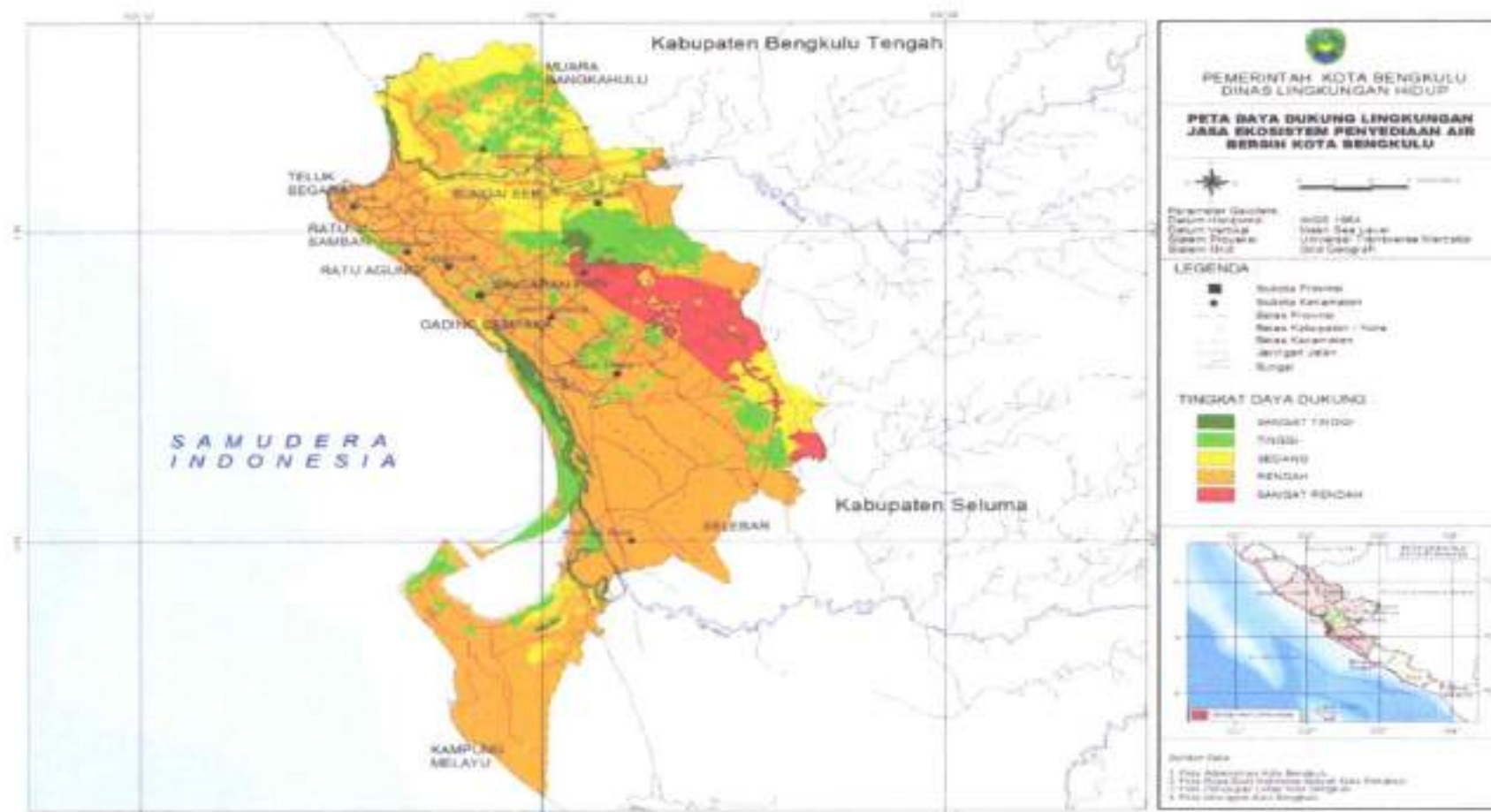
Gambar 2. 2 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kota Bengkulu

Sumber: KLHS Kota Bengkulu 2021-2041



Gambar 2. 3 Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kota Bengkulu

Sumber: KLHS Kota Bengkulu 2021-2041



Gambar 2. 4 Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Kota Bengkulu

Sumber: KLHS Kota Bengkulu 2021-2041

Dari Gambar 2.3 disimpulkan bahwa status daya dukung lingkungan hidup jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Bengkulu umumnya sudah tinggi, mengingat pemusatan distribusi penduduk yang ada di wilayah tersebut, yaitu Kecamatan Selebar, Kecamatan Muara Bangka Hulu dan Kecamatan Ratu Agung. Tingkat kepadatan penduduk tinggi ada di Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban dan Kecamatan Ratu Agung. Tingginya jasa ekosistem penyediaan pangan ini memberikan gambaran bahwa wilayah atau daerah tersebut memiliki suatu ekosistem dengan daya dukung serta kemampuan dalam menyediakan pangan yang tinggi.

Gambar 2.4 menunjukkan daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kota Bengkulu. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai, danau maupun berasal dari air tanah. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang lain seperti bentang lahan, vegetasi dan tutupan lahan. Kelas dengan jasa ekosistem tinggi dan sangat tinggi seperti di Kecamatan Gading Cempaka dan Kecamatan Kampung Melayu menunjukkan kemampuan wilayah ini menyediakan air bersih untuk penggunaan makhluk hidup, hal ini juga dapat diartikan bahwa area dengan kelas jasa ekosistem penyediaan air bersih tinggi mempunyai daya dukung tinggi untuk memenuhi kebutuhan air bersih manusia.

Berdasarkan hasil studi tersebut, maka dapat disimpulkan kondisi status daya dukung daya tampung Kota Bengkulu ini, memerlukan perhatian yang lebih untuk wilayah-wilayah yang telah dideklarasikan sebagai wilayah yang defisit air dan pangan.

2.1.1.5. Kualitas Lingkungan Hidup

Salah satu cara untuk mengukur kualitas lingkungan baik air, udara, dan lahan adalah dengan menggunakan indeks. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Pada tahun 2022, IKLH tercatat sebesar 58,04 dan menurun menjadi 57,04 pada tahun 2023. IKLH dibentuk oleh 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Tutupan Lahan.

Tabel 2. 3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bengkulu, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air	50,04	50,14	44,12	45,00	37,78
Indeks Kualitas Udara	87,63	87,73	88,70	88,10	90,65
Indeks Kualitas Tutupan Hutan	52,89	53,59	25,22	25,22	27,93
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,88	55,51	58,04	58,12	57,04

Sumber: DLH Kota Bengkulu 2024, Bengkulu Dalam Angka 2024

A. Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah dan Sampah

Lingkungan hidup merupakan urusan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi prioritas di Kota Bengkulu. Permasalahan utama yang masih menjadi kendala yaitu permasalahan persampahan kota. Ada indikasi penurunan penanganan sampah pada tahun 2022 jumlah sampah yang mampu ditangani Pemerintah Kota Bengkulu adalah sejumlah 453 m³/hari. Pada tahun 2023 jumlah sampah yang ditangani Pemerintah Kota Bengkulu adalah sejumlah 174 m³/hari. Ratusan ton sampah itu berasal dari sampah rumah tangga maupun pasar, yang terdiri atas sampah organik dan non-organik. Permasalahan sampah yang muncul karena kapasitas TPA Air Sebakul yang *overload* untuk menampung sampah dan kendaraan operasional banyak yang rusak.

Jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (*aerob*) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang. Dari Gambar 2.5. terlihat bahwa wilayah-wilayah dengan jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah terkategori **Sedang** sangat mendominasi Kota Bengkulu dan tersebar di semua kecamatan yang ada, walaupun di Teluk Segara hanya dijumpai luasan yang sempit. Untuk yang terkategori **Tinggi** dan **Sangat Tinggi** sebarannya yang cukup luas ditemukan di sekitar Air Hitam, Air Jenggalu, Danau Dendam Tak Sudah dan sekitarnya. Sementara itu wilayah-wilayah dengan jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah terkategori **Rendah** tersebar di Kecamatan Teluk Segara dan Sungai Serut. Untuk yang terkategori **Sangat Rendah** sebarannya terjadi di bagian timur dari Kecamatan Singaran Pati membentang ke arah timur dari Kecamatan Selebar.

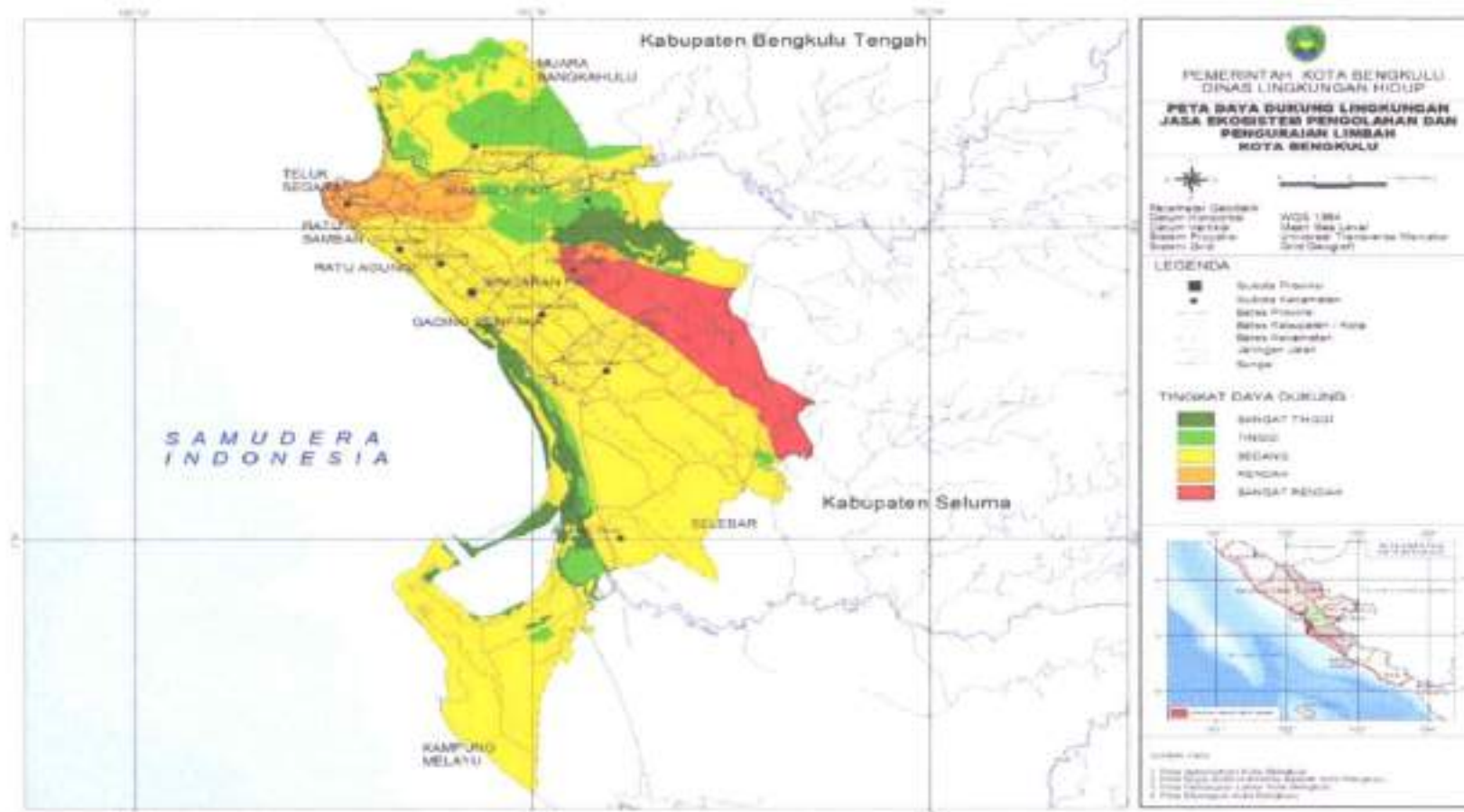
Tabel 2. 4 Jumlah Sampah yang ditangani DLH (M³/Hari) di Kota Bengkulu, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Sampah yang ditangani (m ³ /hari)	270	452	453	453	174
Persentase sampah yang tertangani	59,77	58,41	58,41	60,20	63,48
Persentase sampah yang diolah	-	33,13	77,35	48,57	25,33

Sumber: DLH Kota Bengkulu, 2024

Terjadinya penurunan jumlah sampah yang ditangani di Kota Bengkulu diakibatkan karena dua faktor, yaitu:

- 1) belum optimalnya upaya pengurangan dan penanganan sampah karena kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah, kurangnya SDM penanganan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- 2) belum optimalnya sistem pengelolaan sampah di lingkungan pemukiman, karena kurangnya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan kurangnya pendampingan pengelolaan sampah mandiri.



Gambar 2. 5 Peta Luas Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah di Kota Bengkulu

Sumber: KLHS Kota Bengkulu 2021-2041

B. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Udara

Dinamika kualitas udara suatu wilayah dipengaruhi oleh aktivitas yang ada. Kualitas udara Kota Bengkulu dipengaruhi oleh aktivitas kota yang merupakan pusat kota. Status Kota Bengkulu sebagai ibu kota Provinsi Bengkulu, menjadikannya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian menjadikan Kota Bengkulu memiliki peran penting di Provinsi Bengkulu.

Pertambahan jumlah penduduk berdampak pada keperluan mobilitas penduduk dan perubahan penggunaan lahan demi aktivitas penduduk terpenuhi. Mobilitas penduduk di Kota Bengkulu didominasi oleh kendaraan bermotor pribadi, yang mengeluarkan emisi karbon sehingga memengaruhi kualitas udara.

Faktor pemicu dari isu kualitas udara adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan semakin berkembangnya industri dan semakin meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Dengan demikian, akan meningkatkan pula penggunaan bahan bakar yang akan menjadi sumber pencemar bagi kualitas udara. Emisi knalpot kendaraan bermotor menjadi penyumbang polusi udara terbesar mencapai 70%, sedangkan 20% bersumber dari proses industri, dan 10% dari sampah domestik rumah tangga (JICA, 1996).

C. Permasalahan Kualitas Udara

Tekanan yang menyebabkan perubahan kualitas udara di Kota Bengkulu adalah adanya emisi langsung maupun tidak langsung ke udara. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas transportasi yang berkaitan dengan jumlah kendaraan bermotor. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kota Bengkulu yang dipengaruhi oleh daya tarik ekonomi, pendidikan dan wisata akan memengaruhi aktivitas transportasi. Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan, akan menyebabkan peningkatan pula terhadap emisi yang dikeluarkan ke udara. Penggunaan bahan bakar untuk aktivitas transportasi menyumbang emisi berupa partikulat, timbal, CO, HC, dan NO_x ke udara bebas. Semakin padat jumlah kendaraan, maka akan semakin besar emisi yang dihasilkan. Begitu pula dengan emisi yang dihasilkan dari kegiatan industri, akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas udara.

Bertambahnya aktivitas perkotaan yang didukung oleh bertambahnya penggunaan kendaraan berdampak pada mobilitas penduduk secara global. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut cukup dijadikan analisis terhadap perubahan tren mobilitas penduduk di Kota Bengkulu.

D. Kondisi Kualitas Udara dan Statusnya

Pemantauan kualitas udara ambien di Kota Bengkulu pada tahun 2022 dilakukan pada 4 (empat) lokasi. Adapun titik lokasi pengambilan sampling pemantauan kualitas udara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 5 Titik Lokasi Pengambilan Sampling untuk Pemantauan Kualitas Udara

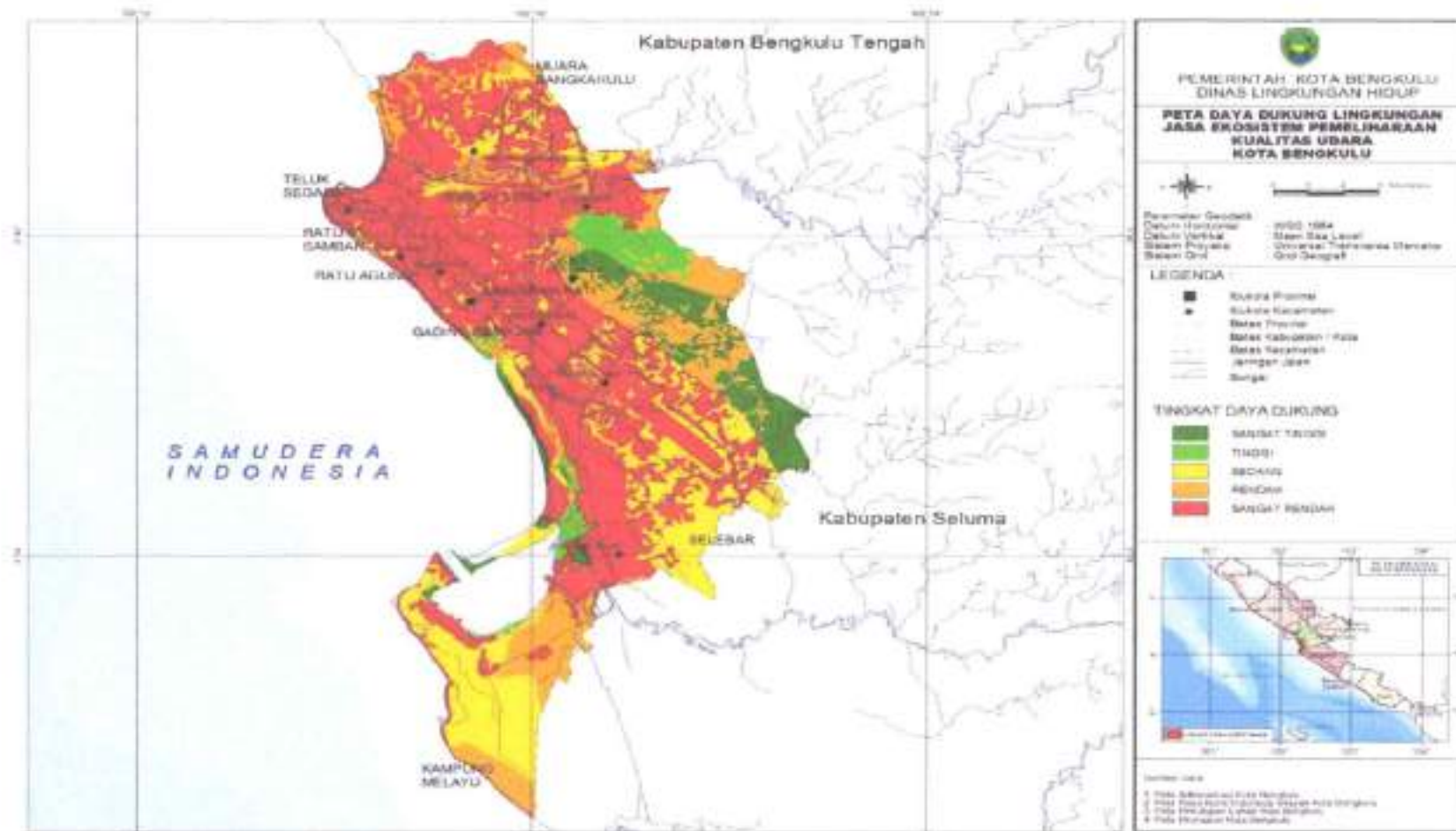
No	Jenis Sampling	Lokasi Sampling
1	Transportasi	Simpang Lima Ratu Samban
2	Industri	PT Pertamina Pulau Baai
3	Permukiman	Perumahan Lingkar Timur
4	Komersil (perkantoran, yang tidak terpengaruh langsung transportasi)	Komplek Perkantoran Kantor Gubernur

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, 2022.

Pemantauan udara di Kota Bengkulu dilakukan dua kali per tahun di lokasi-lokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, dan padat lalu lintas kendaraan bermotor, sedangkan parameter yang diukur adalah SO₂ dan NO₂. Pada tahun 2022 pengukuran kualitas udara hanya dilakukan sebanyak dua kali per tahun dan ini dianggap telah mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter.

Ekosistem memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat berupa pengaturan terhadap kualitas udara yang baik. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah nonvegetasi.

Dari Gambar 2.6, terlihat wilayah-wilayah yang jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara terkategori **Sangat Rendah** mendominasi Kota Bengkulu dan tersebar di semua kecamatan. Untuk yang kategori **Sedang** sebarannya ditemukan spot-spot di Kecamatan Muara Bangkahulu, sedangkan yang luasannya cukup besar ada di bagian Selatan dari Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu. Wilayah-wilayah yang jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara terkategori **Rendah** tersebar luas di Kecamatan Singaran Pati, bagian utara dari Kecamatan Selebar, dan di sekitar Simpang Pulau Baai. Untuk yang terkategori **Tinggi** dan **Sangat Tinggi** sebarannya terjadi mulai dari Kecamatan Singaran Pati bagian Utara, Danau Dendam Tak Sudah sampai di bagian Timur dari Kecamatan Selebar, serta beberapa spot di sepanjang pantai di Kecamatan Kampung Melayu.



Gambar 2. 6 Peta Luas Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara di Kota Bengkulu

Sumber: KLHS Kota Bengkulu 2021-2041

2.1.1.6. Kebencanaan

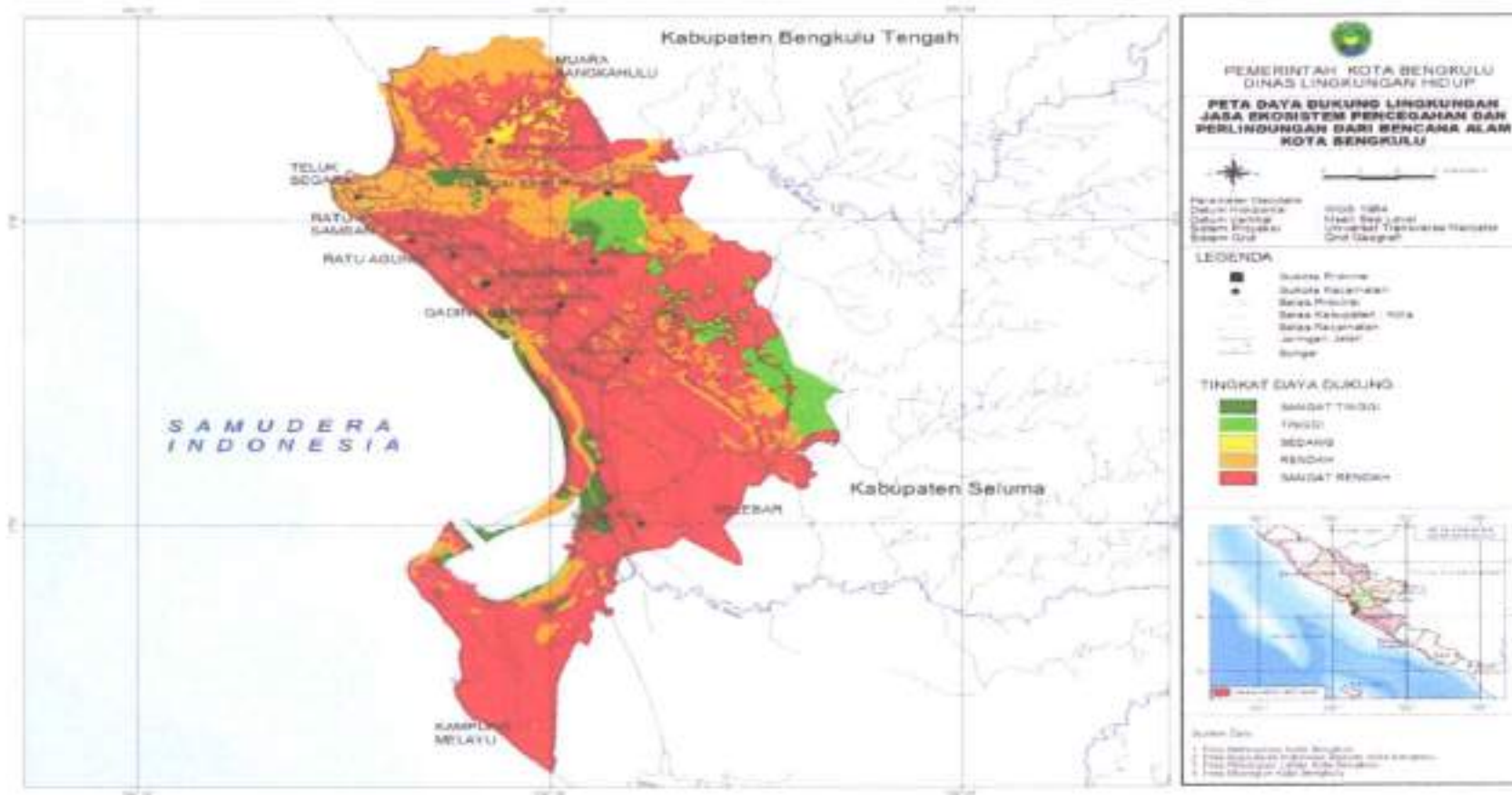
Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan pengurangan risiko bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks Risiko Bencana memberikan informasi tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas daerah. Kota Bengkulu merupakan wilayah yang relatif rawan bencana gempa bumi tektonik. Selanjutnya, emisi gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Kota Bengkulu akibat dari perubahan iklim adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.

Ekosistem, di dalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai, dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi dan longsor. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan dan melindungi sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Sehingga perlu diperhatikan bahwa Gambar 2.7. yang merupakan peta jasa ekosistem pengaturan dan perlindungan bencana, bukanlah merupakan peta yang menunjukkan adanya kerawanan terhadap kejadian bencana, namun peta yang menggambarkan kemampuan suatu ekosistem dalam mengatur pencegahan dan perlindungan terhadap suatu bencana alam.

Adanya interaksi antara ekosistem dalam setiap satuan administrasi juga memiliki peran dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana. Secara khusus perlu dilakukan pemberian perhatian terhadap upaya perbaikan hutan dan penghijauan di Kota Bengkulu untuk mengurangi kerawanan terhadap bencana banjir, kekeringan, dan longsor. Pada lokasi dengan vegetasi rendah, risiko longsor maupun erosi dapat terjadi, terlebih pada lokasi yang telah terbuka akibat kegiatan aktivitas pembukaan lahan.

Oleh karena itu hilangnya tutupan vegetasi sebagai salah satu agen yang memberikan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana akan menyebabkan lokasi tersebut kurang memiliki kemampuan dalam mengatur dan mengendalikan bencana alam seperti erosi atau longsor. Selain itu, pada tanah bersolum dangkal, struktur padat, dan penutupan lahan kurang rapat, hanya sebagian kecil air hujan yang terinfiltrasi dan sebagian besar menjadi aliran permukaan. Kandungan air permukaan dapat memicu terjadinya longsor kecepatannya tergantung dari tekstur dan struktur serta solum tanah. Tanah yang bertekstur kasar akan lebih rawan longsor. Hal ini karena tanah yang bertekstur kasar memiliki daya kohesi agregat tanah yang rendah. Air permukaan akan meresap ke dalam tanah atau batuan melalui pori-pori tanah atau retakan-retakan yang terdapat pada batuan dan sebagian akan mengalir di permukaan tanah.

Dari Gambar 2.7. terlihat bahwa wilayah-wilayah yang jasa ekosistem pengaturan pengendalian bencana terkategori Sangat Rendah sangat mendominasi Kota Bengkulu dan tersebar di semua kecamatan yang ada, kecuali Kecamatan Teluk Segara. Untuk yang terkategori Rendah sebarannya yang cukup luas ditemukan di Kecamatan Muara Bangkahulu, Teluk Segara, dan Sungai Serut, Singaran Pati. Sementara itu wilayah-wilayah yang jasa ekosistem pengaturan pengendalian bencana terkategori Tinggi dan Sangat Tinggi tersebar di Danau Dendam Tak Sudah dan sekitarnya dan bagian timur dari Kecamatan Selebar. Untuk yang terkategori Sedang sebarannya terjadi di bagian tengah dari Kecamatan Muara Bangkahulu. Secara umum dapat dikatakan bahwa Kota Bengkulu adalah wilayah yang terkategori kawasan Rendah dalam hal pengendalian bencana, dimana wilayah yang paling Rendah sampai Sangat Rendah dalam pengendalian bencana mencakup sekitar 90,63% dari luas wilayah kota.



Gambar 2. 7 Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Kota Bengkulu

Sumber: KLHS Kota Bengkulu 2021-2041

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah Berbasis Pertanian

Kota Bengkulu mempunyai keragaman produksi tanaman pertanian karakteristik perkotaan antara lain tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Total luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan jika dilihat tren hingga tahun 2023 bervariasi peningkatan dan penurunan. Sementara itu, luas lahan panen padi dan produktivitasnya mengalami penurunan dibandingkan tiga tahun terakhir dimana di tahun 2023 sebanyak 47,85 kuintal per hektar. Meskipun demikian, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2023 di Kota Bengkulu mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 87.

Tabel 2. 6 Luas Panen Produktivitas Tanaman Padi di Kota Bengkulu, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Panen (Ha)	957,28	1.216,6 6	1.218,0 0	1.231,4 3	1.003,9 0
Produktivitas (Ku/Ha)	51,78	51,34	50,34	48,62	47,85
Produksi (Ton)	4.956,6 6	6.245,8 4	6.132,0 0	5.986,7 1	4.803,9 1

Sumber: BPS Kota Bengkulu

Tabel 2. 7 Skor Pola Pangan Harapan di Kota Bengkulu (PPH), 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,10	84,2	85,50	82,50	87,00

Sumber: BPS Kota Bengkulu

Produksi komoditas pertanian khususnya sayuran yang cukup besar di Kota Bengkulu adalah kangkung sebesar 1.076 kuintal, bayam sebesar 776 kuintal, dan petsai sebesar 719 kuintal. Namun seiring peningkatan kebutuhan akan sayuran dan buah-buahan di Kota Bengkulu masih perlu disuplai dari kabupaten atau kota lain.

Tabel 2. 8 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim menurut Jenis Tanaman Kota Bengkulu (kg)

No	Jenis Tanaman	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bawang Daun	-	-	6	1	10
2	Bawang Merah	-	-	10	20	0
3	Bawang Putih	-	-	-	-	-
4	Bayam	920	900	1.235	1.102	776
5	Buncis	-	-	-	-	-
6	Cabai Rawit	85	150	185	50	124
7	Kacang Panjang	1.118	1.385	1.145	964	617
8	Kangkung	1.077	1.225	1.483	1.607	1.076
9	Kembang Kol	-	-	-	-	-
10	Kentang	-	-	-	-	-
11	Ketimun	563	1.030	987	852	428
12	Kubis	-	-	-	-	-
13	Labu Siam	-	-	-	-	-
14	Melon	14	872	637	949	298

No	Jenis Tanaman	2019	2020	2021	2022	2023
15	Paprika	-	-	-	-	-
16	Petsai	473	1.011	1.012	1.193	719
17	Semangka	20	136	89	65	0
18	Stroberi	-	-	-	-	-
19	Terung	966	1.315	1.334	634	409
20	Tomat	364	441	839	586	237
21	Wortel	-	-	-	-	-
22	Cabai Besar	-	-	607	312	284
23	Cabai Keriting	-	-	122	20	44
24	Jamur Tiram	-	-	1.192	549	387
25	Jamur Merang	-	-	-	-	-
26	Jamur Lainnya	-	-	10	-	-
Total		5.600	8.465	10.893	8.904	5.410

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

Berdasarkan komoditas biofarmasi, produksi komoditas terbesar tahun 2023 adalah jeruk nipis 4.080 kg, serai 3.365 kg, dan kunyit 2.451 kg. Hal ini dimungkinkan karena perubahan musim, perkembangan harga dan permintaan.

Tabel 2. 9 Produksi Tanaman Biofarma menurut Jenis Tanaman di Kota Bengkulu (kg)

No	Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023
1	Dlingo/Dringo	-	-	-	-
2	Jahe	5.705	5.855	2.447	1.191
3	Kapulaga	-	-	-	-
4	Keji Beling	575	-	-	-
5	Kencur	4.399	1.957	887	295
6	Kunyit	5.562	3.925	1.479	2.451
7	Laos/Lengkuas	6.055	3.809	1.396	1.304
8	Lempuyang	95	423	405	418
9	Lidah Buaya	261	212	61	13
10	Mahkota Dewa	1.242	360	480	900
11	Mengkudu/Pace	592	125	-	38
12	Sambiloto	37	80	900	750
13	Temuireng	-	-	500	400
14	Temukunci	15	-	500	600
15	Temulawak	1.702	714	708	610
16	Jeruk Nipis	-	395	1.525	4.080
17	Serai	-	1.656	2.933	3.365
Total		26.240	19.511	14.221	16.415

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah Berbasis Perkebunan

Tanaman perkebunan yang diusahakan di Kota Bengkulu adalah kelapa, kelapa sawit, kakao dan karet. Lokasinya tersebar di Kecamatan Selebar, Kampung Melayu, Sungai Serut dan Muara Bangkahulu. Kelapa sawit menjadi komoditas yang paling banyak ditanam, seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 10 Produksi Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman di Kota Bengkulu (Ton)

Kecamatan	K. Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao
Selebar	5.715.936	28.985	57.645	-	-
Kampung Melayu	30.510.360	45.751	12.294	-	3.500
Gading Cempaka	9.744	1.767	378	-	-
Ratu Agung	46.584	116	-	-	-
Ratu Samban	-	88	-	-	-
Singaran Pati	18.432	647	-	-	-
Teluk Segara	-	2.166	-	-	-
Sungai Serut	123.264	2.850	-	-	936
Muara Bangka Hulu	1.718.979	63.840	10.300	2.680	780
Total	38.143.299	146.210	80.617	2.680	5.216

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah Berbasis Perikanan dan Kelautan

Sebagai wilayah yang memiliki laut dan perairan, Kota Bengkulu juga menghasilkan produk dari subsektor perikanan. Hasil perikanan dapat dibedakan dari menjadi dua sumber, yaitu perikanan tangkap di laut dan perikanan budidaya. Hasil utama perikanan tangkap di laut adalah ikan tongkol yang mencapai 3.049 ton dan udang yang mencapai 6.361 ton. Sedangkan hasil perikanan budidaya yang utama adalah ikan lele dengan total sebanyak 12.251 ton tahun 2022. Jumlah armada di tahun 2023 mengalami peningkatan dari yang awalnya sebanyak 2.950 armada menjadi 5.034 armada. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah produksi ikan olahan di tahun 2023 menjadi 10.969,96 ton. Namun hasil budidaya perikanan di tahun 2023 mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 sebanyak 6 ribu ton kemudian turun menjadi 4 ribu ton di tahun 2023.

Tabel 2. 11 Jumlah Armada Kapal, Jumlah Hasil Tangkapan dan Budidaya Perikanan di Kota Bengkulu 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Armada Kapal Penangkapan Ikan dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap (Unit)	2.858,00	2.933,00	2.956,00	2.950,00	5.034,00

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Produksi Ikan Olahan di Kota Bengkulu (ton)	9.985,77	10.155,00	9.275,00	10.155,12	10.969,96
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Komoditi (ton)	4.298,00	4.727,60	5.720,29	6.292,36	4.602,67

Sumber: Dinas Perikanan Kota Bengkulu, 2024

2.1.1.10. Potensi Pengembangan Wilayah Berbasis Peternakan

Hewan ternak dibagi dalam tiga kelompok yaitu ternak besar dan ternak lainnya serta unggas. Hewan yang masuk kategori ternak besar adalah sapi potong, kerbau, kambing dan babi, sedangkan jenis sapi perah tidak ada di Kota Bengkulu. Sedangkan hewan yang masuk kategori ternak lainnya dan unggas adalah kambing, domba, puyuh, itik, ayam pedaging, ayam petelur, dan ayam kampung. Secara umum, populasi ternak besar terbanyak adalah sapi potong dan kambing. Sedangkan populasi unggas terbanyak adalah ayam pedaging sebesar 67.115 ekor.

Tabel 2. 12 Produksi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kota Bengkulu (Ekor)

Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba	Angsa	Puyuh	Kelinci
Selebar	805	47	552	55	148	4.300	70
Kampung Melayu	2.350	452	576	48	162	691	83
Gading Cempaka	242	-	190	-	95	3.500	55
Ratu Agung	247	-	276	33	102	2.500	-
Ratu Samban	10	-	130	-	67	-	20
Singaran Pati	68	-	645	-	24	-	77
Teluk Segara	25	-	285	-	212	-	75
Sungai Serut	447	-	277	-	47	600	37
Muara Bangka Hulu	524	150	290	-	145	1250	83
Total	4.718	649	3.221	136	1002	12.841	500

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

Tabel 2. 13 Produksi Unggas menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kota Bengkulu (Ekor)

Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Entok
Selebar	10.300	10.830	13.500	820	855
Kampung Melayu	30.555	8.250	24.200	670	585
Gading Cempaka	1.750	1.750	2.500	500	500
Ratu Agung	7.895	2.500	5.000	498	370
Ratu Samban	5.600	-	-	710	905
Singaran Pati	2.327	675	5.400	700	820
Teluk Segara	1.835	1.700	1425	385	353
Sungai Serut	5.200	6.500	4.490	1.100	600
Muara Bangka Hulu	7.600	8.275	10.600	1555	1100
Total	73.062	40.480	67.115	6.938	6.088

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

2.1.1.11. Potensi Pengembangan Wilayah Berbasis Pariwisata

Kota Bengkulu memiliki potensi pariwisata sangat beragam dan menakjubkan yang tersebar hampir di semua kecamatan baik wisata alam, maupun budaya dan sejarah. Beberapa objek wisata pantai terdapat di beberapa kecamatan dengan segala keunikan dan keindahan panoramanya yang sangat mempesona. Atraksi wisata budaya dan beberapa situs sejarah juga turut memperkaya daya tarik wisata di Kota Bengkulu. Kota Bengkulu memiliki 28 destinasi wisata seperti disajikan pada Tabel 2.14.

Tabel 2. 14 Destinasi Wisata Kota Bengkulu

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
1	Benteng Marlborough	Jl. Benteng, Kel. Kebun Keling, Kec. Teluk Segara	Sejarah
2	Museum Bengkulu	Jl. Pembangunan No. 8	Sejarah
3	Rumah Pengasingan Bung Karno	Kel. Anggut Atas, Kec. Ratu Samban	Sejarah
4	Tugu Thomas Parr and Hamilton Monuments	Jl. Benteng, Kel. Kebun Keling, Kec. Teluk Segara	Sejarah
5	Makam Sentot Alibasyah	Jl. Sentot Alibasyah RT. 1, RW. 1	Sejarah
6	Masjid Jamik Bung Karno	Jl. Letjend Suprpto	Sejarah
7	Kampung China	Kel. Malabero, Kec. Teluk Segara	Sejarah
8	Komplek Pemakaman Inggris	Jl. Veteran, Kel. Jitra, Kec. Teluk Segara	Sejarah
9	Rumah Ibu Fatmawati	Jl. Fatmawati, Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban	Sejarah

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
10	Situs Masjid Tak Beratap Nala	Kec. Ratu Samban	Sejarah
11	Makam Imam Senggolo	Jl. Kinibalu, Kel. Padang Jati	Sejarah
12	Makam Syech Burhanuddin (Penyebar Agama Islam Pertama di Kota Bengkulu)/Makam Karabela	Kel. Kebun Tebeng, Kec. Ratu Agung	Sejarah
13	Bunker Kampung Klawi	Kec. Sungai Serut	Sejarah
14	Bunker Sukamerindu	Kec. Sungai Serut	Sejarah
15	Pantai Panjang	Jl. Pariwisata Pantai Panjang	Wisata Bahari
16	Pantai Jakat	Kel. Malabero Kec. Teluk Segara	Wisata Bahari
17	Pantai Tapak Paderi	Jl. Pantai Tapak Paderi	Wisata Bahari
18	Pantai Pasir Putih	Jl. Pariwisata 19 Km dari Pusat Kota	Wisata Bahari
19	Pulau Baii	Jl. Pelabuhan Pulau Baii	Wisata Bahari
20	Pulau Tikus	45 menit dari Perairan Tapak Paderi	Wisata Bahari
21	Danau Dendam Tak Sudah	Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati	Alam
22	Sungai Muara Jenggalu	Kec. Gading Cempaka dan Kec. Kampung Melayu	Alam
23	Kebun Binatang Taman Remaja	Kel. Lingkar Timur, Kec. Singaran Pati	Alam
24	Outbound JAC	Jl. Jenggalu, 15 menit dari Pusat Kota	Buatan
25	Pemancingan Lestari	Kel. Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka	Buatan
26	Tambak Dinas Perikanan		Buatan
27	Pemancingan Alam Beringin	Kel. Sukarami, Kec. Selebar	Buatan
28	Upacara Adat Tabot		Budaya

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan di Kota Bengkulu terus ditingkatkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Ada hotel berbintang sebanyak 13 hotel dan hotel melati sebanyak 74 hotel, serta transportasi (darat, laut dan udara), restoran, toko cendera mata dan pelayanan jasa lainnya.

Tabel 2. 15 Daftar Hotel Berbintang di Kota Bengkulu

No	Nama Hotel	Kelas
1	Mercure Hotel	Bintang 4
2	Grage Hotel Bengkulu	Bintang 3
3	Santika Hotel	Bintang 3
4	Sinar Sport Hotel	Bintang 3
5	Jodipati Hotel	Bintang 3
6	Splash Hotel	Bintang 3
7	Amaris Hotel	Bintang 2
8	Cordela Inn	Bintang 2
9	Nala Sea Side Hotel	Bintang 2
10	Pasir Putih Resort	Bintang 2
11	Raffles City Hotel	Bintang 2
12	The Madeline Hotel	Bintang 1

Sumber: Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data pada tahun 2023 jumlah data wisatawan yang berjumlah 377.398 baik pengunjung mancanegara maupun pengunjung nusantara. Tujuan kunjungan sebagian besar untuk berlibur dan kunjungan sosial budaya bagi warga negara asing.

Tabel 2. 16 Jumlah Wisatawan Kota Bengkulu 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Jumlah Wisatawan	222.772	223.671	202.976	377.398

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Peningkatan pengembangan destinasi wisata berkorelasi positif dengan kenyamanan wisatawan yang diwujudkan melalui peningkatan rata-rata lama menginap wisatawan di Kota Bengkulu. Rata-rata lama menginap pada Hotel Bintang mengalami penurunan dari tahun 2019-2023 antara 1 sampai 2 malam. Rata-rata lama menginap wisatawan dipengaruhi oleh banyaknya akomodasi hotel dan jumlah destinasi wisata. Sebaliknya, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang tahun 2019-2023 mengalami peningkatan meskipun belum signifikan yaitu rata-rata TPK berkisar 45 kamar selama setahun.

Tabel 2. 17 Rata-rata Lama Menginap pada Hotel Berbintang (Malam) di Kota Bengkulu

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Lama Menginap Tamu Pada Hotel Berbintang (Malam)	1,84	1,61	1,38	1,33	1,28
Rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang	62,32	37,69	38,66	40,10	44,88

Sumber: BPS Kota Bengkulu

2.1.1.12. Wilayah Rawan Bencana

Kota Bengkulu termasuk salah satu kota/kabupaten di Provinsi Bengkulu yang rawan terhadap bencana. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022, Kota Bengkulu masuk ke dalam kelas risiko sedang. Namun beberapa jenis bencana di Kota Bengkulu masuk ke dalam kelas risiko tinggi di antaranya banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, serta cuaca ekstrim.

Tabel 2. 18 Indeks Risiko Bencana Kota Bengkulu 2022

Tipe Bencana	Indeks Risiko	Kelas Risiko
Banjir	31,46	Tinggi
Gempa	20,23	Tinggi
Tsunami	22,47	Tinggi
Kebakaran Hutan	20,23	Tinggi
Tanah Longsor	10,49	Sedang
Gelombang Ekstrem dan Abrasi	20,97	Tinggi
Kekeringan	20,97	Tinggi
Cuaca Ekstrem	12,73	Tinggi
Bencana	143,88	Sedang

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022

Tahun 2023, IRBI Kota Bengkulu tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Kapasitas Daerah dalam kesiapsiagaan bencana mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir.

Tabel 2. 19 Indikator Kebencanaan Kota Bengkulu 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	137,68	137,68	147,5	143,88	143,88
Indeks Kapasitas Daerah dalam Kesiapsiagaan Bencana	0,5	0,53	0,2	0,34	0,42
Rasio sarana prasarana kebencanaan	93,03	91,28	86,69	88,2	94,42
Jumlah dokumen penanggulangan bencana	0	2	10	3	4
Persentase sistem peringatan dini	11,11	133,33	155,55	22,22	22,22
Persentase relawan	0,047	0,049	0,065	0,065	0,079
Persentase aparatur penanggulangan bencana yang bersertifikat	5,55	5,71	20	20	17,24

Sumber: BNPB Kota Bengkulu

2.1.1.13. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga ketersediaan pangan harus berkualitas dan merata untuk memenuhi kualitas hidup masyarakat. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan salah satu alat untuk mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan

merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bengkulu selama 5 tahun terakhir masuk ke dalam kategori tahan pangan (>61,13-70,64) dan di tahun 2023 angkanya naik menjadi 75,68 dan masuk kategori sangat tahan pangan (>70,64).

Tabel 2. 20 Indeks Ketahanan Pangan di Kota Bengkulu, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Pangan	66,48	67,24	67,82	65,29	75,68

Sumber: Laporan Indeks Ketahanan Pangan

2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk di Kota Bengkulu sebanyak 391.120 jiwa di tahun 2023. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Selebar sebanyak 89.480 jiwa, diikuti Kecamatan Muara Bangkahulu sebanyak 55.020 jiwa dan Kecamatan Ratu Agung sebanyak 49.950 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Ratu Samban sebanyak 21.190 jiwa.

Tabel 2. 21 Jumlah Penduduk Kota Bengkulu Per Kecamatan 2019-2023

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
Selebar	72.500	79.498	82.840	85.970	89.480
Kampung Melayu	41.100	43.986	45.380	46.520	47.890
Gading Cempaka	40.000	38.848	38.720	38.870	38.920
Ratu Agung	53.600	50.562	50.220	50.150	49.950
Ratu Samban	23.700	21.344	21.270	21.230	21.190
Singaran Pati	43.100	41.304	41.020	41.040	40.940
Teluk Segara	23.700	22.041	21.970	22.000	22.000
Sungai Serut	25.200	25.255	25.310	25.550	25.720
Muara Bangka Hulu	46.700	50.663	51.870	53.500	55.020
Total	369.600	373.501	378.600	384.830	391.120

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024



Gambar 2. 8 Tren Penduduk Kota Bengkulu 2018-2023

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

Jumlah Penduduk Kota Bengkulu dari tahun ke tahun menunjukkan tren kenaikan. Laju pertumbuhan Kota Bengkulu dari tahun 2020-2023 adalah sebesar 1,63%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi dari tahun 2020-2023 terdapat di Kecamatan Selebar sebesar 4,11%, diikuti dan Kecamatan Kampung Melayu sebesar 2,96%, dan Kecamatan Muara Bangkahulu sebesar 2,88%. Laju pertumbuhan terendah terjadi di Kecamatan Ratu Agung sebesar -0,38%. Laju pertumbuhan ini sejalan dengan luas area dan kepadatan penduduk per masing-masing kecamatan. Kecamatan Selebar, Muara Bangkahulu, dan Kampung Melayu memiliki luas wilayah terbesar dan kepadatan penduduknya relatif lebih kecil dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kota Bengkulu.

Tabel 2. 22 Luas Area dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan 2023

Kecamatan	2023	Luas Area	Kepadatan penduduk per km ²
Selebar	89.480	46,36	1.930
Kampung Melayu	47.890	23,14	2.070
Gading Cempaka	38.920	14,42	2.699
Ratu Agung	49.950	11,02	4.533
Ratu Samban	21.190	2,84	7.461
Singaran Pati	40.940	14,44	2.835
Teluk Segara	22.000	2,76	7.971
Sungai Serut	25.720	13,53	1.901
Muara Bangka Hulu	55.020	23,18	2.374
Total	391.120	151,7	2.578

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

Tabel 2. 23 Jumlah Kepemilikan KIA dan Akta Lahir Kota Bengkulu 2023

Uraian	Tahun 2023			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
Jumlah Kepemilikan KIA				
Penduduk Usia 0 s.d. 17	59.349	54.955	114.304	
Belum memiliki KIA	30.156	28.499	58.655	51,31
Sudah memiliki KIA	29.193	26.456	55.649	48,69
Jumlah Kepemilikan Akta Lahir Usia 0 sd 17 Tahun				
Penduduk Usia 0 s/d 17	62.206	57.757	119.963	
Belum memiliki akta lahir	64	73	137	0,11
Sudah memiliki akta lahir	62.142	57.684	119.826	99,89

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Bengkulu

Penduduk Kota Bengkulu usia 0 s.d. 17 tahun masih ada yang belum memiliki Kartu Indonesia Anak ataupun Akta Kelahiran. Pada tahun 2023, jumlah penduduk usia 0 s.d. 17 yang memiliki KIA adalah sebanyak 48,69% dan yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak 99,89%.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan mencapai tujuan pembangunan salah satunya ditunjukkan oleh indikator aspek kesejahteraan masyarakat. Aspek ini sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat dapat dijabarkan ke dalam fokus kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Laju Inflasi

Perkembangan harga di Kota Bengkulu sepanjang tahun 2023 relatif terkendali. Secara umum inflasi di Kota Bengkulu tahun 2023 adalah sebesar 3,09%. Hal ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dimana tahun 2022 sebesar 5,92%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 6,22% akibat naiknya berbagai bahan makanan dan rokok, seperti minyak goreng, beras, kue kering, telur ayam ras, dan rokok kretek filter, diikuti oleh kelompok transportasi sebesar 2,9%. Sementara itu inflasi terendah terjadi pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,58%.

Tabel 2. 24 Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Bengkulu, 2023

No	Kelompok Pengeluaran	Inflasi (%)
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	6,22
2	Pakaian dan Alas Kaki	2,47
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,99
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,11
5	Kesehatan	2,6
6	Transportasi	2,9
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,58
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	2,27
9	Pendidikan	1,19
10	Restoran	2,02
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,66
12	Umum	3,09

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Semakin rendah indeks gini maka semakin baik. Indeks gini Kota Bengkulu selama lima tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2023 tidak mengalami banyak perubahan, namun di tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,38.

Tabel 2. 25 Indeks Gini di Kota Bengkulu 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Gini	0,37	0,38	0,38	0,37	0,38

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2024

Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kota Bengkulu sangat terdampak pandemi Covid-19. Ekonomi Kota Bengkulu tertekan sangat dalam hingga mencapai minus 0,25% pada tahun 2020. Namun sejak tahun 2021, ekonomi Kota Bengkulu mampu *rebound* dan membaik di angka 3,47%. Dari segi pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Bengkulu sudah baik. Hal ini tercermin pada angka pertumbuhan ekonomi tahun 2022 di angka 5,69% (Kota Bengkulu Dalam Angka 2023) di atas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,31% dan tahun 2023 di angka 5,53% (Kota Bengkulu Dalam Angka 2024) di atas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,05%.



Gambar 2. 9 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Kemiskinan dan Pengangguran

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan dapat dikatakan berhasil ketika indikator yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat meningkat salah satunya daya beli masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut maka sudah selayaknya pemerintah daerah memberikan porsi perhatian lebih terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran. Persentase penduduk miskin di Kota Bengkulu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin sebesar 14,71% dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan sudah adanya perbaikan dan kinerja dari pemerintah kota. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir, sedangkan Tingkat Pengangguran mengalami penurunan pada 4 tahun terakhir dimana berada di kisaran 5%.

Tabel 2. 26 Data Penduduk Miskin di Kota Bengkulu 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	660.442	702.578	740.612	785.905	810.507
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	69,26	69,12	66,94	59,43	56,10
Persentase Penduduk Miskin	18,09	17,65	17,89	15,73	14,71
Indeks Kedalaman Kemiskinan	3,89	3,51	3,31	3,21	2,84
Indeks Keparahan Kemiskinan	1,22	1,02	0,87	0,90	0,79

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

Tabel 2. 27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kota Bengkulu 2019-2023

Kegiatan Utama	2019	2020	2021	2022	2023
1. Angkatan Kerja	187.116	186.950	187.633	192.497	193.783
1. Bekerja	179.098	174.194	175.725	180.658	184.016
2. Pengangguran Terbuka	8.018	12.756	11.908	11.839	9.767
2. Bukan Angkatan Kerja	99.895	96.365	99.195	97.905	97.143
1. Sekolah	43.405	39.766	36.136	34.671	34.745
2. Mengurus Rumah Tangga	45.074	46.228	47.854	52.470	50.634
3. Lainnya	11.416	10.371	15.205	10.764	11.764
Total	287.011	283.315	286.828	290.402	290.926
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,19	65,99	65,42	66,29	66,61
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,29	6,82	6,35	6,15	5,04

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2020-2024

Tabel 2. 28 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Bengkulu, 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	34.160	1.810	35.970	94,97
1	23.044	1.550	24.594	93,70
2	71.254	3.088	74.342	95,85
3	55.558	3.319	58.877	94,36
Jumlah/Total	184.016	9.767	193.783	94,96

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

Tabel 2. 29 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Bengkulu, 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
(1)	(2)	(3)	(5)
0	18.693	54.663	65,80
1	25.118	49.712	49,47
2	41.276	115.618	64,30
3	12.056	70.933	83,00
Jumlah/Total	97.143	290.926	66,61

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

Catatan/Note:

- 1 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)/≤ *Primary School*
 1. Sekolah Menengah Pertama/*Junior High School*
 2. Sekolah Menengah Atas/*Senior High School*
 3. Perguruan Tinggi/*Collage*
- 2 1. Mencari pekerjaan/*Looking for work*
 2. Mempersiapkan usaha/*Establishing a new business/firm*
 3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/*Feeling hopeless in looking for work (discouraged job seekers)*
 4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja/*Having job already but not starting to work yet*

Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bengkulu selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Di tahun 2022 IPM Kota Bengkulu sebesar 82,93. Angka ini lebih besar dari angka IPM Provinsi Bengkulu sebesar 73,68 dan angka IPM Nasional sebesar 73,77. Di tahun 2023 IPM Kota Bengkulu sebesar 83,38. Angka ini lebih besar dari angka IPM Provinsi Bengkulu sebesar 74,30 dan angka IPM Nasional sebesar 74,39. Hal ini sejalan dengan indikator yang mendukung Indeks Pembangunan Daerah seperti lama sekolah baik rata-rata Lama Sekolah maupun Harapan Lama Sekolah, PDRB per Kapita, dan Angka Harapan Hidup. Semua indikator ini menunjukkan tren kenaikan yang artinya mengalami perbaikan selama 3 tahun terakhir. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Tabel 2. 30 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bengkulu, 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Lama Sekolah	11,79	11,80	11,82	11,83
Harapan Lama Sekolah	16,02	16,03	16,04	16,06
Pengeluaran Perkapita disesuaikan (Ribuan Rupiah)	13.938	14.108	14.503	14.924
Angka Harapan Hidup	73,88	73,94	74,18	74,43
Indeks Pembangunan Manusia	82,31	82,49	82,93	83,38

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024, BPS Kota Bengkulu 2024

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan gambaran karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya. Indikator-indikator yang dapat menjadi gambaran dari kesejahteraan sosial diantaranya adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Indeks Pembangunan Gender.

2.2.2.1. Sosial Budaya Agama

Kesenian, kebudayaan, dan olahraga merupakan aset daerah yang harus dilestarikan. Pemerintah Kota Bengkulu melaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya. Pengelolaan kebudayaan daerah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sejarah, perlindungan dan pemanfaatan peninggalan sejarah serta nilai tradisional, dan terjaganya fisik dan kandungan naskah kuno serta bahan pustaka. Data terakhir menunjukkan bahwa Kota Bengkulu memiliki 55 grup kesenian per 10.000 penduduk, 95 budaya yang dilestarikan, 8 benda situs, dan 16 cagar budaya yang dilestarikan.

Minat baca masyarakat adalah cermin budaya masyarakat terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media baca. Minat baca masyarakat di Kota Bengkulu secara umum masih mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir, namun terjadi peningkatan di tahun 2023. Hal ini bisa dilihat dari masih kurangnya antusias masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan, taman bacaan, sudut baca, rumah baca dan sejenisnya. Perkembangan kinerja urusan perpustakaan di Kota Bengkulu tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 31 Perkembangan Perpustakaan di Kota Bengkulu Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	950	1.043	500	600	1.730
Jumlah Pengelola Perpustakaan	9	10	10	11	6
Jumlah Sarana dan Prasarana Perpustakaan	10.120	11.177	11.177	11.532	12.395
Layanan Perpustakaan Keliling	0	0	4	5	5

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu 2024

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip merupakan dokumen penting karena berfungsi sebagai penunjang aktivitas informasi, dan wahana komunikasi. Perkembangan kinerja urusan Kearsipan di Kota Bengkulu tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 32 Perkembangan Perpustakaan di Kota Bengkulu Tahun 2019-2022

Indikator	Satuan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
Persentase Arsip Statis dan Dinamis yang Terkumpul	Arsip Dinamis (%)	40	40	60	90
	Arsip Statis (%)	30	30	30	40

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu

Berdasarkan data yang tercatat, secara mayoritas penduduk di Kota Bengkulu memeluk agama Islam dengan data secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. 33 Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Bengkulu 2022

Agama					Jumlah
Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	
94,61%	3,23%	1,49%	0,29%	0,37%	100,00%

Sumber: Kanwil Kemenag Bengkulu

2.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan

Kebijakan pembangunan yang responsif terhadap isu-isu perempuan perlu dikembangkan di daerah. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu indikator berdayanya masyarakat suatu daerah. Permasalahan pemberdayaan perempuan dapat dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bengkulu Tahun 2023. IPG Kota Bengkulu berada di angka 96,07 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang berada di angka 95,77. Namun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) cenderung stagnan selama 3 tahun terakhir dengan angka 77,70.

Tabel 2. 34 IPG dan IDG di Kota Bengkulu, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,97	95,67	95,77	96,07	96,07
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80,35	77,68	77,67	77,54	77,70

Sumber: Dinas DP3AP2KB Kota Bengkulu 2024

Di lain sisi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di saat jumlah lembaga yang bergerak di perlindungan anak stagnan di angka 2. Persentase KB Aktif di Kota Bengkulu menurun di tahun 2023 menjadi 66,16%.

Tabel 2. 35 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	26	38	49	54	57
Jumlah Lembaga yang Bergerak di Perlindungan Anak dan Perempuan	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas DP3AP2KB Kota Bengkulu 2024

Tabel 2. 36 Persentase KB Aktif di Kota Bengkulu, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase KB Aktif	70,54	74,16	73,20	73,73	66,16

Sumber: Dinas DP3AP2KB Kota Bengkulu 2024

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah dikelompokkan ke dalam empat bagian yaitu daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia (SDM), daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah, dan daya saing iklim investasi.

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Bengkulu akan memberikan dampak pada kemampuan ekonomi daerah Kota Bengkulu. Beberapa faktor yang memengaruhi kemampuan ekonomi daerah di antaranya PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), maupun berdasarkan jenis pengeluaran, rata-rata pengeluaran atau konsumsi rumah tangga per kapita, persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat disajikan berdasarkan atas dasar harga berlaku dan berdasarkan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB Kota Bengkulu atas dasar harga berlaku memperlihatkan besaran dari nilai tambah bruto masing-masing sektor sesuai dengan keadaan pada tahun tertentu.

Pada tahun 2023, total PDRB Kota Bengkulu Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 30.811 miliar rupiah, meningkat sebanyak 9,69% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan PDRB Kota Bengkulu tahun 2023 Atas Dasar Harga Konstan mencapai 17.658,93 miliar rupiah, meningkat sebesar 5,53% dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan terjadinya pemulihan ekonomi Kota Bengkulu pada tahun 2023.

Hingga tahun 2023, peranan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam perekonomian Kota Bengkulu masih sangat dominan. Fenomena ini tampak dari peranan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Bengkulu Atas Dasar Harga Berlaku yang relatif sangat besar dibandingkan sektor lainnya. Hal ini yang membuat Kota Bengkulu cukup berbeda dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Bengkulu. Di saat kabupaten lain masih bergantung kepada sektor pertanian, Kota Bengkulu telah bergeser sektor dominannya ke sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Nilai nominal PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan menyumbang kontribusi terbesar yaitu sebesar 21,41% Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023. Disusul dengan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 6.285 miliar rupiah, dengan besar sumbangan terhadap PDRB Kota Bengkulu sebesar 20,40%. Sementara itu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan sektor unggulan di wilayah kabupaten lain hanya menyumbang sebesar 7,52% sebagai penyumbang terbesar ke-5 pada PDRB Kota Bengkulu.

Tabel 2. 37 PDRB Kota Bengkulu Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2021	2022	2023
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.928	2.151	2.316
B.	Pertambangan dan Penggalian	29	30	31,45
C.	Industri Pengolahan	816	862	888,4 4
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	31	34	35,26
E.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	61	65	69,45
F.	Konstruksi	1.205	1.279	1.390
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.185	5.706	6.285
H.	Transportasi dan Pergudangan	4.198	5.676	6.596
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	541	593	656,8
J.	Informasi dan Komunikasi	1.905	2.089	2.325
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.283	1.324	1.270
L.	Real Estat	1.140	1.184	1.250
M,N.	Jasa Perusahaan	1.580	1.829	2.019
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.880	1.887	2.345
P.	Jasa Pendidikan	2.080	2.207	2.080
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	787	818	927,0 1
R,S,T,U	Jasa Lainnya	325	357	399,8 3
Total PDRB		24.975	28.09 0	30.81 1

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

Tabel 2. 38 Distribusi PDRB Kota Bengkulu ADHB menurut Lapangan Usaha (Persen), 2021-2023

Uraian	Distribusi PDRB Kota Bengkulu ADHB menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,72	7,66	7,52
B. Pertambangan dan Penggalian	0,12	0,11	0,10
C. Industri Pengolahan	3,27	3,07	2,88
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,12	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,23	0,23
F. Konstruksi	4,82	4,55	4,51
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,76	20,31	20,40
H. Transportasi dan Pergudangan	16,81	20,21	21,41
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,17	2,11	2,13

Uraian		Distribusi PDRB Kota Bengkulu ADHB menurut Lapangan Usaha (Persen)		
		2021	2022	2023
J.	Informasi dan Komunikasi	7,63	7,44	7,55
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,14	4,71	4,12
L.	Real Estate	4,56	4,21	4,06
M, N	Jasa Perusahaan	6,33	6,51	6,55
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,53	6,72	6,52
P.	Jasa Pendidikan	8,33	7,86	7,61
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,15	2,91	3,01
R,S ,T, U	Jasa lainnya	1,30	1,27	1,30
Total PDRB		100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Bengkulu 2024

Tabel 2. 39 PDRB Kota Bengkulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2021	2022	2023
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.216	1.259	1.313
B.	Pertambangan dan Penggalian	21	22	22,1
C.	Industri Pengolahan	509	522	530,82
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	19	20	20,54
E.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	43	44	47,45
F.	Konstruksi	701	702	740,52
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.421	3.562	3.733
H.	Transportasi dan Pergudangan	2.372	2.761	2.955
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	316	343	376,59
J.	Informasi dan Komunikasi	1.581	1.700	1.863
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	787	755	716,1
L.	Real Estat	847	871	909,42
M,N.	Jasa Perusahaan	960	1.065	1.149
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.101	1.103	1.169
P.	Jasa Pendidikan	1.274	1.314	1.362
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	474	486	527,04
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	192	204	224,28
Total PDRB		15.833	16.734	17.659

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

Tabel 2. 40 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen), 2021-2023

Uraian		Distribusi PDRB Kota Bengkulu ADHB menurut Lapangan Usaha (Persen)		
		2021	2022	2023
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,11	3,57	4,29
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,72	2,23
C.	Industri Pengolahan	2,42	2,51	1,72
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,49	6,21	3,10
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,58	4,09	6,84
F.	Konstruksi	1,96	0,21	5,49
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,51	4,12	4,80
H.	Transportasi dan Pergudangan	0,94	16,42	7,00
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,90	8,60	9,76
J.	Informasi dan Komunikasi	6,25	7,56	9,56
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,27	-4,08	-5,11
L.	Real Estate	0,17	2,85	4,41
M, N	Jasa Perusahaan	-0,97	10,92	7,92
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,04	0,18	5,98
P.	Jasa Pendidikan	3,03	3,15	3,65
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,82	2,45	8,45
R,S ,T, U	Jasa lainnya	1,26	6,46	9,69
Total PDRB		3,47	5,69	5,53

Sumber: BPS Kota Bengkulu 2024



Gambar 2. 10 PDRB per Kapita di Kota Bengkulu 2019-2023

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

PDRB per kapita atau yang biasa disebut pendapatan per kapita (*per capita income*) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran yang telah dicapai Kota Bengkulu. PDRB per kapita Kota Bengkulu menunjukkan kenaikan tiap tahun. Namun kenaikan tersebut belum menunjukkan kenaikan daya beli masyarakat karena kenaikan tersebut masih terpengaruh oleh adanya kenaikan harga. Pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan berdasarkan jenis pengeluaran menunjukkan tren kenaikan dan hal ini menunjukkan indikasi positif. Pengeluaran terbesar di tahun 2023 baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 60%.

Rata-rata pengeluaran per kapita mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 1,609 juta per kapita menjadi 1,786 juta per kapita tahun 2023. Namun, persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 55% turun menjadi 58% di tahun 2023. Berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita tahun 2023 komoditas makanan, "makanan dan minuman jadi" memberikan kontribusi tertinggi sebesar 229.291 Rupiah. Berdasarkan komoditas bukan makanan, perumahan dan fasilitas rumah tangga memberikan kontribusi tertinggi sebesar 507.170 Rupiah.

Tabel 2. 41 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Bengkulu (miliar rupiah), 2019–2023

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14.230,14	14.400,38	15.018,27	16.653,20	18.475,86
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	683,09	645,46	644,66	731,76	847,56
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.114,14	6.244,19	6.439,33	6.643,53	7.322,44
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.005,30	7.005,09	7.610,83	8.294,23	8.921,68
Perubahan Inventori	355,72	394,55	27,74	186,75	-24,52
Net Ekspor Barang dan Jasa	-5.178,00	-5.191,18	-4.765,90	-4.419,04	-4.731,61
PDRB	23.210,39	23.498,49	24.974,93	28.090,43	30.811,41

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

Tabel 2. 42 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Bengkulu (miliar rupiah), 2019–2023

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.069,40	9.084,78	9.365,21	9.917,60	10.480,75

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	482,4	451,34	440,13	480,69	533,16
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.842,35	3.871,19	3.984,13	4.127,70	4.310,96
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.897,46	4.805,38	4.984,01	5.142,15	5.351,58
Perubahan Inventori	60,13	73,45	5,05	115,05	-17,46
Net Ekspor Barang dan Jasa	-3.012,40	-2.984,65	-2.945,34	-2.949,25	-3.000,06
PDRB	15.339,34	15.301,49	15.833,19	16.833,94	17.658,93

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

Tabel 2. 43 Rata-rata Pengeluaran (Rupiah) per kapita di Kota Bengkulu, 2021-2023

Kelompok Komoditas	2021	2022	2023
Jumlah makanan	670.994	722.569	745.600
Padi-padian	70.149	74.356	73.134
Umbi-umbian	5.796	6.311	6.727
Ikan/udang/cumi/kerrang	63.495	71.229	71.705
Daging	34.165	43.665	38.430
Telur dan susu	46.572	44.392	43.272
Sayur-sayuran	60.612	67.141	68.821
Kacang-kacangan	9.377	10.911	12.604
Buah-buahan	32.140	35.807	34.380
Minyak dan kelapa	17.667	23.050	22.869
Bahan minuman	15.936	17.540	17.370
Bumbu-bumbuan	8.707	11.959	11.397
Konsumsi lainnya	11.054	16.788	15.621
Makanan dan minuman jadi	204.910	201.726	229.291
Rokok	90.414	97.694	99.978
Jumlah bukan makanan	883.696	886.311	1.040.332
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	424.506	482.473	507.170
Aneka barang dan jasa	217.520	218.410	275.245
Pakaian alas kaki dan tutup kepala	43.705	40.624	50.714
Barang tahan lama	117.410	34.537	80.390
Pajak pungutan dan asuransi	70.556	74.114	92.289
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	9.999	36.154	34.525
Jumlah	1.554.690	1.608.880	1.785.932

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

2.3.1.2. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah salah satu indikator daya beli petani. Salah satu indikator mengukur tingkat kesejahteraan petani ini berdasarkan kemampuan tukar produk yang dihasilkan petani dibanding dengan

barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi maupun konsumsi rumah tangga. Jika NTP > 100 maka daya beli petani di periode tersebut lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP < 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Perhitungan dan interpretasi data yang sama berlaku juga untuk Nilai Tukar Nelayan. Perkembangan NTN dan NTP di Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 adalah:

Tabel 2. 44 Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kota Bengkulu 2019-2023

Bulan	2019		2020		2021		2022		2023	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Jan	101,23	98,39	116,71	91,89	124,91	100,69	143,00	104,28	139,58	Na
Feb	105,12	99,34	113,76	90,23	124,71	101,86	145,48	105,64	141,38	Na
Mar	105,50	97,42	110,68	91,63	128,78	100,15	147,32	105,38	144,32	Na
April	104,93	96,85	109,97	92,67	129,42	100,26	146,88	105,44	142,21	Na
Mei	102,07	96,46	106,72	93,78	130,63	98,91	127,02	106,26	138,80	Na
Juni	100,06	97,00	107,85	92,85	127,81	99,08	120,66	106,95	142,14	Na
Juli	100,89	97,32	110,94	93,10	128,51	99,17	110,43	106,35	143,73	Na
Agu	101,68	97,79	114,57	94,71	132,15	99,60	122,90	-	147,15	Na
Sep	106,32	99,33	117,66	96,01	136,04	100,95	130,15	-	152,65	Na
Okt	106,78	97,11	118,11	96,96	140,04	101,80	135,24	-	154,28	Na
Nov	110,32	95,76	119,86	98,07	143,80	103,34	140,75	-	157,42	Na
Des	112,94	94,01	122,12	99,59	143,93	104,85	139,85	-	158,41	Na
Thn	104,82	97,23	114,08	94,29	132,56	100,89	134,14	105,76	146,84	Na

Keterangan : 1. Petani, 2. Nelayan. Sumber: BPS Kota Bengkulu 2024, BPS Provinsi Bengkulu 2024

2.3.1.3. Industri

Produktivitas masyarakat Kota Bengkulu ditampakan dengan banyaknya usaha industri kecil dan menengah dan koperasi yang mampu menjadi pilar peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah. Usaha industri kecil dan menengah yang ada di Kota Bengkulu cenderung menyebar dan merata di setiap kecamatan dengan jenis usaha industri yang beraneka ragam. Pada tahun 2023, jumlah UMKM sebanyak 44.705 UMKM. Jumlah ini relatif tidak banyak berubah selama 5 tahun terakhir. Jumlah koperasi aktif dan bersertifikat NIK mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2023, jumlah koperasi aktif dan bersertifikat NIK sebanyak 981.

Tabel 2. 45 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bengkulu 2019-2023

Jumlah	2019	2020	2021	2022	2023
UMKM	44.696	44.702	44.706	44.706	44.705
Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	80	75	110	155	100
Jumlah Koperasi	910	918	928	965	983
Jumlah Koperasi Aktif dan bersertifikat NIK	914	936	953	964	981
Volume Usaha Koperasi (Juta Rp)	205.036	183.117	128.171	140.040	210.695

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2024, Dinas Koperasi Kota Bengkulu 2024

Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Setiap wilayah memiliki potensi dan keunggulan sektoral yang menjadi basis perekonomian dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Tak terkecuali Kota Bengkulu yang menjadikan industri kecil menengah dan industri besar dan sedang sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mendorong pengembangan wilayah tertentu sebagai pusat pertumbuhan kegiatan industri. Pengembangan wilayah-wilayah tersebut diharapkan selain dapat sebagai kegiatan ekonomi utama juga dapat memberikan efek ganda terhadap tumbuhnya sektor-sektor yang lain. Perkembangan kinerja urusan perindustrian di Kota Bengkulu tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 46 Perkembangan Industri Kecil Menengah di Kota Bengkulu 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Industri Kecil Menengah	IKM	1.237	1.286	1.403	1.488	1.580

Sumber: Disperindag Kota Bengkulu 2024

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor penggerak perekonomian daerah. Daya saing SDM menjadi gambaran penting dari daya saing suatu daerah. Daya saing sumber daya manusia dapat dilihat dari sisi kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan dari sumber daya manusia itu sendiri.

2.3.2.1. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia pada bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator di antaranya adalah Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni. Selama tiga tahun terakhir Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan. Selain itu Angka Partisipasi "Kasar" dan "Murni" menunjukkan angka yang tinggi di atas 90, meskipun Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP/MTs/Paket B masih di bawah 90 selama 3 tahun terakhir. Angka ini lebih besar dari APM Nasional sebesar 81,35 dan APM Provinsi Bengkulu sebesar 81,08. Hal ini sejalan dengan indikator Angka Partisipasi Sekolah yang berada diatas 98 persen selama 3 tahun terakhir.

Tabel 2. 47 Indikator Pendidikan di Kota Bengkulu, 2021-2023

Indikator Pendidikan	2021	2022	2023
Rata-rata Lama Sekolah	11,80	11,82	11,83
Harapan Lama Sekolah	16,03	16,04	16,06
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	106,68	108,93	105,72
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98,87	93,86	104,66
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,45	97,18	97,21
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	89,91	88,88	88,90

Indikator Pendidikan	2021	2022	2023
Angka Partisipasi Sekolah (persen) Umur 7-12	99,45	98,35	99,20
Angka Partisipasi Sekolah (persen) Umur 13-15	99,96	98,49	99,22
Tidak Mempunyai Ijazah (persen)	5,91	5,02	n/a
SD/MI/Paket A/SDLB (persen)	12,89	12,11	12
SMP/MTs/Paket B/SMPLB (persen)	18,34	17,72	15

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2022-2024

2.3.2.2. Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia pada bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Stunting, Angka Harapan Hidup, Jumlah Kasus Penyakit, Jaminan Kesehatan, Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Bengkulu.

Tingkat kematian ditunjukkan dari Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa). AKI bermanfaat dalam rangka pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi kaum ibu, khususnya pelayanan kehamilan.

Tingginya AKI menunjukkan rendahnya derajat kesehatan di suatu daerah. Perkembangan AKI dan AKB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 48 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Bengkulu, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (dilaporkan)	59	98	49	175	52
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup (dilaporkan)	3,2	2,4	3,4	2,8	17

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 2024

Pada tahun 2019, AKI Kota Bengkulu mencapai 59 orang per 100.000 Kelahiran Hidup. Tahun berikutnya meningkat menjadi 98. Tahun 2021 menurun menjadi 49 dan meningkat tajam hingga 175 pada tahun 2022. Tahun 2023 kembali menurun menjadi 52 orang per 100.000 Kelahiran Hidup. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas kesehatan dari sisi AKI di Kota Bengkulu masih belum optimal. Penyebab dari persoalan tersebut adalah penanganan yang belum optimal, data terkait penyakit ibu hamil yang belum memadai, dan pendarahan.

Angka Kematian Bayi pada tahun 2023 di Kota Bengkulu lebih buruk dari target Renstra yaitu 3,6 per 1000 kelahiran hidup. Adapun Angka Kematian Bayi cakupan program tahun 2023 yaitu 17 per 1000 Kelahiran Hidup mengalami kenaikan sebesar 14,2 per 1000 Kelahiran Hidup jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana Angka Kematian Bayi tahun 2022 yang dilaporkan sebesar 2,8 per 1000 Kelahiran Hidup. Namun data ini masih belum mewakili keadaan yang sebenarnya karena laporan kematian dari kelurahan belum begitu lengkap. Di sisi lain jumlah kelahiran bayi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2023 jumlah bayi lahir sebanyak 5.832 menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 6.120. Penurunan jumlah bayi lahir sejalan dengan penurunan berat bayi lahir rendah, gizi kurang, dan persentase berat bayi lahir rendah. Persentase berat bayi lahir rendah selama 5 tahun terakhir berada di kisaran 1%. Pada tahun 2023 persentase berat bayi lahir rendah di bawah 1,70% dan persentase gizi kurang sebesar 1,15%.

Hal ini sejalan dengan angka stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Prevalensi Stunting berdasarkan data SSGI Tahun 2023 mengalami penurunan signifikan sebesar 6,2 persen dari 12,9 persen tahun 2022 menjadi 6,7 persen pada tahun 2023.

Tabel 2. 49 Jumlah Bayi Lahir, Berat Bayi Lahir Rendah, Gizi Kurang di Kota Bengkulu, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Bayi Lahir	6.986	6.908	6.749	6.120	5.832
Berat Bayi Lahir Rendah	70	70	63	59	99
Gizi Kurang	67	0	115	72	67
Persentase Berat Bayi Lahir Rendah	1,00	1,01	0,93	0,96	1,70
Persentase Gizi Kurang	0,96	0,00	1,7	1,18	1,15

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2020-2024, BPS

Daya saing sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk suatu negara atau wilayah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mencapai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Definisi Angka Harapan Hidup (AHH) pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Bengkulu sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 2. 50 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Bengkulu, 2019-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (AHH)	73,88	73,94	74,18	74,43

Sumber: BPS Kota Bengkulu 2024, Hasil Long Form SP2020

Keluhan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain, untuk mengetahui keluhan kesehatan terhadap penduduk/masyarakat adalah dengan cara melakukan survey terhadap masyarakat, hal ini dapat dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Di Kota Bengkulu, penduduk yang mengalami keluhan selama sebulan dan berobat jalan selama sebulan terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 51 Persentase Keluhan Kesehatan di Kota Bengkulu, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk yang mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir	31,4	30,3	42,08	49,23	24,38
Persentase Penduduk yang mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir	44,7	41,4	42,64	29,27	30,73

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan kasus penyakit, Angka Kesakitan Malaria, DBD, dan TBC mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Angka kasus baru yang naik signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 adalah kasus baru AIDS dimana di tahun 2022 terdapat kasus baru sebanyak 54 kasus dan di tahun 2023 naik menjadi 113 kasus baru.

Tabel 2. 52 Jumlah Kasus Penyakit Menurut Jenis Penyakit di Kota Bengkulu, 2019-2023

Jenis Penyakit	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Penemuan TBC	345	339	352	50,6	363
Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	81,5	83	82,9	93,7	94
Jumlah Kasus Baru AIDS	112	19	-	54	113
Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk	0,5	0,3	1	2,4	0,001
Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk	0,01	0,01	4	0	0,011
Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	81,6	44	162	56,05	0,21

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Salah satu cara menjaga daya saing sumber daya manusia adalah dengan program jaminan kesehatan. Program nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan kesehatan nasional (JKN) dibagi menjadi antara lain PBI APBN yaitu masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh pemerintah

pusat melalui APBN dan PBI APBD yaitu peserta JKN yang iurannya dibiayai oleh pemerintah daerah melalui APBD. Peserta JKN juga terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) yang kepesertaannya dari PNS, TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri, yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan peserta bersangkutan. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mandiri, peserta JKN ini merupakan pekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta bersangkutan. Peserta JKN dari bukan pekerja (BP) yang merupakan peserta JKN yang terdiri dari investor, pemberi pajak, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, dan bukan pekerja lainnya yang iurannya dibiayai oleh peserta bersangkutan.

Di Kota Bengkulu persentase jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan PBI dan Non PBI dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 sebesar 80,64% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 77,25%.

Tabel 2. 53 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di Kota Bengkulu, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
BPJS Kesehatan PBI	15,35	24,85	28,51	31,66	38,77
BPJS Kesehatan Non-PBI	55,32	50,01	42,55	45,59	41,87
Total	70,67	74,86	71,06	77,25	80,64

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2020-2024

Fasilitas Kesehatan mengalami peningkatan di tahun 2023 meskipun sempat mengalami penurunan setelah terjadi pandemi Covid-19. Jumlah klinik pratama dan posyandu meningkat di tahun 2023. Tahun 2023, klinik pratama sebanyak 62 yang ditahun sebelumnya sebanyak 49 dan di tahun 2022 posyandu sebanyak 228 naik menjadi 231 di tahun 2023.

Tenaga Kesehatan di Kota Bengkulu menunjukkan tren peningkatan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019-2023, namun terjadi penurunan signifikan di tahun 2023.

Tabel 2. 54 Fasilitas Kesehatan di Kota Bengkulu, 2019-2023

Fasilitas Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Sakit Umum	9	8	8	8	8
Rumah Sakit Khusus	-	1	1	1	1
Puskesmas Rawat Inap	3	3	0	0	0
Puskesmas Non Rawat Inap	17	17	20	20	20
Klinik Pratama	22	10	49	49	49
Klinik Utama	-	-	1	1	3
Posyandu	222	211	228	226	226

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2021-2024

Tabel 2. 55 Tenaga Kesehatan di Kota Bengkulu, 2019-2023

Tenaga Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
Dokter	598	285	642	537	135
Perawat	2157	1375	1357	1507	378
Bidan	771	586	586	734	410
Farmasi	302	296	296	359	76

Tenaga Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
Ahli gizi	128	137	137	148	54

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2024

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan faktor penting pembangunan suatu wilayah serta sebagai salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan daya saing suatu daerah.

2.3.3.1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Bengkulu tahun 2019-2023 dapat dilihat melalui beberapa indikator yang terbagi ke dalam dua kelompok yaitu infrastruktur dasar dan perumahan serta kawasan pemukiman. Infrastruktur dasar dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu jalan dalam kondisi baik, jembatan dalam kondisi baik, dan luas jaringan irigasi.

Tabel 2. 56 Kemantapan Jalan Kota di Kota Bengkulu, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jalan Kondisi Baik (km)	490,5	460,2	591,7	919,0	919,0
	5	2	1	2	2
Kemantapan Jalan Kota (%)	83,15	80,86	87,36	98,57	98,57
Jembatan Kondisi Baik (Jumlah)	12	11	11	8	10
Luas Jaringan Irigasi (Ha)	282	303	293	398,8	398,8
				6	6

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka, Dinas PUPR Kota Bengkulu 2024

Pada tahun 2019 jalan dengan kondisi baik Kota Bengkulu sepanjang 490,552 km dan mengalami peningkatan sampai tahun 2023 sepanjang 919,021 km walaupun di tahun 2020 sempat terjadinya penurunan terhadap kondisi jalan baik. Jembatan merupakan prasarana penting yang menjadi penghubung antar jalan yang terpisah oleh sungai/danau/rintangan lainnya. Jumlah jembatan dalam kondisi baik menurun tiap tahunnya dan salah satu penyebabnya karena beberapa jembatan memang awalnya hanya ditujukan untuk jalur evakuasi apabila terjadi bencana, sekarang menjadi jalur utama. Contohnya adalah Jembatan Kalibaru, Kelurahan Padang Serai, Kota Bengkulu. Jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur pertanian yang penting untuk menunjang kebutuhan air pada lahan pertanian. Capaian pembangunan jaringan irigasi Kota Bengkulu dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami peningkatan tapi di tahun 2021 mengalami penurunan seperti data di atas. Peningkatan kondisi jaringan irigasi Kota Bengkulu ini harus terus ditingkatkan guna memenuhi target dan kebutuhan irigasi pertanian di Kota Bengkulu.

Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bengkulu kurun waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Rumah Tidak Layak Huni. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat. Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi

layak, yaitu fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh satu rumah tangga sendiri yang terhubung pada SPAL atau menggunakan tangki septik dengan jenis kloset leher angsa, yang disedot minimal 1x dalam jangka waktu 3-5 tahun dan dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diintervensi di Kota Bengkulu mengalami penurunan dalam periode tahun 2020-2022 namun naik pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan karena kebijakan *refocussing* anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan penanganan RTLH masih perlu untuk ditingkatkan dengan memperhatikan faktor-faktor penunjang seperti sarana dan prasarana air bersih, sanitasi yang layak serta jalan lingkungan agar jumlah RTLH di Kota Bengkulu dapat terus ditekan. Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan jumlah RTLH di Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 2. 57 Akses Sanitasi Layak dan RTLH di Kota Bengkulu, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Akses Sanitasi Layak (%)	93,19	95,71	95,79	94,49	100
Akses Air Layak (%)	77,97	88,77	92,21	94,51	58,30
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	60,00	75,97	70,14	75,00	80,00
Rumah Layak Huni (Unit)	4311	13649	14327	15023	15627
Luas Kawasan Kumuh (Ha)	456,90	24,13	52,93	13,59	13,59
RTLH (Unit)	149	60	26	13	61

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu 2024

2.3.3.2. Infrastruktur

Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan irigasi merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan air bersih serta pengelolaannya dan peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2023 maupun tahun-tahun sebelumnya jumlah rumah tangga yang menggunakan elpiji 3 kg menempati urutan tertinggi. Hal ini selain karena kepraktisannya, tingginya penggunaan bahan bakar LPG disebabkan karena bahan bakar rumah tangga alternatif seperti kayu bakar dan minyak tanah semakin tidak tersedia di pasaran, sedangkan alternatif lain seperti penggunaan listrik untuk memasak masih dirasa mahal. Penggunaan listrik untuk rumah tangga pada umumnya digunakan untuk penerangan dan penggunaan peralatan elektronik. Listrik yang digunakan oleh rumah tangga pada umumnya bersumber dari PLN.

Sebagian besar rumah tangga di Kota Bengkulu menggunakan air bersih yang disalurkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu. Selama tahun 2023, telah menyalurkan 7.727.913m³ kepada seluruh pelanggan. Pelanggan terbesar adalah rumah tangga yang mendapat penyaluran 6.358.242m³ atau mencapai 82,27% dari seluruh air bersih yang disalurkan ke pelanggan lain, seperti sosial, perkantoran, bisnis, dan pelanggan khusus.

Tabel 2. 58 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kota Bengkulu, 2023

Cabang	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut / Hilang (KWh)
Teluk Segara	101.247.050	177.155.664	150.876.403	633.630	10.811.341
Nusa Indah	156.620.850	279.663.899	252.239.142	950.845	24.700.310

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

Tabel 2. 59 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Cabang/Ranting di Kota Bengkulu, 2019-2023

Cabang	2019	2020	2021	2022	2023
Teluk Segara	57.534	60.543	63.098	64.220	68.164
Nusa Indah	84.716	88.945	93.786	95.645	102.283

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

Tabel 2. 60 Produksi Air Bersih di Kota Bengkulu menurut Bulan Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Produksi (m ³)	15.436.487	15.916.278	20.205.807

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

Tabel 2. 61 Volume Air yang Disalurkan dan Nilainya Menurut Katagori Pelanggan di Kota Bengkulu Tahun 2022-2023

Kategori Pelanggan	2022		2023	
	Air yang disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)	Air yang Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)
Sosial	218.139	507.838	222.713	517.405
Rumah Tangga	6.428.354	37.595.945	6.358.242	37.611.018
Instansi Pemerintah	227.794	3.077.489	335.794	3.621.823
Niaga	489.103	4.639.158	727.989	6.467.105
Industri	23.807	578.257	54.108	198.520.457
Khusus	17.574	533.985	29.067	878.92
Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	7.404.771	46.932.672	7.727.913	247.616.728

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Iklim investasi yang baik dapat menjadi keunggulan daya saing suatu daerah. Kondisi iklim investasi di daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya kemudahan berinvestasi, situasi politik, serta keamanan dan ketertiban daerah.

2.3.4.1. Penanaman Modal

Izin Prinsip adalah perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak memulai investasi di

Indonesia. Izin prinsip mencakup antara lain pembuatan izin investasi, pemesanan nama perusahaan, pembuatan akta, pembuatan NPWP, tanda daftar, izin mengerjakan tenaga asing, dan lain-lain. Kemudahan izin investasi akan memengaruhi nilai investasi di suatu daerah. Faktor yang dapat memengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modal antara lain: faktor Sumber Daya Alam, faktor Sumber Daya Manusia, faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, faktor kebijakan pemerintah, faktor kemudahan dalam perizinan. Perkembangan kinerja Penanaman Modal di Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 adalah:

Tabel 2. 62 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan dan Nilai Investasi Kota Bengkulu 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
IKM Bidang Perizinan (Nilai)	84,57	82,63	85,69	85,36	92,30
Nilai Investasi (Rupiah Miliar)	1.741	3.238	834	888	2.729

Sumber: DPMPSTSP Kota Bengkulu 2024

Tabel 2. 63 Jumlah dan Nilai Investasi Perusahaan Penanaman Modal Kota Bengkulu Tahun 2021-2023 (Juta Rupiah)

Investasi Modal	2021		2022		2023	
	Jumlah Investasi	Nilai Investasi	Jumlah Investasi	Nilai Investasi	Jumlah Investasi	Nilai Investasi
Asing	13	139.445	12	178.306	21	214.017
Dalam Negeri	129	694.716	117	710.150	182	2.515.842

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2024

2.3.4.2. Keamanan dan Ketertiban Daerah

Peristiwa kejahatan yang dilaporkan di Kota Bengkulu sebanyak 1.809 kasus di tahun 2023. Risiko penduduk terkena kejahatan menurun dari 484 kasus di tahun 2022 menjadi 463 kasus di tahun 2023. Persentase penyelesaian tindak pidana meningkat dari 32% menjadi 43% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tindak kejahatan dan peningkatan penanganan di Kota Bengkulu.

Tabel 2. 64 Data Kriminalitas di Kota Bengkulu 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan	1464	1423	1809	1809
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan	396	376	484	463
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	47,00	45,53	32,11	43,28

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2024

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjadi salah satu indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Aspek ini menunjukkan keberhasilan pelaksana pembangunan terutama yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Keberhasilan aspek pelayanan umum tidak terlepas dari profesionalitas dalam pelayanan. Profesional, menjadi kunci birokrasi untuk menciptakan kinerja yang efektif dan efisien menuju layanan pemerintahan semakin

berkualitas. Profesionalitas ASN diukur oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian menggunakan indikator antara lain: kompetensi, kualifikasi, disiplin dan kinerja. Perkembangan kinerja ASN di Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 65 Indeks Pengukuran Profesionalitas (IPP) ASN di Kota Bengkulu, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022
Indeks Pengukuran Profesionalitas (IPP) ASN	30,73	50,47	n/a	60,13

Sumber: BKPSDM Kota Bengkulu 2024

Indeks Pengukuran Profesionalitas (IPP) ASN Tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat profesionalitas ASN dalam pelayanan publik, antara lain budaya organisasi publik, tujuan organisasi, struktur organisasi, tata kerja di birokrasi, dan sistem insentif yang dihasilkan dan diwujudkan dalam proses birokrasi. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN (Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI No 8 Tahun 2019). Indikator-indikator perkembangan komunikasi dan informasi di Kota Bengkulu selama lima tahun terakhir secara keseluruhan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase jaringan internet untuk instansi pemerintah daerah mengalami kenaikan menjadi 100 persen di tahun 2022, dari 80 persen di tahun sebelumnya.

Tabel 2. 66 Perkembangan Komunikasi dan Informasi di Kota Bengkulu, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks e-Government	0.001	-	1.6	1.9	2.19
Peringkat Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1.74	0	1.6	1.9	2.19
SST (Satuan Sambungan Telepon)	24.12	-	-	-	-
Persentase jaringan internet untuk instansi Pemerintah Daerah	0	60	70	80	100
Persentase informasi yang dapat diakses masyarakat	60	1348	1350	1355	1480
Persentase PD yang menerapkan aplikasi e-Government	25	25	40	107	129
Persentase data pembangunan daerah yang terpublikasi	0	230	390	498	586
Rasio keamanan informasi Pemerintah Daerah	80	80	85	85	90
Persentase ruang publik terlayani internet memadai	22	0	6	0	0
Persentase PD terlayani internet memadai	6	6	15	20	26

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Bengkulu 2023

2.5. Evaluasi terhadap Hasil Dokumen Perencanaan Periode sebelumnya

2.5.1 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2007-2027

Pengendalian dan evaluasi pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil program daerah dari seluruh aspek demi menjamin pencapaian kesejahteraan masyarakat serta untuk memberikan informasi dan justifikasi atas rencana, implementasi, dan hasil perencanaan yang telah dilakukan. Informasi tersebut dapat menjadi umpan balik dan pertimbangan bagi pemerintah dalam perumusan dokumen perencanaan selanjutnya.

Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu tahun 2007-2027 menjelaskan ketercapaian visi dan misi daerah tahun 2007-2027. Hasil ini digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu tahun 2025-2045. Hasil evaluasi dilakukan berdasarkan periodisasi pelaksanaan yaitu periode 2008-2013, periode 2013-2018, dan periode 2018-2023.

Pada awal periodisasi RPJPD Tahun 2013-2018 Pemerintah Kota Bengkulu masih mengalami kesulitan penghimpunan data pada tiap sasaran dan indikator kerja, sehingga evaluasi capaian belum optimal dilaksanakan. Hal ini karena belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM serta masih kurangnya alat atau instrumen pendukung dalam menghimpun data menjadi faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelayanan publik.

Evaluasi bisa dilaksanakan pada periodisasi RPJPD ke-2 tahun 2013-2018 oleh Pemerintah Kota Bengkulu dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel 2. 67 Capaian Indikator Daerah berdasarkan Status Ketercapaian Kinerja periode 2013-2018

Status ketercapaian	Periode 2013-2018	
	Jumlah Indikator	Capain kinerja (%)
Tercapai	23	48,9
<i>On the track</i>	14	29,8
Tidak Tercapai	10	21,3
Total	47	100

Sumber : Laporan Evaluasi RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027

Berdasarkan kriteria ketercapaian diketahui ada 21,3% atau 10 indikator dari total 47 indikator kinerja yang tidak tercapai. Indikator-indikator dimaksud antara lain Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*good governance*) menjadi perhatian dan perlu ditingkatkan, sebagai salah satu bentuk konsistensi pemerintah untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat Kota Bengkulu baik dari pelayanan fisik maupun pemerintahan. Berdasarkan kriteria ketercapaiannya ada 48,9% atau 23 dari total indikator yang tercapai. Secara rinci capaian tiap-tiap indikator disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2. 68 Evaluasi Capaian Indikator RPJPD 2007-2027
Periode 2013-2018**

Periode 2013-2018		
No	Indikator	Keterangan
1	Opini pemeriksaan atas laporan keuangan	tercapai
2	Penetapan APBD Tepat waktu	<i>on the track</i>
3	Nilai SAKIP	tidak tercapai
4	% SKPD menyusun LAKIP	tercapai
5	% SKPD memiliki akuntabilitas kinerja yang baik	tercapai
6	Penetapan RKPD tepat waktu	tercapai
7	% SKP yang menyusun renja SKPD	tercapai
8	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	<i>on the track</i>
9	Kepemilikan akte kelahiran	tidak tercapai
10	Penempatan KTP nasional berbasis NIK (E-KTP)	<i>on the track</i>
11	Kondisi sarana prasaran pendukung	tercapai
12	Jumlah SKP yang memiliki SPM, SPP dan SOP	tercapai
13	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	tercapai
14	Persentase RAPERDA yang disahkan menjadi Perda	tidak tercapai
15	Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah	tidak tercapai
16	Jumlah pos keamanan lingkungan	tidak tercapai
17	Persentase temuan BPK yang dapat ditindaklanjuti	tercapai
18	Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	<i>on the track</i>
19	Proporsi panjang jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik	tercapai
20	Proporsi drainase dalam kondisi baik	<i>on the track</i>
21	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	tercapai
22	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas	<i>on the track</i>
23	Indeks pembangunan manusia (IPM)	<i>on the track</i>
24	Angka melek huruf (%)	tercapai
25	Meningkatnya APS	<i>on the track</i>
26	Meningkatnya usia harapan hidup (UHH)	<i>on the track</i>
27	Ketersediaan obat dan vaksin	<i>on the track</i>
28	Persentase balita gizi buruk (%)	tercapai
29	Angka kematian bayi	tercapai
30	Jumlah tempat ibadah	tercapai
31	Jumlah organisasi pemuda	tercapai
32	Jumlah event olahraga nasional/regional yang diikuti	tidak tercapai
33	Persentase sampah rumah tangga yang terkelola oleh pemerintah daerah (m ³)	tidak tercapai
34	Ketersediaan <i>buffer stock</i> bencana	<i>on the track</i>

Periode 2013-2018		
No	Indikator	Keterangan
35	Jumlah kematian ibu melahirkan	tercapai
36	Jumlah perempuan yang menduduki jabatan	tercapai
37	Pertumbuhan ekonomi (%)	<i>on the track</i>
38	PDRB per kapita (juta rupiah)	tercapai
39	Laju inflasi (%)	<i>on the track</i>
40	Angka kemiskinan (%)	<i>on the track</i>
41	Angka pengangguran terbuka (%)	tidak tercapai
42	Produksi padi (ton)	tidak tercapai
43	Produksi daging ternak (ton)	tercapai
44	Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya (ton)	tidak tercapai
45	Meningkatnya jumlah bank	tercapai
46	Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif	tercapai
47	Meningkatnya jumlah UKM	tercapai

Sumber : Laporan Evaluasi RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027

Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di periode akhir RPJPD pada periode 2019-2023, Pemerintah Kota Bengkulu dihadapkan dengan berbagai masalah antara lain wabah Covid-19 serta musibah lainnya yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, akibatnya beberapa program atau kegiatan belum dapat dilaksanakan dan belum bisa mencapai target.

Tabel 2. 69 Evaluasi Capaian Indikator RPJPD 2007-2027 Periode 2019-2023

Status ketercapaian	Periode 2019-2023	
	Jumlah Indikator	Capain kinerja (%)
Tercapai	36	61
<i>On the track</i>	13	22
Tidak Tercapai	10	17
Total	59	100

Sumber : Laporan Evaluasi RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027

Berdasarkan kriteria ketercapaian, diketahui ada 17% atau 10 indikator dari total 59 indikator kinerja yang tidak tercapai. Indikator-indikator yang tidak tercapai antara lain Tata Kelola Pemerintahan, Indeks Kapasitas Fiskal yang dipengaruhi oleh kurangnya peningkatan PDRB Perkapita, Penerimaan Pajak serta perekonomian potensi daerah dari berbagai sektor. Adapun capaian misi, sasaran dan indikator kinerja dalam pembangunan daerah Kota Bengkulu lebih rinci akan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 70 Evaluasi Capaian Indikator RPJPD 2007-2027 Periode 2019-2023

Periode 2019-2023		
No	Indikator	Kategori capaian Kinerja
1	Indeks Reformasi Birokrasi	<i>on the track</i>
2	Angka konflik sosial	Tercapai
3	Nilai SAKIP	Tercapai
4	Peringkat pada Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapai
5	Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD) Kota se-Indonesia	Tercapai
6	Indeks Kapasitas Fiskal	Tidak Tercapai
7	Opini BPK	Tercapai
8	Indeks Persepsi Korupsi	Tidak Tercapai
9	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	Tercapai
10	Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tidak Tercapai
11	Nilai kepatuhan penyelenggaraan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan (*Hasil Survey Ombusman)	Tercapai
12	Indeks profesionalitas ASN	Tercapai
13	Persentase Kebijakan daerah (Perda / Perkada) yang serasi dengan kebijakan Provinsi dan Pusat	Tercapai
14	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Tercapai
15	Angka Kecelakaan	Tidak Tercapai
16	Meningkatnya Rasio Permukiman Layak Huni	Tercapai
17	Meningkatnya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Tercapai
18	Indeks Resiko Bencana	Tercapai
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<i>on the track</i>
20	Persentase Jalan Mantap	<i>on the track</i>
21	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar kelayakan	Tercapai
22	Angka keselamatan lalu lintas	Tercapai
23	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Tercapai
24	SST (Satuan Sambungan Telpon)	<i>on the track</i>
25	Indeks Kapasitas Daerah	Tercapai
26	Indeks Kualitas Air	Tidak Tercapai
27	Indeks Kualitas Udara	<i>on the track</i>
28	Persentase RTH terhadap Luas Wilayah	Tidak Tercapai
29	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tercapai
30	Angka Kemiskinan	<i>on the track</i>
31	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<i>on the track</i>
32	Indeks Pendidikan	Tercapai

Periode 2019-2023		
No	Indikator	Kategori capaian Kinerja
33	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Tercapai
34	Usia Harapan Hidup	<i>on the track</i>
35	Penghargaan Kota Sehat	Tercapai
36	Peringkat Kota Bengkulu di Porprov Bengkulu	Tercapai
37	Persentase pemuda berprestasi & mandiri tingkat Provinsi	Tercapai
38	Laju Pertumbuhan Penduduk	Tidak Tercapai
39	Persentase PMKS Mandiri	<i>on the track</i>
40	Rasio PMKS terhadap jumlah penduduk	Tercapai
41	Jumlah kebijakan responsif gender mendukung pemberdayaan	Tercapai
42	Penghargaan Kota Layak Anak	Tercapai
43	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Tercapai
44	Nilai investasi (T)	Tercapai
45	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	<i>on the track</i>
46	Indeks Ketahanan Pangan	Tercapai
47	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tidak Tercapai
48	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	<i>on the track</i>
49	PDRB ADHB (dalam juta rupiah)	Tercapai
50	PDRB ADHK (dalam juta rupiah)	<i>on the track</i>
51	PDRB Per Kapita Per Bulan (dalam Juta Rupiah)	Tercapai
52	Laju Inflasi	Tercapai
53	Indeks Gini	<i>on the track</i>
54	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Tidak Tercapai
55	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Tidak Tercapai
56	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Tercapai
57	Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil	Tercapai
58	Persentase peningkatan kontribusi sektor pariwisata (sektor kebudayaan, hiburan & rekreasi) terhadap PDRB	Tercapai
59	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perikanan terhadap sektor pertanian	Tercapai

Berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027 terdapat berbagai rekomendasi tindak lanjut yang dapat dijadikan pertimbangan untuk RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045, yaitu:

- Mengidentifikasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 2007-2027 untuk selanjutnya dapat disusun strategi penyelesaian pada perencanaan berikutnya.
- Mencermati kembali indikator yang masih relevan untuk dilaksanakan serta menjadikan realisasi 2023 sebagai baseline perencanaan periode berikutnya.

- Penguatan koordinasi lintas bidang teknis lingkup OPD dan lintas sektor antar OPD.
- Konsistensi kegiatan, anggaran serta target setiap periode
- Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai Kerangka Acuan Kerja
- Mengevaluasi program/kegiatan di tahun sebelumnya serta tetap konsisten dalam pelaksanaan di tahun berikutnya
- Untuk beberapa indikator yang tidak tercapai diharapkan dapat dianggarkan pada periode tahun berikutnya

2.5.2 Kinerja RTRW

Dalam rangka menanggapi hasil dari evaluasi yang dilakukan terhadap RTRW Kota Bengkulu tahun 2012-2032, untuk itu dilakukan Peninjauan Kembali (PK) RTRW yang mengharuskan adanya revisi terhadap Perda tersebut. Berdasarkan rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Peninjauan Kembali RTRW Kota Bengkulu Tahun 2012-2032, materi yang dievaluasi yaitu: a) tingkat kualitas yang kurang baik; b) tingkat kesahihan yang sah; dan c) tingkat simpangan pemanfaatan ruang yang tinggi, dengan bobot nilai muatan RTRW yang mengalami perubahan sebesar 44,14 %.

Adapun hasil pembahasan yang direkomendasikan oleh Gubernur:

1. Kebijakan strategis nasional yang belum terakomodasi sepenuhnya sehingga masih perlu perbaikan dan penyempurnaan.
2. Kebijakan strategis provinsi yang belum terakomodasi, perlu ditambahkan.
3. Sistematis dan muatan Materi Teknis Revisi RTRW Kota Bengkulu perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri ATR nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.
4. Perwujudan sistem pusat-pusat pelayanan dalam kota agar terkoneksi secara timbal balik antar pusat pelayanan tersebut.
5. RTH publik eksisting dan rencana masih kurang dari 20% agar dilengkapi dengan strategi penyediaan serta pentahapannya dalam indikasi program, antara lain meliputi rencana: taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, pemakaman.
6. KP2B Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus ditetapkan dan di-*overlay* dalam peta rencana pola ruang sesuai dengan Peraturan Menteri ATR nomor 8 Tahun 2017.

Untuk menjawab hasil evaluasi terhadap RTRW 2012-2032 maka diperlukan revisi terhadap RTRW tersebut. Melalui proses yang cukup panjang mulai dari tahun 2016 dan ditetapkannya pada tahun 2021, revisi telah dilakukan sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Dinamika kependudukan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan. RPJPD merupakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang sehingga membutuhkan perencanaan yang baik. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas perencanaan adalah dengan memproyeksikan apa yang menjadi dasar dari pembangunan. Dinamika kependudukan harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi sarana dan prasarannya. Berikut perkiraan atau proyeksi dari penduduk dan sarana prasarana yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2050.

Tabel 2. 71 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bengkulu

Penduduk Tahun 2023 (000 Orang)	Proyeksi Penduduk (000 Orang)				
	2025	2030	2035	2045	2050
391,2	398,9	420,9	441,9	485,2	506,9

Keterangan : angka proyeksi

Proyeksi penduduk Kota Bengkulu berdasarkan jenis kelamin mengindikasikan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar dibandingkan jenis kelamin perempuan dengan rasio 1,02. Artinya setiap 100 penduduk perempuan ada 102 penduduk laki-laki di Kota Bengkulu. Kedepan pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender perlu menjadi perhatian.

Tabel 2. 72 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bengkulu

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2045	2050
Laki-laki	198.086	201,4	212,5	223,1	234,0	256,0
Perempuan	194.214	197,5	208,4	218,7	229,4	250,9
Rasio	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Keterangan : angka proyeksi

Berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kota Bengkulu akan didominasi oleh penduduk pada kelompok usia produktif rentang umur 15 – 64 tahun. Angka *dependency ratio* berkisar 45 – 47. Hal ini bermakna setiap 100 penduduk produktif di Kota Bengkulu menanggung 45-47 penduduk usia non-produktif. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka ketergantungan nasional di tahun 2020 sebesar 41.

Tabel 2. 73 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Bengkulu

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2045	2050
0-14 Tahun	103.606	101,8	103,5	103,0	118,7	124,0
15-64 Tahun	273.276	275,4	286,9	299,3	331,5	346,3
>65 Tahun	15.417	21,7	30,6	39,6	35,1	36,6
Angka Ketergantungan	43,6	44,8	46,7	47,6	46,4	46,4

Keterangan : angka proyeksi

Tren jumlah dan *dependency ratio* penduduk di Kota Bengkulu mengalami peningkatan, maka proyeksi kebutuhan dasar perumahan, di Kota Bengkulu juga diproyeksi akan meningkat, seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 74 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Bengkulu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2045	2050
Jumlah Penduduk	392,3	398,9	420,9	441,8	463,4	506,9
Proyeksi Kebutuhan Rumah	117.903	135.329	178.894	222.458	309.587	353.152

Keterangan : angka proyeksi

Kebutuhan dasar lainnya bagi penduduk di Kota Bengkulu seperti air bersih, listrik, pengolahan sampah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan diproyeksikan meningkat, seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 75 Proyeksi Kebutuhan Air Minum, Listrik, Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Kota Bengkulu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2045	2050
Jumlah Penduduk	392,3	398,9	420,9	441,8	463,4	506,9
Kebutuhan Air						
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	1.829	1.949	2.250	2.551	3.153	3.454
Kebutuhan Listrik						
Jumlah Rumah	117.903	135.329	178.894	222.458	309.587	353.152
Proyeksi Kebutuhan Listrik	609,7	638,3	709,8	781,3	924,3	995,8
Kebutuhan Fasilitas						
Proyeksi Fasilitas Kesehatan	307	329	385	441	497	553
* Rumah Sakit	9	9	9	9	9	9
* Puskesmas	20	20	20	20	20	20
* dan lain-lain	278	300	356	412	468	524
Proyeksi Fasilitas Pendidikan	457	475	522	569	616	663
* TK	258	265	284	303	322	341
* SD / MI	135	140	153	166	179	192
* SMP / MTs	64	70	85	100	115	130

Keterangan : angka proyeksi

Tabel 2. 76 Proyeksi Kebutuhan Penanganan Sampah Kota Bengkulu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2045	2050
Jumlah Penduduk	392,3	398,9	420,9	441,8	463,4	506,9
Proyeksi Timbunan Sampah	841.01 1	875.88 4	963.06 6	1.050.24 9	1.224.61 4	1.311.79 6
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) (ha)	4,03	5,55	9,35	13,15	20,71	24,49

Keterangan : angka proyeksi

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041. Rencana struktur ruang wilayah Kota Bengkulu meliputi pusat kegiatan di wilayah kota dan sistem jaringan prasarana kota. Rencana pusat kegiatan wilayah kota:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK);
2. Subpusat Pelayanan Kota (SPPK); dan
3. Pusat Lingkungan (PL)

Pusat Pelayanan Kota berada di Kecamatan Ratu Samban yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala kota, pusat sarana pelayanan umum, pusat pendidikan dan kesehatan, pusat perdagangan dan jasa, serta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Subpusat Pelayanan Kota meliputi:

- a) Subpusat Pelayanan Kota I Kecamatan Teluk Segara dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat sarana pelayanan umum, pusat pariwisata, pusat pemerintahan kecamatan;
- b) Subpusat Pelayanan Kota II di Kecamatan Selebar dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, kesehatan, pusat olahraga, simpul transportasi skala nasional;
- c) Subpusat Pelayanan Kota III di Kecamatan Gading Cempaka dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan regional, pusat perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum;
- d) Subpusat Pelayanan Kota IV di Kecamatan Singgaran Pati dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan umum, pertahanan keamanan;
- e) Subpusat Pelayanan Kota V di Kecamatan Muara Bangkahulu dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, pendidikan, pertahanan keamanan

Pusat Lingkungan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kelurahan, sarana pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala lingkungan, pendidikan, meliputi:

- a) PL Surabaya;
- b) PL Rawa Makmur;
- c) PL Kompi;
- d) PL Lingkar barat;
- e) PL Nusa Indah; dan
- f) PL Kampung Melayu.

Rencana sistem jaringan prasarana kota meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Sistem jaringan transportasi meliputi darat, laut, dan udara, diantaranya:

- Sistem jaringan jalan

Sistem jaringan jalan adalah jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kota, jaringan jalan provinsi yang ada dalam wilayah kota, jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota, terminal penumpang, terminal barang, dan jembatan timbang.

- Sistem jaringan kereta api

Sistem jaringan kereta api adalah jaringan jalur kereta api umum dan stasiun kereta api. Jaringan jalur kereta api umum meliputi:

Jalur kereta api Padang (Sumbar) – Kota Bengkulu;

Jalur Kereta Api Kota Bengkulu – Manna; dan

Jalur kereta api Kota Padang Rejang Lebong – Kota Bengkulu.

Stasiun kereta api yaitu Stasiun Pulau Baai di Kecamatan Kampung Melayu dan Stasiun Betungan di Kecamatan Selebar.

- Sistem jaringan penyeberangan

Sistem jaringan penyeberangan meliputi lintas penyeberangan antar kabupaten/kota, lintas penyeberangan dalam kota, dan pelabuhan penyeberangan.

- Sistem jaringan transportasi laut meliputi pelabuhan laut yang terdapat dalam wilayah kota, terminal khusus, dan alur pelayaran laut. Pelabuhan laut yang terdapat dalam wilayah kota yaitu Pelabuhan Pulau Baai sebagai Pelabuhan Utama. Terminal khusus yaitu pelabuhan perikanan di Pulau Baai Kecamatan Kampung Melayu. Dan Alur Pelayaran Laut meliputi:

Alur pelayaran internasional yaitu Pulau Baai – Mukomuko – Malaysia;

Alur pelayaran nasional, meliputi:

Pulau Baai – Mukomuko – Sumatera Barat; dan

Pulau Baai – Linau – Lampung.

Alur pelayaran regional, meliputi:

Pulau Baai – Linau/Kaur;

Pulau Baai – Kahyapu/Enggano; dan

Pulau Baai – Malakoni/Enggano.

Alur pelayaran khusus, meliputi:

Desa Pasar Ketahun – Pulau Baai;

Desa Kota Bani – Pulau Baai;

Desa Selolong – Pulau Baai;

Desa Pasar Sebelat – Pulau Baai; dan

Pulau Baai – Pulau Mega.

- Sistem jaringan transportasi udara meliputi bandar udara yang terdapat dalam wilayah kota yaitu Bandar Udara Fatmawati sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder dan ruang udara untuk penerbangan meliputi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang pengaturan dan pengelolaan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Sistem jaringan energi meliputi infrastruktur pembangkit tenaga listrik, infrastruktur penyaluran tenaga listrik, dan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik adalah PLTU Bengkulu di Pelabuhan Pulau Baai dan PLTD Sukamerindu di Kecamatan Sungai Serut. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik adalah jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan distribusi tenaga listrik, dan gardu induk. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi terletak di Kecamatan Kampung Melayu.
- Sistem jaringan telekomunikasi adalah jaringan tetap dan bergerak. Jaringan tetap berupa sistem jaringan serat optik yang tersebar di seluruh kecamatan. Jaringan bergerak yaitu jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) Bersama yang tersebar di seluruh kecamatan.
- Sistem jaringan sumber daya air meliputi sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kota yaitu sumber air dan prasarana air. Prasarana sumber daya air meliputi sistem jaringan irigasi, sistem pengendali banjir, dan jaringan air baku untuk air bersih. Infrastruktur Kota yang direncanakan adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Sistem Jaringan Persampahan kota, Sistem Drainase, Sistem Jaringan Pejalan Kaki, Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, dan Sistem Jaringan prasarana lainnya.

Kawasan strategis yang ditetapkan di Kota Bengkulu meliputi kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kota. Kawasan strategis provinsi meliputi:

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dan daya dukung lingkungan hidup yang berupa BAITARITAM meliputi Pulau Baai – Tapak Padri – Sungai Hitam;

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera. Kawasan strategis kota adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa kawasan perkotaan lama di Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Sungai Serut, dan Kecamatan Ratu Samban. Rencana tata ruang untuk kawasan strategis kota akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Tabel 2. 77 Matriks Indikator Gambaran Umum Kota Bengkulu

No	Indikator	2021	2022	2023
Aspek Geografi dan Demografi				
Geografi				
Potensi Pengembangan Wilayah				
1	Luas Panen (Ha) Padi	1.218,00	1.231,43	1.003,90
2	Produktivitas (Ku/Ha) Padi	50,34	48,62	47,85
3	Produksi (ton) Padi	6.132,00	5.986,71	4.803,91
4	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah Semusim (kg)	10.893	8.904	5.410
5	Produksi Tanaman Biofarma (kg)	19.511	14.221	16.415
6	Jumlah Wisatawan	223.671	202.976	377.398
7	Rata-rata Lama Menginap (Malam)	1,38	1,33	1,28
8	Tingkat Penghunian Kamar	38,66	40,10	44,88
Wilayah Rawan Bencana				
9	Indeks Risiko Bencana	147,5	143,88	143,88
Ketahanan Pangan				
10	Indeks Ketahanan Pangan	67,82	65,29	75,68
Lingkungan Hidup				
11	Jumlah Sampah yang ditangani (m ³ /hari)	453	453	174
12	Indeks Kualitas Air	44,12	45,00	37,78
13	Indeks Kualitas Udara	88,70	88,10	90,65
14	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	25,22	25,22	27,93
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,04	58,12	57,04
Demografi				
16	Jumlah Penduduk	378.600	384.830	391.120
Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
Kesejahteraan Ekonomi				
17	Inflasi	2,42	5,92	3,09
18	<i>Gini Ratio</i>	0,38	0,37	0,38
19	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,47	5,69	5,53
Kemiskinan dan Pengangguran				
20	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	740.612	785.905	810.507
21	Jumlah Penduduk Miskin(ribu)	66,94	59,43	56,1
22	Persentase Penduduk Miskin	17,89	15,73	14,71
23	Indeks Kedalaman Kemiskinan	3,31	3,21	2,84
24	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,87	0,90	0,79
25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,42	66,29	66,61

No	Indikator	2021	2022	2023
26	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,35	6,15	5,04
Indeks Pembangunan Manusia				
27	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,49	82,93	83,38
Kesejahteraan Sosial				
28	Indeks Pembangunan Kebudayaan	100	100	100
Pemberdayaan Perempuan				
29	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,77	96,07	96,07
30	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,67	77,54	77,70
Aspek Daya Saing Daerah				
Daya Saing Ekonomi Daerah				
PDRB				
31	PDRB ADHB Industri Pengolahan (Miliar Rupiah)	816	862	888,44
32	Total PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	24.975	28.090	30.811
33	PDRB ADHK Industri Pengolahan (Miliar Rupiah)	509	522	530,82
34	Total PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	15.833	16.734	17.659
35	PDRB ADHB Per Kapita (Ribu Rupiah)	65.943	72.992	78778
36	PDRB ADHK Per Kapita (Ribu Rupiah)	41.805	43.474	45.150
37	Pengeluaran Per Kapita (ADHB)	24.974,93	28.090,43	30.811,41
38	Pengeluaran Per Kapita (ADHK)	15.833,19	16.833,94	17.658,93
Nilai Tukar				
39	Nilai Tukar Petani (NTP)	132,56	134,14	146,84
40	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,89	105,76	na
Industri				
41	Jumlah UMKM	44.706	44.706	44.705
42	Jumlah Industri Kecil Menengah	1403	1488	1580
Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)				
Pendidikan				
43	Rata-rata Lama Sekolah	11,8	11,82	11,83
44	Harapan Lama Sekolah	16,03	16,04	16,06
45	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	106,68	108,93	105,72
46	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98,87	93,86	104,66
47	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,45	97,18	97,21

No	Indikator	2021	2022	2023
48	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	89,91	88,88	88,90
Kesehatan				
49	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	49	175	52
50	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,4	2,8	17
51	Jumlah Bayi Lahir	6.749	6.120	5.832
52	Berat Bayi Lahir Rendah	63	59	99
53	Gizi Kurang	115	72	67
54	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah	0,93	0,96	1,70
55	Persentase Gizi Kurang	1,7	1,18	1,15
56	Stunting (%)	22,1	12,9	6,7
57	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	73,94	74,18	74,43
58	Kepesertaan Jaminan Kesehatan (%)	71,06	77,25	80,64
Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah				
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
59	Jalan Kondisi Baik (km)	591,71	919,02	919,02
60	Kemantapan Jalan Kota (%)	87,36	98,57	98,57
61	Jembatan Kondisi Baik (Jumlah)	11	8	10
62	Luas Jaringan Irigasi (Ha)	293,00	398,86	398,86
63	Sanitasi Aman (%)	95,79	94,49	100,00
64	RTLH (Unit)	26	13	61
Daya Saing Iklim Investasi				
Angka Kriminalitas				
65	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	1423	1809	1809
66	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan	376	484	463
67	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	45,53	32,11	43,28
Aspek Pelayanan Umum				
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
68	Indeks Pengukuran Profesionalitas (IPP) ASN	n/a	60,13	na
69	Indeks e-Government	1,6	1,9	2,19
70	Peringkat Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1,6	1,9	2,19
71	SST (Satuan Sambungan Telepon)	-	-	-

No	Indikator	2021	2022	2023
72	Persentase jaringan internet untuk Instansi Pemerintah Daerah	70	80	100
73	Persentase informasi yang dapat diakses masyarakat	1350	1355	1480
74	Persentase PD yang menerapkan aplikasi <i>e-Government</i>	40	107	129
75	Persentase data pembangunan daerah yang terpublikasi	390	498	586
76	Rasio keamanan informasi Pemerintah Daerah	85	85	90
77	Persentase ruang publik terlayani internet memadai	6	0	0
78	Persentase OPD terlayani internet memadai	15	20	26

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

3.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Kota Bengkulu

Permasalahan sering timbul dalam penerapan rencana pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya "*expectation gap*" antara rencana pembangunan seperti RTRW, RPJM, dan RPJP dengan kinerja pembangunan yang dicapai saat ini. Perbedaan antara target pembangunan yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun menimbulkan adanya *gap*. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan maka permasalahan pembangunan daerah yang muncul harus diidentifikasi agar dapat dicarikan solusinya. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa kekuatan (potensi sumber daya) yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan kelemahan yang belum dapat diatasi, serta peluang yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan ancaman dari luar daerah yang belum diantisipasi. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah perlu diidentifikasi terlebih dahulu agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Keakuratan identifikasi permasalahan pembangunan daerah diharapkan mampu menemukan pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan pada penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah. Rumusan permasalahan pembangunan ini menjadi dasar penyusunan program prioritas pembangunan daerah Kota Bengkulu dalam jangka waktu 20 tahun (2025-2045) mendatang. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan konsekuensi dari penerapan konsep desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi di Indonesia mulai dilaksanakan sejak tahun 1999 dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir adalah UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut UU No. 9 Tahun 2015 Pasal 1, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan daerah otonom terbagi atas dua, yaitu pertama urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Urusan pemerintahan harus masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pembangunan pada RPJMD Tahun 2019-2023 serta evaluasi RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut.

3.1.1. Pelayanan Dasar yang Belum Optimal

1. Pendidikan

Salah satu permasalahan pendidikan adalah belum optimalnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI/Paket A tahun 2023 yaitu 97,21 %, sedangkan APM Tingkat SMP/MTs/Paket B yaitu 88,90 %, menunjukkan adanya lulusan SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTS. Hal ini juga terlihat pada persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pendidikan ditamatkan yaitu: a) Tidak mempunyai Ijazah 5.02% (2022), b) SD/MI/Paket A/SDLB 12.11% (2023), dan c) SMP/MTS/Paket B/SMPLB 17.72% (2023).

Meskipun terjadi peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dari 11,79 tahun (2020) menjadi 11,83 tahun (2023) dan Harapan Lama Sekolah dari 16,02 tahun (2020) menjadi 16,06 tahun (2023), angka-angka ini belum mencerminkan pencapaian pendidikan yang berkualitas tinggi. Kenaikan yang relatif kecil dalam Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan belum tercapai secara signifikan.

2. Kesehatan

Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat adalah permasalahan kesehatan Kota Bengkulu. Hal ini ditunjukkan dengan Angka Kematian Bayi cakupan program tahun 2023 yang dilaporkan yaitu 17 per 1000 Kelahiran Hidup mengalami kenaikan sebesar 14,2 per 1000 Kelahiran Hidup, jika dibandingkan dengan tahun 2022, dimana Angka Kematian Bayi tahun 2022 yang dilaporkan sebesar 2,8 per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Kota Bengkulu tahun 2023 yang juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 52 per 100.000 kelahiran hidup, namun angka ini masih diatas target AKI Provinsi Bengkulu dan nasional. Selain itu persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap juga harus ditingkatkan, ditunjukkan dengan capaian di tahun 2023 sebesar 85,6%.

Isu strategis kedua dalam bidang kesehatan adalah kurangnya ketersediaan sarana prasarana fasilitas kesehatan dasar. Masih perlunya peningkatan status rumah sakit dari tipe C menjadi tipe B pada lebih dari 80% rumah sakit yang ada di Kota Bengkulu. Peningkatan tipe rumah sakit diharapkan dapat memacu dalam perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Isu lainnya yaitu ketersediaan tenaga kesehatan mengalami penurunan menjadi persoalan besar bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini dibarengi dengan persoalan distribusi berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata, sehingga di beberapa kecamatan masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas secara mudah dan cepat, selain itu kualitas dan kuantitas nakes dan nonnakes (keragaman nakes dan nonnakes) di pelayanan kesehatan dasar juga menjadi permasalahan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan jumlah tenaga dokter spesialis di Kota Bengkulu tahun 2023 berjumlah 30 orang, bertugas di 2 rumah sakit pemerintah. Rasio dokter spesialis terhadap 100.000 penduduk adalah 7,3 orang. Keadaan ini menunjukkan setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 7 orang dokter spesialis. Dengan demikian jumlah sumber daya manusia kesehatan dokter spesialis di Kota Bengkulu masih sangat kekurangan.

3.1.2. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Belum Optimal

Permasalahan pokok dalam pemenuhan infrastruktur dasar adalah belum optimalnya akses masyarakat terhadap layanan infrastruktur dasar. Hal ini dapat ditunjukkan dengan:

1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Kota Bengkulu belum optimal dalam kualitas drainase. Hal ini ditunjukkan oleh hanya 80% drainase yang dalam kondisi baik pada tahun 2023, menunjukkan bahwa masih ada sistem drainase di kota ini yang memerlukan perbaikan, untuk menghindari masalah banjir dan penggenangan air.

Permasalahan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Bengkulu sebagai berikut:

- Ketersediaan jaringan jalan belum optimal serta ketersediaan sarana prasarana di ruas jalan masih belum merata
- Tingkat kemacetan meningkat (terindikasi dari rendahnya proporsi jalan arteri)
- Layanan perizinan tata ruang yang belum optimal dan tingginya pelanggaran aturan pemanfaatan tata ruang
- Fasilitas layanan sanitasi layak belum merata di setiap perumahan dan pemukiman Kota Bengkulu
- Belum optimalnya sistem drainase perkotaan, jaringan drainase belum terhubung seluruhnya
- Belum optimalnya penggunaan moda transportasi umum dan perhubungan
- Belum optimalnya sistem pengelolaan sarana dan prasarana air bersih
- Air Layak: Hanya terdapat 58,3% rumah tangga di Kota Bengkulu yang memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun 2023.

2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan pokok perumahan rakyat dan kawasan pemukiman di Kota Bengkulu antara lain:

- Luas kawasan kumuh di Kota Bengkulu mencapai 13,59 Ha pada tahun 2023. Banyaknya kawasan kumuh di Kota Bengkulu mengindikasikan bahwa cakupan rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan masih belum optimal.
- Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana air bersih, sanitasi yang layak serta jalan lingkungan di Kota Bengkulu masih perlu terus ditingkatkan.
- Pembangunan perumahan baru yang kurang memperhatikan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang cukup sesuai aturan yang berlaku

3.1.3. Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal

1. Pelayanan Sosial

Masalah pokok sosial di Kota Bengkulu adalah masih tingginya angka kemiskinan. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di Kota Bengkulu sebesar 14,71% di atas Provinsi Bengkulu 14,04%. Pada tahun 2023 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Bengkulu sebesar 0,79.

Masalah lain adalah penanganan PPKS yang belum optimal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Bengkulu tahun 2023 adalah 25.419 jiwa dan PPKS yang tertangani 62,26%. Oleh karena itu, permasalahan dalam urusan sosial di Kota Bengkulu mencakup:

- Tingginya PPKS yang terdiri dari keluarga miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar di Kota Bengkulu
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial
- Belum optimalnya ketersediaan pelayanan sosial dalam menjangkau penerima layanan
- Belum optimalnya fasilitasi program keluarga harapan serta belum optimalnya pendampingan wanita rawan sosial ekonomi
- Permasalahan sosial di Kota Bengkulu dapat juga diakibatkan oleh kondisi darurat akibat bencana. Kota Bengkulu sebagai salah satu daerah yang masuk dalam Indeks Rawan Bencana (IRB) tinggi dalam peta IRBI yang dikeluarkan oleh BNPB. Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang belum memadai seperti bangunan kantor BPBD dan belum tersedianya gudang logistik dan peralatan perlu diprioritaskan serta sistem atau alat deteksi dini terjadinya bencana yang kurang juga perlu diprioritaskan
- Permasalahan dari aspek pencegahan bencana, yang terjadi yaitu belum berjalannya mekanisme pendirian bangunan melalui assesment dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) serta belum adanya sertifikat layak fungsi bangunan.

2. Tenaga Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan di Kota Bengkulu dapat terlihat dari indikator Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bengkulu Tahun 2023 berada pada angka 66.61%, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja belum atau tidak terlibat dalam pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bengkulu Tahun 2023 tercatat sebesar 5.04%, mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap angkatan kerja.

Masalah pokok selanjutnya rendahnya kualitas tenaga kerja. Persentase tenaga kerja yang berpendidikan SMP ke bawah di Kota Bengkulu, yakni sebesar 30%, menggambarkan bahwa masih banyaknya tenaga kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan rendah, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan produktivitas tenaga kerja. (Sumber: BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023). Uraian permasalahan tenaga kerja di Kota Bengkulu sebagai berikut:

- Peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang akan diikuti dengan peningkatan jumlah partisipasi angkatan kerja sehingga pembukaan lapangan kerja perlu diperluas
- Kebijakan penurunan pengangguran terbuka di Kota Bengkulu belum tepat dan belum mampu untuk memetakan dan menyelesaikan akar masalah tenaga kerja secara baik
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) cenderung stagnan mengindikasikan bahwa lapangan kerja yang tersedia belum mampu menampung angkatan kerja di Kota Bengkulu yang semakin besar
- Kurangnya investasi padat karya di Kota Bengkulu yang mampu meningkatkan TPAK secara berkesinambungan

- Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan sebagian besar angkatan kerja yang dapat terserap ke dunia kerja
- Rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dalam persaingan dengan tenaga kerja profesional dari daerah lain, bahkan dari negara lain akibat berlakunya perdagangan bebas dunia

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Bengkulu belum optimal dalam pemberdayaan gender. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender yang cenderung stagnan selama tiga tahun terakhir, tahun 2021 sebesar 77,67, 2022 sebesar 77,7 dan 2023 sebesar 77,7. Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bengkulu antara lain:

- Kualitas perempuan, yaitu kapasitas dan kecakapan hidup di Kota Bengkulu masih perlu ditingkatkan, terutama persiapan dalam partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi
- Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bengkulu, mencakup berturut-turut kasus perkosaan, pelecehan seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penganiayaan dan kekerasan dalam pacaran, *bully*, penelantaran hingga *femicide* (kekerasan yang berakhir pada kematian)
- Belum optimalnya perlindungan terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Bengkulu
- Belum optimal pendampingan, perlindungan terhadap perempuan dan anak
- Belum optimalnya kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak.

3.1.4. Belum Optimalnya Kewajiban Pemerintahan yang Bukan Pelayanan Dasar

1. Pangan

Belum optimalnya pola pangan harapan menjadi indikator yang menggambarkan kondisi pangan di Kota Bengkulu. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Bengkulu pada tahun 2022 adalah 82,5 dan pada tahun 2023 adalah 87,0, sedangkan nasional tahun 2023 adalah 94,10. Berdasarkan hal ini, permasalahan urusan pangan di Kota Bengkulu mencakup:

- Keterbatasan lahan pertanian dengan pengembangan pertanian perkotaan
- Belum optimalnya kerjasama antardaerah untuk ketersediaan cadangan pangan
- Menurunnya produktivitas tanaman pangan di Kota Bengkulu
- Tingginya laju alih fungsi lahan sawah dan lahan pertanian
- Belum berkembangnya hilirisasi produk hasil pertanian dan perikanan
- Belum optimalnya pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Bengkulu

2. Koperasi dan Usaha Kecil Mikro

Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan UMKM menjadi masalah pokok di Kota Bengkulu. Terdapat koperasi tidak aktif sebanyak 202 koperasi dari total 983 koperasi di Kota Bengkulu tahun 2023. Jumlah yang telah mengikuti pelatihan hanya 100 dari 44.705 UMKM yang ada di Kota Bengkulu. Berdasarkan hal ini, permasalahan koperasi dan usaha kecil mikro di Kota Bengkulu sebagai berikut:

- Rendahnya pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil Mikro (UKM)
- Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola UKM
- Rendahnya akses UKM permodalan ke sumber permodalan usaha
- Belum memadainya lembaga pendidikan khususnya yang fokus di bidang UKM

3. Penanaman Modal

Permasalahan penanaman modal di Kota Bengkulu sebagai berikut:

- Terbatasnya ruang berusaha Kota Bengkulu, menyulitkan untuk mendatangkan investor yang akan menanamkan modalnya, khususnya sektor industri
- Penurunan nilai investasi saat dan pasca pandemi berakibat pada penurunan nilai ekonomi di Kota Bengkulu
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung berinvestasi
- Belum optimalnya promosi potensi Kota Bengkulu untuk peningkatan investasi permodalan

4. Pertanahan

Permasalahan pertanahan di Kota Bengkulu sebagai berikut:

- Keterbatasan ketersediaan dan penyediaan lahan untuk investasi
- Masih terdapat anggota masyarakat yang belum memiliki dokumen legal (sertifikat) atas kepemilikan lahan
- Konflik atas pendudukan lahan-lahan aset pemerintah atau BUMN

3.1.5. Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas SDM yang Belum Optimal

1. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kota Bengkulu antara lain:

- Kesadaran masyarakat melaporkan peristiwa kependudukan
- Penduduk urban tanpa dokumen kependudukan
- Sinkronisasi data kependudukan antarperangkat daerah dalam pemanfaatan untuk pencapaian sasaran pembangunan.

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Persoalan utama pengendalian penduduk di Kota Bengkulu yaitu belum optimalnya pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) di 2023 Kota Bengkulu. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persentase KB Aktif tahun 2023 sebesar 66,16%. Tingkat kelahiran penduduk relatif tinggi terindikasi dari angka *Total Fertility Rate* (TFR) Kota Bengkulu tahun 2022 yaitu 2,4 lebih besar dibandingkan Standar TFR 2,1. Permasalahan lainnya terkait kependudukan di Kota Bengkulu dalam 20 tahun mendatang adalah 1) belum tersedianya dokumen kebijakan pengendalian penduduk jangka panjang, 2) tingkat urbanisasi dan migrasi penduduk antardaerah, dan 3) belum berjalannya implementasi kemitraan pembangunan dengan daerah lain untuk mencegah arus urbanisasi.

3. Statistik

Permasalahan urusan statistik di Kota Bengkulu berkaitan dengan:

- Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral
- SDM pengelola data dan informasi statistik
- Rendahnya literasi masyarakat terhadap data dan informasi

4. Perpustakaan

Permasalahan urusan perpustakaan di Kota Bengkulu sebagai berikut:

- Rendahnya kapasitas pengelola perpustakaan terindikasi dari sedikitnya pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat kompetensi
- Rendahnya animo masyarakat Kota Bengkulu melakukan kunjungan ke perpustakaan
- Rendahnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat di Kota Bengkulu
- Belum optimalnya jangkauan pelayanan perpustakaan, dan kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan

5. Kearsipan

Permasalahan urusan kearsipan di Kota Bengkulu sebagai berikut:

- Belum optimalnya pengelolaan e-arsip di Perangkat Daerah (PD)
- Belum optimalnya keterbukaan informasi publik dan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik
- Belum optimalnya sarana dan prasarana layanan informasi kearsipan.
- Kurangnya SDM kearsipan.

6. Kepemudaan dan Olahraga

Rendahnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan di daerah. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pembinaan, keikutsertaan atlet untuk kompetisi ke luar daerah, kurangnya penyelenggaraan kompetisi olahraga, serta rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga. Permasalahan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Bengkulu berkaitan dengan antara lain:

- Rendahnya perhatian terhadap urusan kepemudaan
- Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan
- Belum optimalnya pembinaan kewirausahaan pemuda
- Minimnya prestasi olahraga atlet muda
- Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga

7. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pokok ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang terjadi di Kota Bengkulu antara lain mencakup:

- Tingginya angka kriminalitas (kejahatan) di Kota Bengkulu menjadi salah satu fokus perhatian baik pemerintah maupun aparat keamanan. Meskipun terjadi peningkatan penyelesaian tindak kejahatan di Kota Bengkulu, namun jumlah pelaporan tindak kejahatan yang dialami masyarakat relatif tetap. Ini menjadi salah satu indikasi perlu mendorong kesadaran masyarakat dan juga upaya proaktif aparat agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengatasi kejahatan
- Tingginya pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di Kota Bengkulu

- Belum optimalnya penyelesaian kasus ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (K3) yang angkanya semakin meningkat tiap tahun. Kondisi ini dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan penegakan Perda K3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi Perda tentang pentingnya ketenteraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kota Bengkulu
- Di sisi lain persoalan K3 di Kota Bengkulu yaitu tingkat konflik sosial dapat memengaruhi perkembangan K3. Kondisi ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya ruang mediasi/dialog antarkelompok masyarakat dan belum maksimalnya sistem pengamanan berbasis komunitas seperti sistem deteksi dini konflik sosial

3.1.6. Rendahnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup di Kota Bengkulu, dapat dilihat pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 di Kota Bengkulu sebesar 57,04 (Sedang), sedangkan Provinsi Bengkulu 72,10 (Baik) dan kualitas air menurun akibat pencemaran dan sistem pengelolaan air limbah (dibuktikan dengan Indeks kualitas Air yang hanya 37,78).

Hal lain adalah masih belum optimalnya penanganan dan pengelolaan sampah. Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul yang *overload* untuk menampung sampah di Kota Bengkulu karena belum optimalnya sistem pengelolaan sampah di lingkungan permukiman, kurang berfungsinya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan kurangnya pendampingan pengelolaan sampah mandiri.

Permasalahan lingkungan hidup di Kota Bengkulu yang dapat diidentifikasi terkait kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Air

- Pencemaran sungai
Sungai di Kota Bengkulu, seperti Sungai Bangkahulu, mengalami pencemaran akibat pembuangan limbah domestik, industri, dan pertanian. Limbah ini bisa berupa bahan kimia, sampah plastik, serta limbah organik yang menyebabkan menurunnya kualitas air dan berdampak pada ekosistem sungai.
- Ketersediaan air bersih
Terbatasnya akses air bersih di beberapa kawasan, terutama di daerah pinggiran kota, memperparah permasalahan air. Kondisi ini juga diperburuk oleh musim kemarau yang panjang.

2. Kualitas Udara

- Polusi udara
Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas industri di Kota Bengkulu berkontribusi pada penurunan kualitas udara. Emisi karbon dari kendaraan dan asap industri menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan, seperti PM2.5 dan PM10, yang dapat membahayakan kesehatan warga.
- Pembakaran lahan
Pada musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan di sekitar Provinsi Bengkulu juga menyumbang terhadap kabut asap yang memperburuk kualitas udara.

3. Kualitas Tanah

- Degradasi tanah

Praktik pertanian yang intensif, penebangan liar, khususnya di hulu Sungai Bangkahulu, dan pembangunan yang kurang terencana menyebabkan degradasi kualitas tanah di Kota Bengkulu. Tanah yang tererosi dan tercemar bahan kimia pertanian mengurangi produktivitas lahan dan memperparah risiko longsor di daerah berbukit.

- Kontaminasi tanah

Penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan dalam pertanian serta pembuangan limbah industri dapat menyebabkan kontaminasi tanah yang berpotensi merusak ekosistem lokal dan kesehatan masyarakat.

4. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Keterbatasan RTH

Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai (12,1%), sesuai amanah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa untuk mencapai luas ideal RTH, setiap wilayah membutuhkan 30% (20% RTH Publik dan 10% RTH Privat) dari luas total wilayah. Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi 20% RTH Publik. Kota Bengkulu mengalami keterbatasan dalam penyediaan ruang terbuka hijau. Alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan komersial mengurangi kawasan hijau yang seharusnya menjadi area resapan air dan paru-paru kota.

- Pengelolaan yang kurang efektif

Ruang terbuka hijau yang ada tidak dikelola dengan optimal. Banyak taman kota dan area hijau tidak terawat, yang seharusnya bisa menjadi tempat rekreasi sekaligus mitigasi dampak perubahan iklim.

Solusi untuk permasalahan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk:

- Merancang kebijakan berkelanjutan serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
- Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup.
- Mengefektifkan kebijakan penanggulangan pencemaran lingkungan yang berkesinambungan di Kota Bengkulu.
- Menyiapkan *blueprint* jangka panjang pengelolaan lingkungan hidup.

3.1.7. Konektivitas dan Pengembangan Infrastruktur Strategis Masih Terbatas

1. Perhubungan

Masalah pokok pada bidang perhubungan diantaranya belum optimalnya sistem transportasi, kurangnya sarana dan prasarana yang ramah pejalan kaki dan berkebutuhan khusus, dan peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Bengkulu. Hal ini dapat dilihat pada fluktuasi jumlah kasus kecelakaan, meskipun jumlahnya terus menurun dari tahun ke tahun, dengan 515 kasus kecelakaan pada tahun 2019 dan terakhir sebanyak 305 kasus di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal keselamatan lalu lintas.

Hal ini ditambah dengan kurangnya informasi mengenai infrastruktur pendukung keselamatan lalu lintas dan kondisi lahan parkir yang tidak memadai, yang dapat berkontribusi terhadap masalah keselamatan dan kemacetan. Permasalahan urusan perhubungan di Kota Bengkulu antara lain:

- Belum terintegrasinya sistem transportasi
- Masalah kemacetan karena peningkatan jumlah kendaraan
- Belum optimalnya pengembangan mode transportasi umum dan terminal terpadu
- Lemahnya pengawasan dan penertiban angkutan umum Kota Bengkulu
- Belum meratanya infrastruktur pendukung keselamatan lalu lintas
- Kurangnya penyediaan lahan parkir
- Belum ramahnya sarana dan prasarana untuk pejalan kaki dan berkebutuhan khusus

2. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Komunikasi dan Informatika di Kota Bengkulu antara lain:

- Belum optimalnya transformasi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel berbasis digital
- Belum optimalnya sarana dan prasarana telekomunikasi di kelurahan
- Belum optimalnya standar keamanan informasi di pemerintah daerah
- Kurangnya SDM dengan keahlian TI dan komunikasi

3.1.8. Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata Masih Belum Optimal

Urusan pilihan Kota Bengkulu meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kekhasan, kondisi, serta potensi unggulan di Kota Bengkulu. Beberapa urusan pilihan Kota Bengkulu adalah: pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, dan perindustrian.

Kontribusi sektor-sektor tersebut masih minim dan belum optimal. Hal ini dikarenakan produk unggulan daerah belum memiliki nilai tambah yang baik, sehingga belum memberikan kontribusi yang optimal dalam pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu. Selain itu, sektor pariwisata juga potensial untuk dikembangkan namun belum dapat dikelola dengan baik. Kota Bengkulu memiliki potensi dan sumber daya wisata yang belum memberikan manfaat yang optimal. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto relatif kecil. Permasalahan utama yang dihadapi adalah terkait dengan belum tersedianya konsep dan arahan implementatif pembangunan pariwisata Provinsi Bengkulu, sehingga upaya-upaya pembangunan cenderung tidak terintegrasi. Diperlukan satu rencana yang komprehensif dan implementatif untuk setiap aksi pembangunan pariwisata dalam jangka waktu tertentu. Di samping itu, permasalahan lain di sektor wisata adalah terkait dengan aksesibilitas yang terbatas, terbatasnya pengelolaan dan manajemen atraksi, terbatasnya kualitas SDM pariwisata serta promosi dan pemasaran objek wisata potensial yang belum optimal.

Berdasarkan kondisi perkembangannya, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi di Kota Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertanian

Masalah pokok pada bidang pertanian adalah menurunnya produksi dan produktivitas padi. Hal ini dapat dilihat pada terjadinya penurunan produksi padi dari tahun 2021-2023, yaitu tahun 2021 sebesar 6.132 ton, 2022 sebesar 5.986 ton, dan 2023 sebesar 4.803 ton. Penurunan produktivitas padi juga terjadi dari tahun 2021-2023, yaitu tahun 2021 sebesar 50,34 Ku/Ha, 2021 sebesar 48,62 Ku/Ha dan 2023 sebesar 47,85 Ku/Ha.

Berdasarkan hal di atas, permasalahan urusan pilihan pertanian di Kota Bengkulu adalah:

- Menurunnya kontribusi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan
- Menurunnya produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan
- Rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani
- Belum optimalnya akses terhadap bantuan permodalan
- Kurangnya standarisasi produk pertanian

2. Pariwisata

Belum optimalnya pengembangan pariwisata di Kota Bengkulu. Hal ini dapat ditunjukkan dari kontribusi PDRB sektor pariwisata tahun 2023 hanya 2,13% dari total PDRB. Kemudian masih rendahnya Rata-rata Lama Menginap pada tahun 2023 yaitu 1,28 malam dan masih rendahnya Rata-Rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang di Kota Bengkulu pada tahun 2023 yaitu 44,88%.

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan urusan pilihan pariwisata di Kota Bengkulu adalah:

- Belum tersedianya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
- Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB: 376,59 miliar dibanding total PDRB ADHK 17.658 miliar rupiah (2,13%) (sektor akomodasi dan makan minum)
- Rendahnya kualitas infrastruktur dan sarana prasarana destinasi wisata
- Belum optimalnya kerja sama antarpihak dan penggunaan media pemasaran
- Belum optimalnya pengembangan destinasi dan pemasaran wisata
- Belum optimalnya pemberdayaan kelompok sadar wisata
- Belum maksimalnya pertumbuhan dan pengembangan pariwisata ekonomi kreatif
- Minimnya Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW)

3. Perikanan

Kurangnya pengembangan potensi perikanan serta tingkat konsumsi ikan rendah menjadi masalah pokok Kota Bengkulu. Hal ini ditunjukkan dengan produksi perikanan di Kota Bengkulu pada tahun 2021 adalah 41.747,65 ton, menurun dari tahun 2020 yang sebesar 42.740,97 ton. Hal ini menunjukkan potensi peningkatan produktivitas dan pengelolaan sumber daya perikanan yang belum teroptimalkan. Kurangnya kapasitas permintaan pasar terhadap produk olahan hasil perikanan menjadi faktor yang memengaruhi kesejahteraan nelayan. Ini mengindikasikan perlu adanya pengembangan dan promosi produk olahan perikanan yang lebih efektif. Konsumsi ikan di Kota Bengkulu dari tahun 2017 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 konsumsinya stagnan di angka 52,20 kg/kapita/tahun. Ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat, baik melalui edukasi kesehatan maupun promosi produk perikanan lokal.

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan urusan pilihan kelautan dan perikanan di Kota Bengkulu adalah:

- Pemanfaatan potensi perikanan tangkap yang belum optimal
- Kontribusi sub-sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB yang belum optimal
- Perubahan kebijakan dan pengelolaan urusan kelautan dan perikanan
- Kurangnya armada/kapal penangkap ikan dan sarana prasarana
- Terbatasnya kapasitas SDM nelayan
- Rendahnya pengembangan budidaya perikanan

4. Perdagangan

Sektor perdagangan di Kota Bengkulu tidak berkembang. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran stagnan di angka 20% dalam lima tahun terakhir. Permasalahan urusan pilihan perdagangan di Kota Bengkulu adalah:

- Stok dan distribusi barang perdagangan yang belum lancar
- Rendahnya kapasitas SDM pedagang kecil dan menengah
- Jaringan pemasaran produk perdagangan yang belum luas
- Terbatasnya akses permodalan dan penataan PKL
- Pembinaan PKL yang belum optimal
- Belum adanya penerapan digitalisasi sistem penerimaan retribusi pedagang
- SDM tenaga fungsional penerapan yang belum memadai
- Akses pemasaran dan kualitas komoditas ekspor yang belum optimal

5. Perindustrian

Sektor Perindustrian di Kota Bengkulu juga tidak berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan yang mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Permasalahan urusan pilihan perindustrian di Kota Bengkulu adalah:

- Belum adanya pola kluster industri
- Rendahnya kemampuan akses permodalan
- Rantai pasok bahan baku yang belum optimal
- Kualitas berdaya saing rendah
- Kurangnya keterampilan dan kreativitas pelaku usaha
- Belum optimalnya akses pemasaran secara digital

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, permasalahan-permasalahan pembangunan Kota Bengkulu dapat dirangkum ke dalam beberapa poin, diantaranya:

1. Belum optimalnya pembangunan manusia
2. Kemiskinan yang masih tinggi
3. Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan dan rasio gini masih tinggi
4. Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan pariwisata
5. ASN yang belum sepenuhnya berkualitas dan profesional (hasil evaluasi capaian indikator RPJPD 2007-2027 periode 2019-2023 dengan indikator "Indeks Persepsi Korupsi" yang tidak tercapai)
6. Belum optimalnya pelayanan publik (hasil evaluasi capaian indikator RPJPD 2007-2027 periode 2019-2023 dengan indikator "Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik" yang tidak tercapai)

7. Rendahnya pengelolaan lingkungan hidup (hasil evaluasi capaian indikator RPJPD 2007-2027 periode 2019-2023 dengan indikator "Indeks Kualitas Air" yang tidak tercapai)
8. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dasar (hasil evaluasi capaian indikator RPJPD 2007-2027 periode 2019-2023 dengan indikator "Angka Kecelakaan" yang tidak tercapai)
9. Terbatasnya konektivitas dan pengembangan infrastruktur ekonomi strategis
10. Kurangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (hasil evaluasi capaian indikator RPJPD 2007-2027 periode 2019-2023 dengan indikator "Indeks Kapasitas Fiskal" yang tidak tercapai)

3.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Kondisi ini berdampak signifikan bagi suatu daerah atau masyarakat di masa datang sehingga perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Rumusan isu-isu strategis dapat diperoleh melalui analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis di Kota Bengkulu dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, antara lain yaitu:

1. Permasalahan pembangunan di Kota Bengkulu,
2. Dinamika internasional, nasional, regional, Provinsi Bengkulu serta kabupaten lain berdekatan yang mempengaruhi pembangunan Kota Bengkulu, dan
3. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RPJPD Kota Bengkulu.

3.2.1. Isu-Isu Internasional

Pemulihan Ekonomi Global pasca pandemi Covid19 masih menjadi fokus global bagi semua negara di dunia. Prospek ekonomi di kawasan Asia Pasifik tetap kuat, dan kawasan ini terus menjadi kawasan yang paling dinamis dalam ekonomi global. Hal ini ditandai dengan adanya pergeseran peran ekonomi kawasan Asia-Pasifik dalam perekonomian global baik jangka pendek prospeknya terus membaik. Dalam jangka menengah dan jangka panjang berbagai risiko penurunan mendominasi, kondisi keuangan global menegat, pergeseran ke arah kebijakan proteksionis, dan peningkatan ketegangan geopolitik. Dengan jumlah ketidakpastian ini, kebijakan ekonomi makro perlu konservatif dan ditujukan untuk membangun bantalan dan meningkatkan ketahanan. Pemerintah perlu terus mendorong reformasi struktural untuk mengatasi tantangan tersebut. Prospek pertumbuhan jangka panjang untuk Asia Pasifik dipengaruhi oleh demografi, produktivitas dan kebangkitan ekonomi digital.

Pada tahun 2045, penduduk dunia diperkirakan 9,45 miliar, bertambah 2,1 miliar dari tahun 2015. Tren demografi global mendorong urbanisasi, arus migrasi, dan penduduk usia lanjut. Penduduk dunia di perkotaan diperkirakan meningkat menjadi 65 persen (2045) dengan 95 persen pertambahan terjadi di negara berkembang. Pembangunan perkotaan berperan meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan produktivitas output negara berkembang tahun 2050 diperkirakan mencapai 71 persen dari total output dunia dengan Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen. Investasi SDM dan

infrastruktur serta reformasi struktural dan iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing, dan berkesinambungan. Sampai tahun 2045, perdagangan global diperkirakan tumbuh 3,4 persen per tahun. Negara berkembang menjadi poros perdagangan dan investasi dunia dengan pertumbuhan enam persen per tahun. Pada tahun 2050, jumlah *middle* dan *upper income class* diperkirakan lebih dari 84 persen atau sekitar 8,1 miliar orang. Asia dan Amerika Latin akan memiliki jumlah *middle* dan *upper income class* terbesar.

Perdagangan intra-Asia meningkat dan investasi asing langsung ke dan antarnegara berkembang berlanjut. Meningkatnya peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan Sumber Daya Alam (SDA). Ketersediaan SDA diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan yang meningkat meskipun teknologi akan meningkatkan efisiensi SDA. Berdasarkan ekonomi digital, tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, *wearable devices*, otomatisasi dan robotik, serta *artificial intelligence*.

3.2.2. Isu-Isu Nasional

Di tahun 2045, Indonesia diharapkan akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju mencapai USD 30.300 per kapita, memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di dunia internasional, serta kemiskinan mendekati 0 persen dan ketimpangan berkurang. Di tengah kecenderungan global yang didorong disrupsi teknologi, Indonesia harus mampu menciptakan perubahan berkelanjutan melalui reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi, memanfaatkan kemajuan teknologi, dan meningkatkan daya saing ekonomi mampu mendorong ekonomi Indonesia pada periode 2025-2045 untuk tumbuh 5,7 persen per tahun.

Indonesia diperkirakan menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045 (Bappenas, 2017; Price Water House Copper, 2017). Untuk mencapai itu, Indonesia perlu dibekali dengan berbagai kekuatan antara lain:

Pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan angkatan kerja sebesar 146,6 juta. Pertumbuhan penduduk masih mendorong terjadinya pertumbuhan angkatan kerja baru yang akan yang tinggal di perkotaan sehingga pada tahun 2035 hampir 90% penduduk Jawa tinggal di perkotaan, dengan konsentrasi penduduk perkotaan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mencapai 76 juta orang. Hal ini tidak lepas dari derasnya arus urbanisasi dan tumbuhnya kota-kota kecil dan sedang di seluruh Indonesia. Kota-kota besar dan daerah *peri urban* akan membentuk *mega urban* sehingga perluasan lapangan kerja menjadi fokus penting.

Kedua, optimalisasi peluang bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia berada pada usia produktif besar dengan tingkat rasio ketergantungan (*dependency ratio*) relatif rendah. Dalam jangka panjang, *Total Fertility Rate* (TFR) dijaga pada tingkat 2,1 agar penduduk dapat tumbuh seimbang, maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 mencapai 319 juta. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen dari penduduk Indonesia pada tahun 2045.

Ketiga, letak wilayah Indonesia yang strategis sangat menguntungkan dalam perdagangan internasional. Perubahan geopolitik dan perubahan geoekonomi dunia, dimana negara-negara di Benua Asia dan kawasan ASEAN mulai memainkan peran penting dan strategis dalam perekonomian dan politik dunia. Selain itu, pengaruh musim menjadikan Indonesia menjadi negara agraris dengan sumber daya alam berlimpah sebagai salah negara dengan sumber pangan besar.

Keempat, melimpahnya sumber daya alam dengan kekayaan cadangan mineral yang sangat besar, di mana Indonesia menjadi peringkat pertama cadangan Nikel (21 juta MT), Bauksit peringkat ke-6 (1 miliar MT), Tembaga peringkat ke-7 (24 juta MT), Timah peringkat ke-1 (0,8 juta MT).

Namun demikian, Indonesia tetap perlu bersiap menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul, yang terkait dengan peningkatan produktivitas SDM, peningkatan produktivitas modal, perubahan iklim, hingga tantangan stabilitas global ke depan yang semakin dinamis. Pesatnya perkembangan ini akan membawa perubahan pada semua bidang pembangunan dan kehidupan masyarakat. Tren teknologi ke depan yaitu teknologi digital (*internet seluler*, otomatisasi, dan *cloud technology*), teknologi yang mengurangi keterbatasan fisik dan jarak (*internet of things (IoT)*), transportasi dan distribusi, serta *nano technology*, teknologi energi terbarukan (surya, angin, nuklir, biomas, dan geothermal), dan teknologi kesehatan (genetika, pengobatan dan pemulihan, serta pelayanan kesehatan).

Kemajuan teknologi ini disamping meningkatkan efisiensi dan kesempatan baru, juga akan berdampak pada kebutuhan spesialisasi tenaga kerja. Pekerjaan yang sifatnya rutin, manual, dan kognitif akan semakin berkurang. Indonesia akan memanfaatkan kemajuan teknologi bagi pembangunan dengan meminimalkan disrupsi. Teknologi digital telah mengubah cara dan gaya hidup kekinian. Perpaduan Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* hendaknya dapat dijadikan peta jalan pembangunan nasional Indonesia. Pengembangan industri-industri strategis nasional termasuk industri digital, yang berbasis *artificial intelligence (AI)*, *internet of things (IoT)*, dan pembelajaran mesin serta berorientasi pada pengembangan SDM Indonesia, keuntungan, dan keberlanjutan.

3.2.3. Isu-Isu Provinsi Bengkulu

Sejumlah isu di tingkat Provinsi Bengkulu saling terkait dengan perkembangan isu-isu di tingkat internasional dan di tingkat nasional. Di Provinsi Bengkulu isu-isu mencakup juga secara umum isu-isu yang terjadi di kabupaten bersebelahan dengan Kota Bengkulu seperti Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma. Isu-isu dimaksud antara lain isu daya saing daerah menjadi salah satu tujuan penting dalam proses pembangunan sebuah daerah. Walaupun setiap daerah memiliki karakteristik, potensi dan permasalahan yang berbeda namun setiap daerah saling bersaing terutama dalam tiga hal. *Pertama*, menarik tenaga kerja yang terdidik dan terampil. *Kedua*, menarik investasi baik para investor yang berasal dari dalam maupun luar negeri. *Ketiga* menarik para pengusaha (*entrepreneur*) untuk mengembangkan usaha di daerah tersebut.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi dengan tingkat daya saing yang rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Tingginya angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketimpangan (*gini ratio*) menjadi salah satu indikator rendahnya daya saing Provinsi Bengkulu. Beberapa aspek yang perlu dicermati sebagai prioritas dalam meningkatkan daya saing di Provinsi Bengkulu antara lain aspek kelembagaan, aspek

ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Peningkatan daya saing daerah melalui kebijakan pemerintah dapat diarahkan pada perbaikan kelembagaan yang salah satunya dengan membangun kapasitas dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.

Pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu di atas 5,0 persen. Pertumbuhan ekonomi diarahkan lebih berkualitas dan inklusif yang ditunjukkan terutama kemampuan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan dan ketimpangan serta terjaganya inflasi di tingkat yang relatif rendah. Selain itu, kontribusi ekspor dan peningkatan kinerja ekspor sektor primer menopang dan mendorong penguatan penerimaan daerah. Upaya peningkatan daya saing dan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan juga tidak dapat dilepaskan dari penanganan masalah-masalah lain yang menjadi isu-isu strategis daerah lainnya antara lain 1) Peningkatan daya saing ekonomi, 2) Kemiskinan, kesejahteraan dan daya saing SDM, 3) Pengembangan konektivitas serta pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, 4) Hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan pariwisata yang komprehensif dan kompetitif, serta 5) Peningkatan kinerja birokrasi.

3.2.4. Isu-isu Kota Bengkulu

Isu-isu pembangunan yang strategis berkembang di tingkat lokal Kota Bengkulu baik langsung maupun tidak langsung juga saling terkait dengan perkembangan isu-isu di tingkat nasional dan di Provinsi Bengkulu. Sejumlah isu strategis pembangunan di Kota Bengkulu yang sangat berperan dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan antara lain:

Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah. Kota Bengkulu kurun waktu terakhir telah mencapai pertumbuhan ekonomi baik dengan angka tingkat kemiskinan relatif rendah hingga akhir 2019. Saat sebelum pandemi Covid-19 semua indikator ekonomi berada di jalur pertumbuhan inklusif. Namun, sejak Covid-19 angka ketimpangan wilayah semakin lebar meskipun ekonomi tumbuh dan angka kemiskinan menurun. Isu pertumbuhan ekonomi inklusif yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara luas dan merata. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi inklusif akan mampu mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan lapangan pekerjaan.

Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di Kota Bengkulu sebesar 14,71%, Provinsi Bengkulu 14,04%, nasional 9,36%. Pada tahun 2023 tingkat penduduk miskin ekstrem di Kota Bengkulu sebesar 2,76%.

Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bengkulu tahun 2023 berada pada angka 66,61%, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja belum atau tidak terlibat dalam pasar kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bengkulu tahun 2023 tercatat sebesar 5,04%, mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap angkatan kerja.

Persentase tenaga kerja yang berpendidikan SMP ke bawah di Kota Bengkulu, yakni sebesar 30%, menggambarkan bahwa masih banyaknya

tenaga kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan rendah, sehingga dapat memengaruhi kualitas dan produktivitas tenaga kerja. (Sumber: BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023)

Isu strategis lainnya yang perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan Kota Bengkulu ke depan yaitu tata kelola pemerintahan. Kualitas pemerintahan menurut Liu *et al.*, (2018) yang baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan pemerintah memiliki kekuatan untuk menerapkan peraturan dan kebijakan yang bersifat pro rakyat miskin dan melindungi masyarakat dari monopoli kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu. Kualitas pemerintahan yang baik dapat terlihat dari indikasi diantaranya perilaku korupsi, stabilitas politik, akuntabilitas, kebebasan berpendapat, serta aspek keamanan masyarakat. Selain isu-isu strategis tersebut perencanaan pembangunan Kota Bengkulu ke depan perlu mencermati isu-isu strategis lainnya, antara lain, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

APM tingkat SD/MI/Paket A Tahun 2023 yaitu 97,24%, sedangkan APM Tingkat SMP/MTs/Paket B yaitu 88,90%, menunjukkan adanya lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK. Persentase Penduduk 15 Tahun keatas menurut pendidikan ditamatkan yaitu:

1. Tidak mempunyai Ijazah 5.02 % (2022)
2. SD/MI/Paket A/SDLB 12.11 % (2023)
3. SMP/MTS/Paket B/SMPLB 17.72 % (2023)

Angka Kematian Bayi Kota Bengkulu tahun 2023 yaitu 17 per 1000 kelahiran hidup mengalami kenaikan sebesar 14,2 per 1000 kelahiran hidup dari tahun sebelumnya. Angka Kematian Ibu Kota Bengkulu 52 orang per 100.000 kelahiran hidup.

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat dilihat pada hanya 80% drainase dalam kondisi baik, berkontribusi pada masalah banjir dan genangan air. Terdapat 7,79% rumah tangga tanpa akses air minum layak. Luas kawasan kumuh di Kota Bengkulu mencapai 13,59 Ha pada tahun 2023, menunjukkan perlunya upaya pembenahan dan pengembangan kawasan ini. Banyaknya kawasan kumuh di Kota Bengkulu mengindikasikan bahwa cakupan rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan masih belum optimal.

3.2.5. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Kota Bengkulu.

Isu strategis di Kota Bengkulu dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bengkulu mencakup tiga aspek yaitu Aspek Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan, Aspek Sosial Ekonomi dan Aspek Lingkungan. Berdasarkan hasil diskusi dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para *stakeholders* dirumuskan isu-isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bengkulu sebagai berikut:

Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Perbaikan tata kelola kelembagaan pemerintah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing Kota Bengkulu. Upaya transformasi digitalisasi dan integrasi data layanan yang belum berjalan menyebabkan kualitas layanan tidak prima karena kurangnya data dan informasi yang akurat dan terkini. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah menjadi belum optimal memberikan pelayanan publik kepada

masyarakat umum dan atau investor penanaman modal baik asing maupun daerah. Kondisi ini semakin diperberat dengan rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai ujung tombak pelayanan. Hal ini tercermin pada Indeks Tata Kelola seperti:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bengkulu Tahun 2022 yaitu CC
2. Indeks SAKIP Kota Bengkulu Tahun 2023 Yaitu B
3. Indeks SPBE Kota Bengkulu Tahun 2023 adalah 2,192
4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 sebesar 79,1 %

Persoalan pembangunan kapasitas Sumber Daya Manusia dapat diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Akibatnya dari semua kondisi ini, penerimaan pemerintah daerah menjadi tidak optimal menunjang tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan uraian tersebut isu-isu strategis lingkungan hidup di Kota Bengkulu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum dalam kebijakan pemerintah daerah
2. Belum optimalnya pelaksanaan birokrasi pada tata kelola pemerintahan dalam pencapaian informasi dan transformasi digitalisasi serta integrasi data, dan
3. Belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah dalam menunjang tata kelola pemerintahan.

Aspek Lingkungan Hidup

Keberlanjutan pembangunan Kota Bengkulu ke depan menghadapi tantangan antara lain daerah risiko bencana tinggi (*rings of fire*) seperti gempa bumi, dan banjir serta terdampak akibat perubahan iklim global. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan terkonsentrasi akibat arus urbanisasi akan berakibat daya dukung lingkungan semakin besar. Perubahan gaya hidup yang konsumtif serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Kondisi ini berdampak terhadap kelestarian dan daya dukung terhadap lingkungan antara lain sampah dan pencemaran sumber air permukaan (danau dan sungai) dan sumber air bawah tanah. Berdasarkan uraian tersebut isu-isu strategis lingkungan hidup di Kota Bengkulu sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pengelolaan sanitasi lingkungan hidup Kota Bengkulu
2. Optimalisasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Bengkulu
3. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan belum tersedianya TPA *sanitary land fill*
4. Optimalisasi aksi mitigasi penurunan emisi GRK pembangunan rendah karbon
5. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Aspek Sosial & Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu terus menunjukkan tren meningkat baik sebelum maupun pascapandemi. Namun pertumbuhan ekonomi ini masih menyisakan berbagai persoalan antara lain tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan (ekstrem), dan ketimpangan ekonomi (*gini ratio*) yang semuanya tinggi serta rendahnya tingkat investasi. Ini artinya pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi merata ke semua lapisan masyarakat (ekonomi belum inklusif) sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam perekonomian masih relatif rendah, yang berakibat pula terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan yang rendah.

Akumulasi dari semua ini menimbulkan masalah ekonomi dan sosial yang kompleks di Kota Bengkulu. Berdasarkan uraian tersebut isu-isu strategis sosial dan ekonomi di Kota Bengkulu sebagai berikut:

1. Tingginya Angka Kemiskinan, Ketimpangan (*Gini Ratio*) dan Pengangguran Terbuka,
2. Rendahnya tingkat investasi (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri) di Kota Bengkulu,
3. Belum adanya tata kelola zona usaha,
4. Terbatasnya ketersediaan lahan pertanian (pangan),
5. Rendahnya pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata,
6. Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan atau petani,
7. Belum memadainya dan meratanya sarana dan prasarana pendidikan,
8. Belum memadainya dan meratanya kualitas tenaga medis,
9. Belum optimalnya validasi data masyarakat miskin,
10. Tingginya tingkat tindak kekerasan perempuan dan anak (kekerasan rumah tangga),
11. Tingginya tingkat penderita penyakit menular dan HIV-AIDS,
12. Rendahnya budaya masyarakat terhadap pengelolaan sampah, dan
13. Tinggi potensi rawan bencana (banjir, gempa bumi, dan seterusnya) di Kota Bengkulu.

Tabel 3. 1 Keterhubungan Permasalahan dan Isu Strategis

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Belum optimalnya pembangunan manusia	Kualitas SDM yang Berdaya Saing
2	Kemiskinan yang masih tinggi	
3	Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan dan rasio gini masih tinggi	Pertumbuhan Ekonomi inklusif dan berkelanjutan
4	Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan pariwisata	
5	ASN yang belum sepenuhnya berkualitas dan profesional	Tata Kelola Pemerintahan
6	Belum optimalnya pelayanan publik	
7	Rendahnya pengelolaan lingkungan hidup	Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
8	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dasar	
9	Terbatasnya konektivitas dan pengembangan infrastruktur ekonomi strategis	
10	Kurangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	

Berdasarkan relasi antara isu-isu strategis perencanaan pembangunan di tingkat internasional, nasional, Provinsi Bengkulu/regional dan lokal, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan di Kota Bengkulu dapat dirumuskan disajikan pada Tabel 3.2. berikut:

Tabel 3. 2 Perkembangan Isu-isu Strategis di Tingkat Internasional, Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu

ISU-ISU STRATEGIS			
Internasional	Nasional	Provinsi	Kota Bengkulu
Pemulihan Ekonomi Global	Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan pariwisata yang komperensif dan kompetitif	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
Pergeseran Peran Ekonomi Kawasan Asia - Pasifik dalam Perekonomian Global	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Kemiskinan, Kesejahteraan dan Daya Saing SDM	Kualitas SDM yang Berdaya Saing
Keterbukaan Pasar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kinerja Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan
Stabilitas Politik Global yang Dinamis	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Tata Kelola Pemerintahan
Transformasi Teknologi & Industri 4.0	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kinerja Birokrasi Pengembangan konektivitas, pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

ISU-ISU STRATEGIS			
Internasional	Nasional	Provinsi	Kota Bengkulu
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)	Membangun Lingkungan, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengembangan konektivitas, pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Pengembangan konektivitas, pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

BAB IV VISI DAN MISI KOTA BENGKULU

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan merupakan landasan dalam merumuskan visi pembangunan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi Kota Bengkulu yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang, yakni 20 tahun ke depan. Visi bukan hanya serangkaian harapan, namun suatu komitmen dan upaya merancang serta mengelola perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan. Visi harus didasarkan pada realita dan harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi pembangunan Kota Bengkulu dan masyarakatnya. Visi Kota Bengkulu dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Bengkulu karena visi merupakan dasar bagi para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Bengkulu.

Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis potensi, isu-isu strategis, permasalahan pembangunan daerah serta perspektif ke depan untuk menemukan perwujudan visi. Hasil perumusan visi Kota Bengkulu 2025-2045 adalah, "**Kota Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**". Visi ini menandai tekad untuk mewujudkan Kota Bengkulu sebagai daerah yang mampu mewujudkan **kesejahteraan** mencakup kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya bagi semua masyarakatnya dengan pendekatan inklusif dan berkeadilan. **Maju** dalam berbagai aspek kehidupan. Maju dalam arti memiliki ekonomi yang kuat, sumber daya yang berkelanjutan, dan masyarakat yang berdaya saing. **Keberlanjutan** menekankan komitmen terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang tidak mengorbankan generasi mendatang.

Tabel 4. 1 Isu Strategis, Pokok-pokok Visi, Pernyataan Visi, Penjelasan Pokok-pokok Visi Kota Bengkulu 2025-2045

No	Isu Strategis	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi	Penjelasan Pokok-pokok Visi
1	Kualitas SDM yang Berdaya Saing	Maju, Sejahtera, Berkelanjutan	Kota Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Maju: Kemajuan Kota Bengkulu harus tercermin dalam aspek kehidupan, khususnya ekonomi dan sosial. Kemajuan ekonomi dan sosial Kota Bengkulu ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan

No	Isu Strategis	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi	Penjelasan Pokok-pokok Visi
2	Pertumbuhan Ekonomi inklusif dan berkelanjutan			menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Sejahtera: Memberikan kemakmuran utuh kepada masyarakat, dengan terpenuhinya kebutuhan layanan masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, air bersih, energi, dan informasi serta terwujudnya tatanan sosial masyarakat yang memiliki daya saing dan peradaban yang tinggi.
3	Tata Kelola Pemerintahan			
4	Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan			Berkelanjutan: Berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, seimbang dengan pembangunan sosial, sumber daya alam dan lingkungan yang lestari, dan berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik

Indikasi terwujudnya Visi Pembangunan Kota Bengkulu Tahun 2025-2045, ditandai dengan:

1. Maju: Kemajuan Kota Bengkulu harus tercermin dalam aspek kehidupan, khususnya ekonomi dan sosial. Kemajuan ekonomi dan sosial Kota Bengkulu ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.
2. Sejahtera: Memberikan kemakmuran utuh kepada masyarakat, dengan terpenuhinya kebutuhan layanan masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, air bersih, energi, dan informasi serta terwujudnya tatanan sosial masyarakat yang memiliki daya saing dan peradaban yang tinggi.

3. Berkelanjutan: Berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, seimbang dengan pembangunan sosial, sumber daya alam dan lingkungan yang lestari dan berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi yang baik harus terukur dan mampu dievaluasi pencapaiannya. Oleh karenanya visi harus memiliki sasaran indikator, *baseline* dan target yang jelas di periode 2025-2045.

Tabel 4. 2 Sasaran, Indikator, *Baseline* dan Target Visi Kota Bengkulu 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp. juta)	80-85	110-122,5	140-160	170-197,5	200-235
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (indeks)	63,49	68,07	72,65	77,23	81,81
	Kontribusi industri pengolahan (%)	3,07-3,33	3,32-3,48	3,57-3,76	3,82-3,98	4,07-4,77
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	13,34-12,97	11,52-11	10,24-9,04	8,62-7,08	6,75-5,12
	Rasio Gini (indeks)	0,38-0,36	0,36-0,35	0,35-0,33	0,33-0,32	0,32-0,30
	Kontribusi PDRB Kota Bengkulu terhadap PDRB Provinsi (%)	31,66	32,16	32,66	33,16	33,66
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5-5,7	5,55-5,9	5,6-6,1	5,65-6,3	5,7-6,5
Kepemimpinan daerah dalam mendukung visi daerah	Indeks Inovasi Daerah	70,45-73,1	74,2-76,8	77,9-80,55	81,65-84,3	85-90
	Indeks Daya Saing Daerah	3,91-3,94	3,97-4,07	4,08-4,17	4,2-4,28	4,32-4,50
Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,53	0,58	0,63	0,68	0,74
	Indeks Pembangunan Manusia	84,27	86,49	88,72	90,95	93,16
Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,15	50,66	63,17	75,68	88,21
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,98	62,04	63,10	64,16	65,22

Visi RPJPN Tahun 2025-2045 "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan" merupakan komitmen dalam upaya membangun Indonesia Emas pada tahun 2045. Visi ini mencerminkan komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, sejalan dengan cita-cita besar bangsa Indonesia. Visi RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 "Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan" merupakan komitmen dan tanggung jawab untuk membantu pencapaian visi RPJPN. Visi Kota Bengkulu juga turut memperhatikan sinergitas dengan visi pemerintah vertical, yaitu visi RPJPN dan visi RPJPD Provinsi Bengkulu. Sinergi visi RPJPN dan RPJPD Kota Bengkulu menjadi hal mutlak yang harus dijalankan melalui penyelarasan indikator dan target pembangunan.

Tabel 4. 3 Penyelarasan Visi RPJPN 2025-2045, Visi Provinsi Bengkulu RPJPD 2025-2045, dan Visi Kota Bengkulu RPJPD 2025-2045

VISI		
RPJPN Indonesia	RPJPD Provinsi Bengkulu	RPJPD Kota Bengkulu
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Kota Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan

Tabel 4. 4 Penyelerasan Sasaran Visi RPJPN 2025-2045, Sasaran Visi Provinsi Bengkulu RPJPD 2025-2045, dan Sasaran Visi Kota Bengkulu RPJPD 2025-2045

RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045				RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5,5	30,3	Peningkatan Pendapatan per kapita	a.PDRB per kapita (Rp Juta)	55 – 60	180 – 235	Peningkatan Pendapatan per kapita	a.PDRB per kapita (Rp Juta)	80-85	200-235
						49,68 - 49,96 (SEB)	309,08 – 359,80 (SEB)				
	b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	26,66	74,17		b. Indeks ekonomi hijau daerah (indeks)	63,49	81,81
						26,66 (SEB)	74,17 (SEB)				
	c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,51	10,00 - 10,12		c. Kontribusi industri pengolahan (%)	3,07-3,33	4,07-4,77
						5,51 (SEB)	10,00 - 10,12 (SEB)				
Kemiskinan menuju 0%		6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan		13,6 – 13,1	7,0 - 5,0	Pengentasan kemiskinan		13,34-12,97	6,75-5,12

RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045				RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)			dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	13,60 - 13,10 (SEB)	0,92 - 0,42 (SEB)	dan ketimpangan	a. Tingkat kemiskinan (%)		
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,342 - 0,327	0,288 - 0,265		b. Rasio gini (indeks)	0,38-0,36	0,32-0,30
						0,332 - 0,327 (SEB)	0,288 - 0,265 (SEB)				
	c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,46	0,54		c. Kontribusi PDRB Kota Bengkulu terhadap Provinsi Bengkulu (%)	31,66	33,66
						0,46 (SEB)	0,54 (SEB)				
						Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,55 - 4,86				
4,55 - 4,86 (SEB)	5,55 - 7 (SEB)										
Kepemimpinan dan pengaruh di	Global Power	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan Daerah dalam	Indeks Inovasi Daerah	56.25-51.25	75.00 - 80.00	Kepemimpinan Daerah dalam	Indeks Inovasi Daerah	70,45-73,1	85-90

RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045				RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
dunia internasional meningkat	Index (peringkat)			mendukung visi daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,33-3,35	3,80-4,02	mendukung visi daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,91-3,94	4,32-4,50
Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,53	0,69	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,53	0,74
						0,53 (SEB)	0,69 (SEB)		Indeks Pembangunan Manusia	84,27	93,16
Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan intensitas Emisi GRK (%)	57,74	90,73	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan intensitas Emisi GRK (%)	38,15	88,21
					57,74 (SEB)	90,73 (SEB)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		60,98	65,22	
					71,27	78,42					
					71,27 (SEB)	78,42 (SEB)					

4.2. Misi Daerah Tahun 2025-2045

Misi merupakan rumusan umum tentang beberapa hal yang akan dilaksanakan dalam rangka menjawab permasalahan pembangunan agar visi Kota Bengkulu dapat diwujudkan. Misi merupakan hal yang penting untuk dirumuskan untuk membantu menggambarkan visi secara lebih jelas yang ingin dicapai dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi dalam RPJPD Kota Bengkulu harus mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam empat tahap selama 20 tahun ke depan.

Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan Kota Bengkulu dalam rangka mengembangkan program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif efisien dan terukur. Dalam menyusun misi pembangunan jangka panjang Kota Bengkulu, perlu disusun pendefinisian visi terlebih dahulu menjadi pokok-pokok visi. Pokok-pokok visi disusun dengan memperhatikan *stakeholder* yang menjadi pelaku dan atau terkena dampak pelaksanaan. Rumusan misi yang diharapkan menjadi solusi atas permasalahan pembangunan di Kota Bengkulu, yang disajikan pada tabel:

Tabel 4. 5 Rumusan Misi

No	Permasalahan	Misi
1	Belum optimalnya pembangunan manusia	Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing
2	Kemiskinan yang masih tinggi	
3	Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan dan rasio gini masih tinggi	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui ekonomi kreatif
4	Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan pariwisata	
5	ASN yang belum sepenuhnya berkualitas dan profesional	Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
6	Belum optimalnya pelayanan publik	
7	Rendahnya pengelolaan lingkungan hidup	Misi 4: Pembangunan sosial budaya dan ekologi serta meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi
8	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dasar	Misi 5: Meningkatkan sinergi dan pembangunan merata dan berkeadilan serta infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan ramah lingkungan
9	Terbatasnya konektivitas dan pengembangan infrastruktur ekonomi strategis	
10	Kurangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	

Uraian kelima misi yang digunakan untuk mewujudkan visi sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing

Misi kesatu berfokus untuk menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas dan sehat, tetapi juga kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diakui sebagai landasan penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Program-program yang ditujukan untuk peningkatan ini yaitu pertama, kesehatan masyarakat juga menjadi fokus utama, dengan mengimplementasikan program kesehatan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa tiap individu memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai, serta mencegah dan menangani masalah stunting yang menjadi indikator penting dari kesehatan dan gizi anak. Kedua, pendidikan diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang merangsang kreativitas dan pengembangan potensi individu, sehingga setiap warga dapat menjadi manusia yang cerdas dan kreatif. Ketiga, perlindungan sosial dilaksanakan dengan cara memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki jaminan keamanan dan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dari fokus tersebut diharapkan dapat **menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing di Kota Bengkulu.**

Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui ekonomi kreatif

Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu diarahkan untuk mencapai keselarasan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu dan nasional, dengan penekanan khusus pada pengembangan sektor jasa, perdagangan, industri (khususnya UMKM) dan pariwisata. Upaya ini mencakup integrasi teknologi dan inovasi, khususnya dalam digitalisasi sektor UMKM dan pariwisata. Produk ekonomi kreatif yang diciptakan harus memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang mengedepankan inovasi dan memiliki nilai jual yang tinggi. Pemanfaatan platform digital akan membantu UMKM dalam proses produksi, konsumsi, kolaborasi, dan berbagi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Kota Bengkulu harus menciptakan minimal 1 (satu) destinasi wisata yang berskala nasional dan beberapa destinasi wisata berskala regional Sumatera yang didukung dengan perbaikan dan kemajuan aksesibilitas, atraksi, dan amenities. Dengan cara ini, Misi 2 akan mencapai pokok visi 'Maju' dengan mengedepankan **transformasi ekonomi melalui ekonomi kreatif yang berbasis pada keunggulan dan karakteristik daerah.**

Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip menjaga kesinergisan interaksi yang bersifat konstruktif antara tiga pemangku utama yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang memiliki karakteristik efektif, efisien, proaktif, partisipatif, berlandaskan hukum, adil demokratis, keterbukaan, responsif, kesetaraan, transparan, akuntabel, dan memiliki visi strategis.

Reformasi birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalitas ASN, pengelolaan keuangan daerah yang baik, dan pelayanan publik yang inovatif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat adalah inti dari misi ini. Inovasi daerah dan daya saing daerah akan ditingkatkan untuk

menjamin pemerintahan yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan memenuhi ekspektasi publik yang semakin tinggi. Misi ketiga berfokus pada penciptaan **Good Government dan Clean Governance** serta **pelayanan publik berkualitas oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat.**

Misi 4: Pembangunan sosial budaya dan ekologi serta meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi

Kota Bengkulu akan mewujudkan masyarakat agamis dan berbudaya sebagai bentuk dari pembangunan sosial budaya dan ekologi. Masyarakat agamis adalah masyarakat dengan keimanan, ketaatan ibadah, dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Kebudayaan merupakan tujuan Kota Bengkulu untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki ekspresi cipta (inovatif), karya (kreatif), dan karsa (motivasi) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan agama dan kearifan lokal (*local wisdom*).

Keberadaan sistem agama dan kebudayaan yang melingkupi masyarakat, bermakna kolektivitas yang saling memberi pengaruh terhadap tata norma dan tatanan sosial keberagamaan secara totalitas melalui kerukunan umat beragama, penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan keagamaan dan sosial budaya, dan meningkatkan kualitas keimanan dan nilai-nilai keagamaan masyarakat di Kota Bengkulu. Keduanya berkaitan dengan visi sejahtera dan untuk mewujudkan masyarakat dengan kehidupan agamis dan dilandasi nilai-nilai toleransi beragama, keadaan makmur dan sentosa, masyarakat yang demokratis dan kreatif.

Kota Bengkulu juga cenderung mengalami permasalahan yang tipikal akibat arus urbanisasi sehingga laju pertumbuhan penduduk menjadi tinggi serta pengguna ruang terus tumbuh dan berkembang baik populasi maupun kebutuhan akan seluruh aktivitasnya. Kondisi ini menuntut penyediaan kota yang aman, nyaman dan indah secara berkelanjutan, sehingga diperlukan keseimbangan penataan ruang mencakup ruang privat dan ruang publik. Ruang privat berupa perumahan, perdagangan dan jasa, industri, pertanian dan lainnya yang dikelola oleh masyarakat secara individu maupun kelompok. Ruang publik mencakup perkantoran pemerintah, ruang terbuka non hijau, dan ruang terbuka hijau.

Perwujudannya dalam bentuk keseimbangan antara ruang terbuka hijau dengan area pemukiman, perkantoran, dan bisnis. Penataan kota untuk meningkatkan kesejahteraan mencakup pengendalian kawasan rawan banjir, penyediaan air bersih yang higienis mencukupi, pengelolaan limbah dan sampah kota, pelestarian kawasan cagar alam dan kawasan pantai. Kolaborasi pemerintah dan **pelibatan masyarakat** menjadi prioritas dalam **penataan Kota Bengkulu yang aman, nyaman, indah, produktif dan berkelanjutan.** Misi keempat sebagai upaya mencapai pokok visi 'Sejahtera', menjadikan masyarakat Kota Bengkulu hidup berlandaskan **nilai-nilai beragama, keadaan makmur dan sentosa, masyarakat yang demokratis dan kreatif.**

Misi 5: Meningkatkan sinergi dan pembangunan merata dan berkeadilan serta infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan ramah lingkungan

Pengembangan infrastruktur pelayanan publik erat kaitannya dengan Pembangunan infrastruktur dasar, yaitu infrastruktur sanitasi, air minum, fasilitas pengolahan sampah, Infrastruktur pendidikan dan Infrastruktur kesehatan. Pemenuhan infrastruktur tersebut dirancang untuk memudahkan

akses bagi semua kelompok masyarakat untuk menikmati air minum dan sanitasi yang layak serta akses untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan juga mencakup keadilan dalam pemerataan sumber daya dan peluang ekonomi. Upaya dilakukan untuk memastikan bahwa semua wilayah, termasuk yang mungkin sebelumnya kurang terpantau, memiliki akses yang setara terhadap investasi, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha. Dengan cara ini, Kota Bengkulu mampu menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

Selain itu, pengembangan infrastruktur strategis dapat memberikan stimulasi pertumbuhan ekonomi seperti pengembangan pelabuhan, bandar udara, kereta api, terminal, jalan, dan pembangkit listrik. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur ini akan memperlancar arus barang dan pergerakan orang, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi di Kota Bengkulu. Dengan demikian, misi ini secara langsung mendukung pokok visi 'Maju' melalui **"penyediaan infrastruktur publik yang inklusif, yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, dan sekaligus menstimulus pertumbuhan ekonomi."**

4.3. Keselarasan Visi dan Misi Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dan Nasional

Demi mendukung pembangunan nasional dan provinsi, maka harus ada keselarasan antara visi dan misi Kota Bengkulu dengan visi dan misi nasional serta visi dan misi Provinsi Bengkulu. Kota Bengkulu akan berperan dalam membantu tercapainya misi nasional dan Provinsi Bengkulu dengan merumuskan misi daerah yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan besar tersebut. Misi daerah merupakan panduan mengenai bagaimana Kota Bengkulu akan berkembang dalam dua dekade ke depan dan bagaimana akan mencapainya. Misi Kota Bengkulu dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, permasalahan, serta isu-isu strategis yang ada di Kota Bengkulu. Dalam proses perumusan misi, aspek tata ruang dan pengelolaan juga diperhatikan agar sesuai dengan dinamika ruang dan menjaga keberlanjutan ekosistem yang mendukung pembangunan.

Perumusan visi dan misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2045 diselaraskan dengan visi dan misi Provinsi Bengkulu dalam RPJPD Provinsi Bengkulu serta visi dan misi Indonesia Emas Tahun 2045 dalam RPJPN. Penyelarasan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana visi dan misi RPJPD Kota Bengkulu mengakomodasi visi dan misi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sandingan dokumen dan muatan perencanaan yang digunakan dalam perumusan RPJPD Kota Bengkulu tahun 2025-2045 dapat dirangkum seperti pada tabel berikut:

Tabel 4. 6 Keselarasan Visi dan Misi Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dan Nasional

Nasional		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu
Kelompok Agenda/ Misi	Agenda/ Misi	Misi	Misi
Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang berdaya saing	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
	Transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi secara inklusif berbasis sumberdaya alam melalui hilirisasi produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif	Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui ekonomi kreatif
	Transformasi tata kelola	Menciptakan transformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
Landasan Transformasi	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Menciptakan atmosfer pembangunan yang kondusif melalui perwujudan keamanan daerah tangguh, dan demokrasi yang berkeadilan	Pembangunan sosial budaya dan ekologi serta meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi
	Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Pembangunan sosial budaya dan ekologi	
Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Meningkatkan sinergi dan pembangunan merata dan berkeadilan serta

Nasional		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu
Kelompok Agenda/ Misi	Agenda/ Misi	Misi	Misi
	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan ramah lingkungan
	Kesinambungan pembangunan	Mewujudkan sinergi dan kesinambungan pembangunan	

BAB V **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

Untuk mencapai Visi Kota Bengkulu, penetapan arah kebijakan dan sasaran pokok merupakan panduan penting bagi pemerintah daerah. Melalui penetapan arah kebijakan dan sasaran pokok ini, dapat direncanakan tahapan dan prioritas pembangunan selama lima tahun dalam periode dua puluh tahun, dengan tujuan mencapai target utama yang tercantum dalam RPJPD secara bertahap. Dalam perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok, RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045 telah merujuk pada hasil evaluasi RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPN 2025-2045, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Bengkulu.

5.1. Arah Kebijakan

Kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah Kota Bengkulu tahun 2025-2045 dijabarkan dalam empat tahapan arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Arah kebijakan lima tahunan diarahkan guna penekanan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya. Arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut:

1. Periode tahapan pertama adalah Penguatan Landasan (2025-2029);
2. Periode tahapan kedua adalah Peningkatan Pembangunan (2030-2034);
3. Periode tahapan ketiga adalah Pemantapan Capaian Pembangunan (2035-2039);
4. Periode tahapan keempat adalah Perwujudan Pembangunan (2040-2045).



Gambar 5. 1 Tahapan Pembangunan Kota Bengkulu 2025-2045

Tahapan pembangunan sesuai dengan 5 (lima) misi RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045. Tahapan pembangunan Kota Bengkulu yang pertama adalah Penguatan Landasan (2025-2029). Beberapa poin yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan ini sesuai dengan masing-masing misi di antaranya:

1. Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial
2. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan ekonomi kreatif
3. Pemantapan sistem Merit ASN, kelembagaan efektif dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan publik, penegakan regulasi dan penguatan pemberdayaan masyarakat
4. Memperkuat infrastruktur sosial dan kebudayaan serta keberlanjutan ekologi
5. Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan pengembangan kebijakan lingkungan yang progresif dan berkelanjutan.

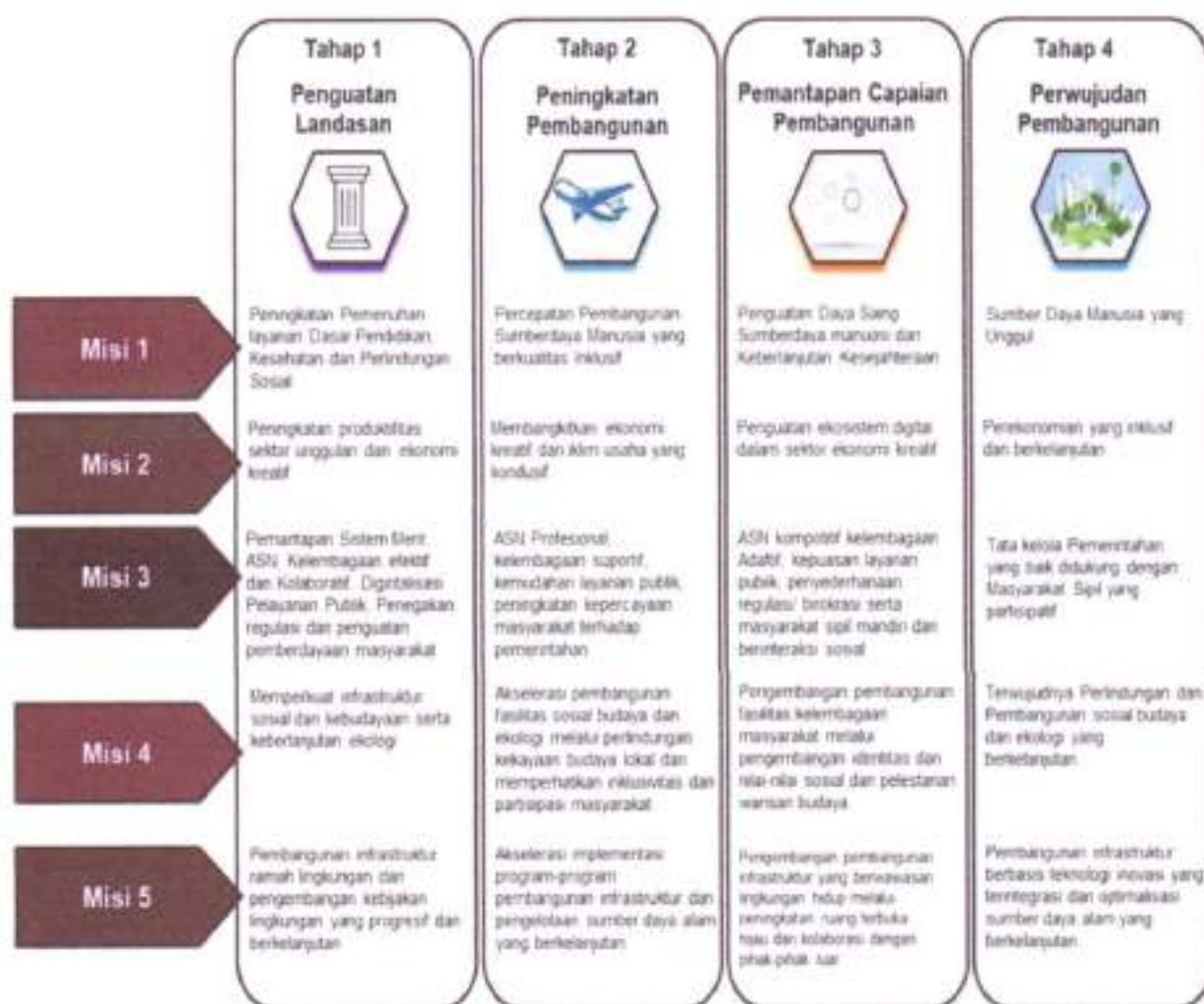
Tahapan pembangunan Kota Bengkulu yang kedua adalah Peningkatan Pembangunan (2030-2034). Pada tahapan pembangunan ini dilakukan beberapa poin peningkatan di antaranya:

1. Percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas inklusif
2. Membangkitkan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif
3. ASN profesional, kelembagaan suportif, kemudahan layanan publik, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan
4. Akselerasi pembangunan fasilitas sosial budaya dan ekologi melalui perlindungan kekayaan budaya lokal dan memperhatikan inklusivitas dan partisipasi masyarakat
5. Akselerasi implementasi program-program pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Tahapan pembangunan Kota Bengkulu ketiga adalah Pemantapan Capaian Pembangunan (2035-2039). Pada tahapan pembangunan ini dilakukan beberapa penguatan dan pengembangan pembangunan di antaranya:

1. Penguatan daya saing sumber daya manusia dan keberlanjutan kesejahteraan
2. Penguatan ekosistem digital dalam sektor ekonomi kreatif
3. ASN kompetitif kelembagaan adaptif, kepuasan layanan publik, penyederhanaan regulasi/birokrasi serta masyarakat sipil mandiri dan berinteraksi sosial
4. Pengembangan pembangunan fasilitas kelembagaan masyarakat melalui pengembangan identitas dan nilai-nilai sosial dan pelestarian warisan budaya
5. Pengembangan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan hidup melalui peningkatan ruang terbuka hijau dan kolaborasi dengan pihak-pihak luar.

Tema tahapan pembangunan Kota Bengkulu keempat adalah Perwujudan Pembangunan (2040-2045). Pada tahapan ini Kota Bengkulu memiliki sumber daya manusia yang unggul, perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik didukung dengan masyarakat sipil yang partisipatif, terwujudnya perlindungan dan pembangunan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi inovasi yang terintegrasi dan optimalisasi sumber daya alam yang berkelanjutan.



Gambar 5. 2 Tema Arah Pembangunan Kota Bengkulu Per Misi 2025-2045

Tabel 5. 1 Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan Landasan	Peningkatan Pembangunan	Pemantapan Capaian Pembangunan	Perwujudan Pembangunan
Kota Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Misi 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas inklusif	Penguatan daya saing sumber daya manusia dan keberlanjutan kesejahteraan	Sumber daya manusia yang unggul
	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui ekonomi kreatif	Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Membangkitkan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif	Penguatan ekosistem digital dalam sektor ekonomi kreatif	Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan
	Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Pemantapan sistem Merit ASN, kelembagaan efektif dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan publik, penegakan regulasi dan penguatan pemberdayaan masyarakat	ASN profesional, kelembagaan suportif, kemudahan layanan publik, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan	ASN kompetitif, kelembagaan adaptif, kepuasan layanan publik, penyederhanaan regulasi/birokrasi serta masyarakat sipil mandiri dan berinteraksi sosial	Tata kelola pemerintahan yang baik didukung dengan masyarakat sipil yang partisipatif

Lanjutan (Tabel 5.1)

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan Landasan	Peningkatan Pembangunan	Pemantapan Capaian Pembangunan	Penguatan Landasan
Kota Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Misi 4: Pembangunan sosial budaya dan ekologi serta meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi	Memperkuat infrastruktur sosial dan kebudayaan serta keberlanjutan ekologi	Akselerasi pembangunan fasilitas sosial budaya dan ekologi melalui perlindungan kekayaan budaya lokal dan memperhatikan inklusivitas dan partisipasi masyarakat	Pengembangan pembangunan fasilitas kelembagaan masyarakat melalui pengembangan identitas dan nilai-nilai sosial dan pelestarian warisan budaya	Terwujudnya perlindungan dan pembangunan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan
	Misi 5: Meningkatkan sinergi dan pembangunan merata dan berkeadilan serta infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan pengembangan kebijakan lingkungan yang progresif dan berkelanjutan	Akselerasi implementasi program-program pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Pengembangan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan hidup melalui peningkatan ruang terbuka hijau dan kolaborasi dengan pihak-pihak luar	Pembangunan infrastruktur berbasis teknologi inovasi yang terintegrasi dan optimalisasi sumber daya alam yang berkelanjutan

Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Transformasi Daerah 2025-2045

No.	Arah Kebijakan	Kota Bengkulu			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
TRANSFORMASI SOSIAL					
1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	✓	✓	✓	✓
2	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	✓	✓	✓	✓
3	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	✓	✓	✓	✓
4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	✓	✓	✓	✓
5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	✓	✓	✓	✓
6	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	✓	✓	✓	✓
7	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	✓	✓	✓	✓
8	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga	✓	✓	✓	✓

No.	Arah Kebijakan	Kota Bengkulu			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
	kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP.				
9	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting	✓	✓	✓	✓
10	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	✓	✓	✓	✓
11	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	✓	✓	✓	✓
12	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	✓			
13	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	✓	✓	✓	✓
14	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	✓	✓	✓	✓
15	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus	✓	✓	✓	✓

No.	Arah Kebijakan	Kota Bengkulu			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
	peserta didik sesuai kondisi daerah.				
16	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	✓	✓	✓	✓
17	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	✓	✓	✓	✓
18	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	✓	✓	✓	✓
19	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	✓	✓	✓	✓
20	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	✓	✓	✓	✓
21	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP.	✓	✓	✓	✓
22	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP.	✓	✓	✓	✓

No.	Arah Kebijakan	Kota Bengkulu			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
23	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	✓	✓	✓	✓
24	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .	✓	✓	✓	✓
25	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	✓	✓	✓	✓
26	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	✓	✓	✓	✓

No.	Arah Kebijakan	Kota Bengkulu			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
27	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	✓	✓	✓	✓
28	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	✓	✓	✓	✓
29	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	✓	✓	✓	✓
30	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.	✓	✓	✓	✓
TRANSFORMASI EKONOMI					
1	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	✓	✓	✓	✓
2	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya	✓	✓	✓	✓

No.	Arah Kebijakan	Kota Bengkulu			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
	melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui <i>digital marketplace/platform</i> .				
3	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	✓	✓	✓	✓
4	Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian		✓	✓	✓
5	Pengembangan <i>closed loop</i> model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan	✓	✓	✓	✓

No.	Arah Kebijakan	Kota Bengkulu			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
	market, bank, dan asuransi perikanan.				
6	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	✓	✓	✓	✓
7	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	✓	✓	✓	✓
8	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bengkulu-Muara Enim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara, industri hilirisasi bioproduct, dan pembangkitan energi listrik).	✓	✓	✓	✓
9	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.	✓	✓	✓	✓
10	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu	✓	✓	✓	✓

No.	Arah Kebijakan	Kota Bengkulu			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
	perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.				
11	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan.	✓	✓	✓	✓
12	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bengkulu.	✓	✓	✓	✓
13	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	✓	✓	✓	✓
14	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	✓	✓	✓	✓
15	Peningkatan konektivitas menuju /dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	✓	✓	✓	✓
16	Penguatan ekosistem riset dan inovasi	✓	✓	✓	✓

No.	Arah Kebijakan	Kota Bengkulu			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
	IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global				
17	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	✓	✓	✓	✓
18	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.	✓	✓	✓	✓
19	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	✓	✓	✓	✓
20	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	✓	✓	✓	✓
TRANSFORMASI TATA KELOLA					
1	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	✓	✓	✓	✓
2	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan	✓	✓	✓	✓

No.	Arah Kebijakan	Kota Bengkulu			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
	kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.				
3	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	✓	✓	✓	✓
4	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	✓	✓	✓	✓
5	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Bengkulu, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Bengkulu yang profesional dan bebas korupsi.	✓	✓	✓	✓
6	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	✓	✓	✓	✓
7	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	✓	✓	✓	✓
8	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	✓	✓	✓	✓

No.	Arah Kebijakan	Kota Bengkulu			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
9	Penguatan integritas partai politik	✓	✓	✓	✓
KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH					
1	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	✓	✓	✓	✓
2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	✓	✓	✓	✓
3	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	✓	✓	✓	✓
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI					
1	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila.	✓	✓	✓	✓
2	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	✓	✓	✓	✓
3	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah	✓	✓	✓	✓

No.	Arah Kebijakan	Kota Bengkulu			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
	kesatuan lansekap ekologis.				
4	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	✓	✓	✓	✓
5	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	✓	✓	✓	✓
6	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	✓	✓	✓	✓
7	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	✓	✓	✓	✓
8	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia,	✓	✓	✓	✓

No.	Arah Kebijakan	Kota Bengkulu			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
	melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.				
9	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	✓	✓	✓	✓
10	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	✓	✓	✓	✓
11	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .	✓	✓	✓	✓
IMPLEMENTASI TRANSFORMASI					
1	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	✓			
2	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).	✓			
3	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan	✓			

No.	Arah Kebijakan	Kota Bengkulu			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
	risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.				
4	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, <i>trust</i> , dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	✓	✓	✓	✓
5	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	✓	✓	✓	✓

No.	Arah Kebijakan	Kota Bengkulu			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
6	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	✓	✓	✓	✓
7	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i> , peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	✓	✓	✓	✓
8	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	✓	✓	✓	✓
9	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .	✓	✓	✓	✓
10	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	✓	✓	✓	✓
11	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	✓			
12	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional	✓	✓	✓	✓
13	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan	✓	✓	✓	✓

No.	Arah Kebijakan	Kota Bengkulu			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
	maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.				
14	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	✓	✓	✓	✓

5.2. Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045

Sasaran pokok bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dan dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan yang dijabarkan oleh arah kebijakan. Sasaran pokok disusun dengan merujuk pada hasil pemetaan masalah serta berbagai dokumen dan kebijakan yang ditelaah (RTRW, KLHS, kebijakan nasional dan provinsi). Sasaran pokok ini diturunkan dari setiap misi serta terdapat indikator kinerja sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan kondisi yang akan dicapai. Berikut disajikan rumusan 12 sasaran pokok RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2025-2045.

Misi 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dengan sasaran pokok sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan dan penyediaan kualitas dan akses kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya pelayanan, penyediaan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan
3. Meningkatnya pelayanan, perlindungan, dan jaminan sosial.

Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui ekonomi kreatif dengan sasaran pokok sebagai berikut:

1. Meningkatnya implementasi integrasi teknologi dan inovasi
2. Meningkatnya inovasi daerah
3. Meningkatnya produktivitas ekonomi melalui transformasi ekonomi.

Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima dengan sasaran pokok adalah "Terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik".

Misi 4: Pembangunan sosial budaya dan ekologi serta meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi dengan sasaran pokok sebagai berikut:

1. Meningkatnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya dan religius
2. Peningkatan kualitas hidup keluarga dan pemberdayaan gender
3. Meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi

Misi 5: Meningkatkan sinergi dan pembangunan merata dan berkeadilan serta infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan ramah lingkungan, dengan sasaran pokok sebagai berikut:

1. Meningkatnya pembangunan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup serta ketahanan iklim dan bencana

Sebagai ukuran tercapainya Kota Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan dalam dua puluh tahun mendatang, maka diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan dan penyediaan kualitas dan akses kesehatan masyarakat

Arah Pembangunan: Kesehatan untuk Semua

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu berkomitmen untuk mewujudkan kesehatan untuk semua. Arah pembangunan ini menekankan pentingnya penyediaan layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan akses yang mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Arah pembangunan ini berfokus pada penyembuhan penyakit, upaya preventif dan promotif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Indikator: Usia Harapan Hidup (UHH); Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup); Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita; Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*); Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*); dan Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional.

2. Meningkatnya pelayanan, penyediaan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan

Arah Pembangunan: Pendidikan Berkualitas yang Merata

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata. Arah pembangunan ini menekankan pada kepastian layanan pendidikan tersedia secara luas dan memiliki kualitas yang baik. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang merata, inklusif, dan memberikan hasil pembelajaran yang berkualitas.

Indikator: Persentase kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi; Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Persentase Tenaga Kerja yang berkualifikasi pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi.

3. Pelayanan, perlindungan, dan jaminan sosial

Arah Pembangunan: Perlindungan Sosial yang Adaptif

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif. Fokus utama arah pembangunan ini adalah memastikan pelayanan sosial yang efektif, perlindungan sosial yang memadai dan adaptif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap perubahan kebutuhan dan dinamika sosial di Kota Bengkulu.

Indikator: Tingkat Kemiskinan dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota.

4. Meningkatnya implementasi integrasi teknologi dan inovasi

Arah Pembangunan: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu berkomitmen untuk mewujudkan pengembangan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi. Fokus utama arah pembangunan ini adalah mendorong pengembangan dan pengintegrasian teknologi dan inovasi di seluruh sektor ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berbasis pengetahuan dan inovatif.

Indikator: Rasio PDRB Industri Pengolahan; Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum; Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang); Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%); Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Nonpertanian pada Level Kota; Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota; Rasio Kewirausahaan Daerah; Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB; Tingkat Pengangguran Terbuka; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan; dan Indeks Daya Saing Daerah

Arah Pembangunan: Transformasi Digital

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu juga berkomitmen untuk mewujudkan optimalnya transformasi digital. Fokus utama arah pembangunan ini adalah mendorong penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi bisnis, dan inovasi di berbagai sektor.

Indikator: Jumlah pelanggan telepon selular per 100 penduduk dan Persentase rumah tangga dengan akses internet.

5. Meningkatnya inovasi daerah

Arah Pembangunan: Peran Kepala Daerah dalam Menciptakan Inovasi Daerah

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu khususnya kepala daerah berkomitmen untuk meningkatkan inovasi daerah. Fokus utama arah pembangunan ini adalah mendorong seluruh *stakeholder* dalam peningkatan inovasi daerah dengan tujuan menciptakan lingkungan yang mendukung dalam mengoptimalkan potensi daerah.

Indikator: Indeks Inovasi Daerah.

6. Meningkatkan produktivitas ekonomi melalui transformasi ekonomi
Arah Pembangunan: Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu berkomitmen untuk mewujudkan integrasi ekonomi domestik dan global. Fokus utama arah pembangunan ini adalah mendorong pengintegrasian atau menghubungkan antara pasar ekonomi lokal dengan pasar global, meningkatkan perdagangan, dan memperkuat konektivitas ekonomi.

Indikator: Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB).

Arah Pembangunan: Stabilitas Ekonomi Makro

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu juga berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan demi mendukung stabilitas ekonomi makro.

Indikator: Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB; Tingkat Inflasi; Total Dana Pihak Ketiga/PDRB; Total Kredit/PDRB.

Arah Pembangunan: Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu juga berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan air dan kemandirian pangan. Fokus utama arah pembangunan ini adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Indikator: Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan; Kapasitas Air Baku yang terbangun di Kota (m³/detik); Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Aman.

7. Terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik

Arah Pembangunan: Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Fokus utama dalam arah pembangunan ini adalah pengembangan regulasi dan tata kelola yang berintegritas serta adaptif terhadap perubahan, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

Indikator: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Pelayanan Publik.

8. Meningkatkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya dan religius

Arah Pembangunan: Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat Kota Bengkulu menjadi masyarakat yang beragama, bermaslahat, dan berkebudayaan maju. Fokus utama dalam arah pembangunan ini adalah pengembangan kekayaan budaya dan kearifan lokal Kota Bengkulu yang berlandaskan kebermanfaatan dan nilai-nilai beragama.

Indikator: Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan terhadap total pendaftaran; Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total pencatatan; Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

9. Peningkatan kualitas hidup keluarga dan pemberdayaan gender

Arah Pembangunan: Keluarga Berkualitas, Kesejahteraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan pemberdayaan gender. Fokus utama dalam arah pembangunan ini adalah membangun keluarga berkualitas, mencapai kesejahteraan gender, dan mempromosikan masyarakat inklusif.

Indikator: Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

10. Meningkatkan keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi

Arah Pembangunan: Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial.

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan keamanan, penanganan kasus kriminalitas, dan penegakan demokrasi. Fokus utama dalam arah pembangunan ini adalah optimalisasi aparat penegak hukum, mengembangkan sistem hukum yang berkeadilan, menciptakan daerah yang tangguh terhadap ancaman keamanan, dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi.

Indikator: Angka Kriminalitas.

11. Meningkatkan pembangunan kota dan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Arah Pembangunan: Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu berkomitmen untuk mewujudkan Kota Bengkulu sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi. Fokus utama dalam arah pembangunan ini adalah mengembangkan Kota Bengkulu sebagai wilayah yang maju, inklusif dan berkelanjutan.

Indikator: Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%); Persentase Desa Mandiri.

12. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup serta ketahanan iklim dan bencana

Arah Pembangunan: Penerapan Ekonomi Hijau

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu berkomitmen untuk mewujudkan penerapan ekonomi hijau. Fokus utama dalam arah pembangunan ini adalah menjalankan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan memperkuat keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.

Indikator: Indeks Ekonomi Hijau Daerah.

Arah Pembangunan: Lingkungan Hidup Berkualitas.

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu juga berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Fokus utama dalam arah pembangunan ini adalah pelestarian keanekaragaman hayati dan peningkatan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.

Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman; Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah; Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah; Timbulan Sampah Tertangani di Fasilitas Pengolahan Sampah.

Arah Pembangunan: Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Dalam upaya mencapai sasaran pokok ini, Kota Bengkulu juga berkomitmen untuk menetapkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Fokus utama dalam arah pembangunan ini adalah mengurangi risiko dan dampak negatif dari bencana dan perubahan iklim.

Indikator: Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Persentase Penurunan Emisi GRK.

Pentahapan dan prioritas arah kebijakan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pencapaian masing-masing sasaran pada setiap misi pembangunan. Secara lebih terperinci sasaran pokok, indikator ketercapaian dan target, serta arah kebijakan pembangunan berdasarkan sasaran pokok dan tahapan pembangunan disajikan dalam tabel 5.3 dan 5.4.

Tabel 5. 3 Perumusan Sasaran Pokok Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu 2025-2045

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket	
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045			
1	Misi 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	IE1. Kesehatan Untuk Semua	Transformasi Sosial	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) (i1)	75	76,28	77,55	78,83	80,1	Meningkatnya Pelayanan dan Penyediaan Kualitas dan Akses Kesehatan Masyarakat		
				Kesehatan Ibu dan Anak (i2):								
				Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (i2a)	49	42	35	28	21			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (i2b)	4	3,12	2,25	1,37	0,5			

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
				Penanganan Tuberkulosis (i3):							
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)* (i3a)	100	100	100	100	100		
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)* (i3b)	100	100	100	100	100		
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (i4)	99,98	100	100	100	100		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
2	Misi 1: Mewujudkan Kualitas sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Transformasi Sosial	Hasil pembelajaran (i5)						Meningkatnya Pelayanan, Penyediaan dan Pemerataan Kualitas dan Akses Pendidikan	
				a) Persentase kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk* (i5a):							
				i. Literasi Membaca (i5ai)	44,44	55,56	66,67	77,78	88,89		
				ii. Numerasi (i5aii)	33,33	44,44	55,56	66,67	77,78		
				b) Persentase satuan							

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
				pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk* (i5b):							
				i. Literasi Membaca (i5bi)	35,18	45,23	55,28	65,33	75,38		
				ii. Numerasi (i5bij)	24,63	34,68	44,73	54,78	64,83		
				c) Rata-Rata lama sekolah (tahun) (i5c)	11,93-12,45	12,5-12,8	12,9-13,2	13,3-13,65	13,75-14,45		
				d) Harapan Lama Sekolah (tahun) (i5d)	16,07-16,35	16,4-16,65	16,7-16,93	17-17,32	17,43-17,48		
				Persentase Tenaga Kerja yang berkualifikasi pendidikan	71	73,5	76	78,5	81		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
				menengah dan tinggi yang bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) (i7)							
3	Misi 1: Mewujudkan Kualitas sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Transformasi Sosial	Tingkat Kemiskinan (%) (i8)	13,34-12,97	11,52-11	10,24-9,04	8,62-7,08	6,75-5,12	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial	
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kab/kota (i9)	67	71,55	76,1	80,65	85,22		
4	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang inklusif	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas	Transformasi Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) (i11)	3,07-3,33	3,32-3,48	3,57-3,76	3,82-3,98	4,07-4,77	Meningkatnya Implementasi	

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
	dan berkelanjutan melalui ekonomi kreatif	tas Ekonomi								Integrasi Teknologi dan Inovasi	
				Pengembangan Pariwisata (i12)							
				a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* (i12a)	2,15-2,50	2,79-3,14	3,43-3,78	4,07-4,42	4,72-5,15		
				b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan Orang)* (i12b)	0,35	0,46	0,57	0,68	0,8		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5		
				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD (i14)							
				Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (i14a)							
				i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten/Kota (%) (i14ai)	11,55	12,91	14,28	15,65	17,01		
				ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level	2,17	3,38	4,58	5,79	7		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
				Kabupaten/Kota (%) (i14aii)							
				Rasio Kewirausahaan Daerah (%) (i14b)	3,85	4,89	5,92	6,96	8		
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) (i14c)	1,22	2,29-2,42	3,36-3,61	4,43-4,80	5,5-6		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (i15)	4,96-4,75	4,66-4,45	4,36-4,15	4,06-3,85	3,78-3,50		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) (i16)	57,08	60,65	64,22	67,79	71,37		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
				Tingkat Penguasaan IPTEK (i17)							
				a. Indeks Daya Saing Daerah (i17a)	3,91-3,94	3,97-4,07	4,08-4,17	4,2-4,28	4,32-4,50		
5	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui ekonomi kreatif	Transformasi Digital	Transformasi Ekonomi	Komunikasi dan informasi (i19)						Meningkatnya Implementasi Integrasi Teknologi dan Inovasi	
				a. Jumlah pelanggan telepon selular per 100 penduduk (i19a)	282,456	334,765	387,074	439,383	491,693		
				b. Persentase rumah tangga	80,87	83,08	85,28	87,49	89,7		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
				dengan akses internet (i19b)							
6	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui ekonomi kreatif	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Transformasi Ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (i21)	50,90	51,55	52,2	52,85	53,50	Meningkatnya produktivitas ekonomi melalui transformasi ekonomi	
7	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui ekonomi kreatif	Stabilitas Ekonomi Makro	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) (i31)	1,17	1,30	1,44	1,57	1,70	Meningkatnya produktivitas ekonomi melalui transformasi ekonomi	
				Tingkat Inflasi (%) (i32)	2,9	2,78	2,66	2,54	2,43		
				Pendalaman / Intermediasi							

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
				Sektor Keuangan (i33)							
				a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) (i33a)	30,44	38,70	46,97	55,23	63,5		
				b. Total Kredit/PDRB (%) (i33b)	29,1	37,45	45,8	54,15	62,5		
8	Misi 5: Meningkatkan sinergi dan pembangunan merata dan berkeadilan serta infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan ramah lingkungan	Penerapan Ekonomi Hijau	Transformasi Ekonomi	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau (i18)						Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup serta ketahanan iklim dan bencana	
				a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah (i18a)	63,49	68,07	72,65	77,23	81,81		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
9	Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (i25)	2,64-3,10	3,11-3,53	3,58-3,95	4,05-4,38	4,52-4,80	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik	
				Indeks Pelayanan Publik (i26)	4,4	4,55	4,7	4,85	5		
10	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui ekonomi kreatif	Peran Kepala Daerah dalam Menciptakan Inovasi Daerah	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan	Indeks Inovasi Daerah (i35)	70,45-73,1	74,2-76,8	77,9-80,55	81,65-84,3	85-90	Meningkatnya inovasi daerah	

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
11	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui ekonomi kreatif	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan energi, air, dan pangan (i43)						Meningkatnya produktivitas ekonomi melalui transformasi ekonomi	
				a. Ketahanan Energi (i43a)							
				b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) (i43b)	8,77	7,56	6,36	5,15	3,95		
				c. Ketahanan Air (i43c)							
				i. Kapasitas Air Baku yang terbangun di Kab/Kota	0,7	1,23	1,76	2,29	2,82		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
				(m3/detik)* (i43ci)							
				ii. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Aman (%) (i43cii)	27,92	45,94	63,96	81,98	100		
12	Misi 4: Pembangunan sosial budaya dan ekologi serta meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Kebudayaan (i37)						Meningkatnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya dan relligius	
				a. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya	80	85	90	95	100		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
				yang ditetapkan terhadap total pendaftaran (i37a)							
				b. Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total pencatatan (i37b)	80	85	90	95	100		
				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (i38)	75,26-75,31	77,04-77,19	78,82-79,07	80,6-80,95	82,37-82,83		
13	Misi 4: Pembangunan sosial budaya dan ekologi serta meningkatnya keamanan	Keluarga Berkualitas, Kesejahteraan Gender dan	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (i39)	72,36-72,37	73,62-73,67	74,92-74,97	76,22-76,28	77,5-77,57	Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga dan Pemberdayaan Gender	

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
	masyarakat dan penegakan demokrasi	Masyarakat Inklusif									
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (i40)	0,33	0,29	0,25	0,21	0,17		
14	Misi 4: Pembangunan sosial budaya dan ekologi serta meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan	Angka Kriminalitas (i28)	375-350	318-288	262-226	205-163	150-100	Meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi	
15	Misi 5: Meningkatkan sinergi dan pembangunan merata dan berkeadilan	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Indeks Risiko Bencana (IRB)* (i44)	141,71	134,58	127,45	120,33	113,21	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup serta ketahanan	

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
	serta infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan ramah lingkungan									iklim dan bencana	
				Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (i45)							
				Kumulatif (i45a)	17,37	21,12	24,87	28,62	32,36		
				Tahunan (i45b)	28,15	32,92	37,68	42,44	47,21		
16	Misi 5: Meningkatkan sinergi dan pembangunan merata dan berkeadilan serta infrastruktur ekonomi yang berkualitas	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan (i23)						Meningkatnya pembangunan kota dan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
	dan ramah lingkungan										
				b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) (i23b)	75	81,25	87,5	93,75	100		
				c. Persentase Desa Mandiri (123c)	20,9	28,4	35,8	43,3	50,8		
17	Misi 5: Meningkatkan sinergi dan pembangunan merata dan berkeadilan serta infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan ramah lingkungan	Lingkungan Hidup Berkualitas	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Kualitas lingkungan hidup (i42)						Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup serta ketahanan iklim dan bencana	

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
				a. Indeks kualitas lingkungan hidup (i42a)	60,98	62,04	63,10	64,16	65,22		
				b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) (i42b)	96,81	97,31	97,82	98,32	98,82		
				c. Pengelolaan Sampah (i42c)							
				i. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) (i42ci)	25-30	36,25-41,42	47,5-52,36	58,75-63,84	70-80		
				ii. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan	28,38-31,72	43,79-48,79	59,20-65,86	74,61-82,93	90-100		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator	Target per Periode					Sasaran Pokok	Ket
					Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
				Sampah (% RT) (i42cii)							
				iii. Timbulan Sampah Tertangani di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) (i42ciii)	64,43-67,07	69,57-72,8	74,71-78,53	79,85-84,26	85-90		

Tabel 5. 4 Sasaran Pokok Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Target per Periode					Ket
				Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Pelayanan dan Penyediaan Kualitas dan Akses Kesehatan Masyarakat	IE1. Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) (i1)	75	76,28	77,55	78,83	80,1	
			Kesehatan Ibu dan Anak (i2):						
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (i2a)	49	42	35	28	21	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (i2b)	4	3,12	2,25	1,37	0,5	
			Penanganan Tuberkulosis (i3):						
			a. Cakupan penemuan dan	100	100	100	100	100	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Target per Periode					Ket
				Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
			pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)* (i3a)						
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)* (i3b)	100	100	100	100	100	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (i4)	99,98	100	100	100	100	
2	Meningkatnya Pelayanan, Penyediaan dan Pemerataan Kualitas dan	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Hasil pembelajaran (i5)						

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Target per Periode					Ket
				Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
	Akses Pendidikan								
			a) Persentase kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk* (i5a):						
			i. Literasi Membaca (i5ai)	44,44	55,56	66,67	77,78	88,89	
			ii. Numerasi (i5aii)	33,33	44,44	55,56	66,67	77,78	
			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat						

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Target per Periode					Ket
				Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
			nasional untuk* (i5b):						
			i. Literasi Membaca (i5bi)	35,18	45,23	55,28	65,33	75,38	
			ii. Numerasi (i5bii)	24,63	34,68	44,73	54,78	64,83	
			c) Rata-Rata lama sekolah (tahun) (i5c)	11,93-12,45	12,5-12,8	12,9-13,2	13,3-13,65	13,75-14,45	
			d) Harapan Lama Sekolah (tahun) (i5d)	16,07-16,35	16,4-16,65	16,7-16,93	17-17,32	17,43-17,48	
			Persentase Tenaga Kerja yang berkualifikasi pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) (i7)	71	73,5	76	78,5	81	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Target per Periode					Ket
				Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%) (i8)	13,34-12,97	11,52-11	10,24-9,04	8,62-7,08	6,75-5,12	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kab/Kota (i9)	67	71,55	76,1	80,65	85,22	
4	Meningkatnya Implementasi Integrasi Teknologi dan Inovasi	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) (i11)	3,07-3,33	3,32-3,48	3,57-3,76	3,82-3,98	4,07-4,77	
			Pengembangan Pariwisata (i12)						
			a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* (i12a)	2,15-2,50	2,79-3,14	3,43-3,78	4,07-4,42	4,72-5,15	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Target per Periode					Ket
				Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
			b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)* (i12b)	0,35	0,46	0,57	0,68	0,8	
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD (i14)						
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (i14a)						
			i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten/Kota (%) (i14ai)	11,55	12,91	14,28	15,65	17,01	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Target per Periode					Ket
				Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
			ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%) (i14aii)	2,17	3,38	4,58	5,79	7	
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%) (i14b)	3,85	4,89	5,92	6,96	8	
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) (i14c)	1,22	2,29-2,42	3,36-3,61	4,43-4,80	5,5-6	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (i15)	4,96-4,75	4,66-4,45	4,36-4,15	4,06-3,85	3,78-3,50	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) (i16)	57,08	60,65	64,22	67,79	71,37	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Target per Periode					Ket
				Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
			Tingkat Penguasaan IPTEK (i17)						
			a. Indeks Daya Saing Daerah (i17a)	3,91-3,94	3,97-4,07	4,08-4,17	4,2-4,28	4,32-4,50	
		Transformasi Digital	Komunikasi dan informasi (i19)						
			a. Jumlah pelanggan telepon selular per 100 penduduk (i19a)	282.456	334.765	387.074	439.383	491.693	
			b. Persentase rumah tangga dengan akses internet (i19b)	80,87	83,08	85,28	87,49	89,7	
5	Meningkatnya inovasi daerah	Peran Kepala Daerah Dalam Menciptakan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (i35)	70,45-73,1	74,2-76,8	77,9-80,55	81,65-84,3	85-90	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Target per Periode					Ket
				Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
6	Meningkatnya produktivitas ekonomi melalui transformasi ekonomi	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (i21)	50,90	51,55	52,2	52,85	53,50	
		Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) (i31)	1,17	1,30	1,44	1,57	1,70	
			Tingkat Inflasi (%) (i32)	2,9	2,78	2,66	2,54	2,43	
			Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan (i33)						
			a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) (i33a)	30,44	38,70	46,97	55,23	63,5	
			b. Total Kredit/PDRB (%) (i33b)	29,1	37,45	45,8	54,15	62,5	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Target per Periode					Ket
				Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
		Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Ketahanan energi, air, dan pangan (i43)						
			a. Ketahanan Energi (i43a)						
			b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%) (i43b)	8,77	7,56	6,36	5,15	3,95	
			c. Ketahanan Air (i43c)						
			i. Kapasitas Air Baku yang terbangun di kab/kota (m ³ /detik)* (i43ci)	0,7	1,23	1,76	2,29	2,82	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Target per Periode					Ket
				Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
			ii. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Aman (%) (i43cii)	27,92	45,94	63,96	81,98	100	
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (i25)	2,64-3,10	3,11-3,53	3,58-3,95	4,05-4,38	4,52-4,80	
			Indeks Pelayanan Publik (i26)	4,4	4,55	4,7	4,85	5	
8	Meningkatnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya dan Relligius	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Kebudayaan (i37)						
			a. Persentase benda, bangunan,	80	85	90	95	100	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Target per Periode					Ket
				Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
			struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan terhadap total pendaftaran (i37a)						
			b. Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total pencatatan (i37b)	80	85	90	95	100	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (i38)	75,26-75,31	77,04-77,19	78,82-79,07	80,6-80,95	82,37-82,83	
9	Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga dan Pemberdayaan Gender	Keluarga Berkualitas, Kesejahteraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (i39)	72,36-72,37	73,62-73,67	74,92-74,97	76,22-76,28	77,5-77,57	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Target per Periode					Ket
				Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (i40)	0,33	0,29	0,25	0,21	0,17	
10	Meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial	Angka Kriminalitas (i28)	375-350	318-288	262-226	205-163	150-100	
11	Meningkatnya pembangunan kota dan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan (i23)						
			b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) (i23b)	75	81,25	87,5	93,75	100	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Target per Periode					Ket
				Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
			c. Persentase Desa Mandiri (123c)	20,9	28,4	35,8	43,3	50,8	
12	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup serta ketahanan iklim dan bencana	Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau (i18)						
			a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah (i18a)	63,49	68,07	72,65	77,23	81,81	
		Lingkungan Hidup Berkualitas	Kualitas lingkungan hidup (i42)						
			a. Indeks kualitas lingkungan hidup (i42a)	60,98	62,04	63,10	64,16	65,22	
			b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) (i42b)	96,81	97,31	97,82	98,32	98,82	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Target per Periode					Ket
				Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
			c. Pengelolaan Sampah (i42c)						
			i. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) (i42ci)	25-30	36,25-41,42	47,5-52,36	58,75-63,84	70-80	
			ii. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) (i42cii)	28,38-31,72	43,79-48,79	59,20-65,86	74,61-82,93	90-100	
			iii. Timbulan Sampah Tertangani di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) (i42ciii)	64,43-67,07	69,57-72,8	74,71-78,53	79,85-84,26	85-90	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Target per Periode					Ket
				Base Line 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)* (i44)	141,71	134,58	127,45	120,33	113,21	
			Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (i45)						
			Kumulatif (i45a)	17,37	21,12	24,87	28,62	32,36	
			Tahunan (i45b)	28,15	32,92	37,68	42,44	47,21	

BAB VI PENUTUP

6.1. Catatan Penting Pelaksanaan

Pembangunan jangka panjang memerlukan tahapan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya dan akan menjadi fokus utama kepala daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah. Prioritas tahapan dan tingkat prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang perlu diatasi tanpa mengabaikan isu lainnya. Oleh karena itu, tekanan pada tingkat prioritas berbeda-beda di setiap tahap, tetapi semuanya harus berkelanjutan dari satu periode ke periode berikutnya untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Pembangunan jangka panjang Kota Bengkulu merupakan suatu proses pencapaian keterpaduan dalam menghasilkan visi, misi, tahapan pembangunan, sasaran pokok, dan arah kebijakan pada berbagai fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Keterpaduan dan sinkronisasi antar program lintas fungsi maupun lintas daerah tetap memperhatikan peran, tanggung jawab dan tugas yang melekat pada pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045 dengan visi pembangunan "**Kota Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**" sebagai pemandu dan sekaligus koridor yang menentukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Bengkulu. RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045 juga berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai acuan dalam penyusunan visi, misi dan berbagai program pembangunan kepala daerah dalam RPJMD Kota Bengkulu, sehingga kedudukan RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045 menjadi sangat sentral untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kota. Dalam mengimplementasikan rencana jangka panjang daerah, diperlukan kaidah untuk dapat menjamin terlaksananya rencana pembangunan tersebut. Kaidah pelaksanaan dimaksudkan sebagai pedoman substansi maupun sebagai pedoman prasyarat terselenggaranya proses pembangunan jangka panjang secara terintegrasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

6.2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan kota untuk jangka panjang, yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan berbagai produk perencanaan seperti RPJMD dan RKPD dengan konsisten. RPJPD ini, yang berbentuk peraturan daerah, memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat di Kota Bengkulu. Lebih dari sekadar aspek hukum, RPJPD juga menjadi landasan bagi Wali Kota Bengkulu yang terpilih untuk merumuskan visi dan misi mereka dalam RPJMD. Oleh karena itu, RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045 diharapkan dapat:

1. menjadi acuan dalam menyusun visi, misi, dan program pembangunan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
2. mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis, terpadu dan terintegrasi dengan arah pembangunan provinsi maupun nasional. Dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045, maka pemerintah kota menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Transparansi publik dalam pelaksanaan RPJPD menjamin akses informasi pembangunan kepada semua pihak yang berkepentingan, dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan. Transparansi bukan hanya tentang objektivitas dan keterbukaan, tetapi juga menerima kritik konstruktif dari masyarakat untuk terus meningkatkan kinerja pemerintah, birokrasi, layanan publik, dan pelaksanaan program pembangunan.

Prinsip akuntabilitas publik mencakup kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pembangunan secara berkala. Setiap instansi pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka dalam mengelola sumber daya dari perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi.

Pembangunan partisipatif mengubah peran masyarakat dari penerima manfaat menjadi pelaku pembangunan yang sentral dan strategis. Tiga prinsip ini adalah prasyarat bagi perencanaan jangka panjang yang berhasil, melibatkan semua pemangku kepentingan di Kota Bengkulu. Keberhasilan mencapai visi pembangunan jangka panjang sangat bergantung pada komitmen pemimpin daerah, kebijakan yang konsisten, dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045 merupakan acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mencapai sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah maupun masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045 dengan sebaik-baiknya;
2. Walikota berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045 ke dalam visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Bengkulu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renstra-PD;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Walikota dan jajaran organisasi perangkat daerah serta masyarakat berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu, Rencana Strategis (Renstra) PD Kota Bengkulu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu dan Rencana Kerja (Renja) PD Kota Bengkulu;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045, sebagai berikut:
 - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang melalui pemantauan, supervisi, dan penilaian hasil capaian kinerja pelaksanaan RPJPD secara periodik;

- b. Menyusun dan melaksanakan manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- c. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap perubahan pencapaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang, maka penetapan perubahan RPJPD ditetapkan dengan peraturan Walikota.

6.3. Prasyarat Pelaksanaan

Hal yang penting dalam implementasi rencana pembangunan terdiri dari tiga tahapan, yaitu perencanaan, implementasi, dan pengendalian. Pemerintah Kota Bengkulu wajib melakukan sosialisasi kepada semua aparat penyelenggara Pemerintahan di Kota Bengkulu dan semua lapisan masyarakat atas produk RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045 yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah melalui berbagai forum atau media yang efektif. Dengan demikian diharapkan substansi perencanaan daerah dalam RPJPD dapat dipahami, sehingga dapat meningkatkan peran serta dalam pembangunan Kota Bengkulu.

RPJPD sebagai produk perencanaan jangka panjang daerah yang mencakup 4 (empat) periode lima tahunan, maka Perda RPJPD menjadi acuan Walikota periode berjalan dan Walikota periode yang akan datang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan sebagaimana telah ditetapkannya arah kebijakan pembangunan sampai tahun 2045.

Dalam rencana pembangunan daerah, perlu dilakukan evaluasi dan pembaharuan secara berkala terhadap RPJPD Kota Bengkulu. Hal ini bertujuan supaya rencana pembangunan tetap relevan dan sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta dapat mengakomodasi perubahan kebijakan nasional maupun regional. RPJPD Kota Bengkulu tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga instrumen dinamis yang responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kota Bengkulu.

Wj. Wali Kota Bengkulu,



Arif Gunadi